

MENGOPTIMALKAN POTENSI DI TENGAH SITUASI YANG TAK PASTI

OPTIMIZING POTENTIAL IN THE MIDST OF UNCERTAINTY

LAPORAN PERUSAHAAN **2020**
CORPORATE REPORT



DAFTAR ISI

Table of Content

Transformasi Jamkrindo <i>Jamkrindo Transformation</i>	4	Kinerja PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Entitas Anak) <i>Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Subsidiaries)</i>	85
Informasi Umum Tentang Jamkrindo <i>General Information About Jamkrindo</i>	8	Tinjauan Keuangan <i>Financial Review</i>	88
Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certifications</i>	10	Laporan Posisi Keuangan <i>Statements of Financial Position</i>	89
Keanggotaan Asosiasi <i>Association Membership</i>	13	Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian <i>Consolidated Statements of Profit Or Loss and Other Comprehensive Income</i>	103
Peristiwa Penting <i>Significant Events</i>	14	Laporan Arus Kas <i>Statements of Cash Flows</i>	110
Riwayat Singkat Jamkrindo <i>Brief History of Jamkrindo</i>	18	Rasio Keuangan Utama <i>Key Financial Ratios</i>	112
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>	22	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang <i>The Company's Ability to Pay Debts and Collectibility of Receivables</i>	113
Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>	24	Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal <i>Capital Structure and Capital Structure Policies</i>	116
Profil Dewan Pengawas Syariah <i>Profile of Sharia Supervisory Board</i>	32	Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitments For Capital Expenditures</i>	117
Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>	34	Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Pada Tahun Buku <i>Investment in Capital Expenditures Realized in The Financial Year</i>	117
Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	40	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Material Information and Facts That Occur After The Date of The Accountant's Report</i>	118
Bidang Usaha Serta Produk dan Jasa <i>Line of Business and Products and Services</i>	42	Perbandingan Target dan Realisasi, Serta Proyeksi Satu Tahun Ke Depan <i>Comparison of Targets and Realizations, As Well As Projections For The Next Year</i>	120
Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>	48	Kebijakan dan Pembagian Dividen <i>Policies and Dividend Distribution</i>	121
Kinerja Jamkrindo <i>Jamkrindo's Performance</i>	57	Kontribusi Kepada Negara <i>Contribution to The Country</i>	122
Tinjauan Operasional <i>Operational Review</i>	60	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen <i>Share Ownership Program by Employees and/or Management</i>	123
Strategi Pengembangan Usaha <i>Business Development Strategy</i>	60		
Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspects</i>	65		
Tinjauan Per Segmen Usaha <i>Review by Business Segment</i>	68		
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan <i>Guarantee Fee</i>	69		
Pendapatan Investasi <i>Investment Income</i>	82		

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Realization of The Use of Funds Resulting From The Public Offering</i>	123
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal <i>Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation of Business, Acquisition, Debt/Capital Restructuring</i>	123
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi <i>Information Regarding Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions With Affiliated Parties</i>	124
Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance</i>	125
Hasil Tata Kelola: Evaluasi dan Pemantauan Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Governance Results: Evaluation and Monitoring of Corporate Governance Implementation</i>	135
Struktur Organ Tata Kelola <i>Governance Structure and Process</i>	162
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan <i>Partnership and Community Development Program Unit</i>	164
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup <i>Corporate Social Responsibility to Environment</i>	168
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development</i>	174
Kisah Sukses Mitra Binaan <i>Success Stories of Foster Partners</i>	177



TRANSFORMASI JAMKRINDO

Jamkrindo Transformation

Jamkrindo
JAMKRINDO KREDIT INDONESIA
A member of IFG



Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk

Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit

1970 - 1981



Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT

Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Sapi Perah Credit, Padi Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT

1981 - 2000



Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah

Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product

2000 - 2008

Dengan cikal bakal di tahun 1970, Jamkrindo telah melalui perjalanan panjang hingga akhirnya menjadi bagian pilar dari *Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan*.

1970 became Jamkrindo's forerunner in passing a long journey to become part of pillar from the state-owned Insurance and Guarantee Holding company.



Jamkrindo

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN. *Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.*

2008 - 2020



Jamkrindo

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN. *Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.*

2020



Jamkrindo
a member of IFG

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2020 - Sekarang

LAYANAN PENJAMINAN DALAM RANGKA PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM NASIONAL

Guarantee Services in order to Strengthen National Cooperatives and MSMEs

Jamkrindo didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM), serta Koperasi.

Jamkrindo was established with the main objective to provide guarantees for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as well as cooperatives.

Pemerintah Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk mendorong koperasi dan UMKM sebagai bagian dari pilar perekonomian nasional. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendirikan Jamkrindo yang memberikan Penjaminan bagi UMUM dan Koperasi. Di samping itu, Jamkrindo juga memberikan Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.

The Government of Indonesia has a high spirit to encourage cooperatives and MSMEs as part of the pillars of the national economy. Therefore, the Government of Indonesia established Jamkrindo to provide guarantees for MSMEs and cooperatives. In addition, Jamkrindo also provides guarantees for SOEs, Warehouse Receipt System Guarantees, and other Guarantees.

Kegiatan usaha Penjaminan Kredit yang diberikan Jamkrindo adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Credit Guarantee business activities provided by Jamkrindo is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit giving business entity called the Guarantee Receiver, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.





Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Dengan layanan Penjaminan yang diberikan, Jamkrindo diharapkan dapat memperkokoh perekonomian nasional, khususnya bagi penguatan perekonomian di sektor UMKM dan koperasi.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of Guarantee but does not eliminate guaranteed financial obligations to the Recipient of Guarantee until the Recipient of Guarantee states the Guaranteed Credit is paid off.

Credit Guarantee is required by the Guarantee Receiver when the loan application from Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Receiver but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.

With the guarantee services provided, Jamkrindo is expected to strengthen the national economy, especially for strengthening of the economy in MSME and cooperative sectors.



INFORMASI UMUM TENTANG JAMKRINDO

General Information About Jamkrindo



Nama Perusahaan
Company Name

Perseroan Terbatas (PT) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat menjadi **PT Jamkrindo**
PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated to PT Jamkrindo



Bentuk dan Status Badan Usaha
Form and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT)
Limited Liability Company



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

1 Juli 1970
July 1, 1970



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No.25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jamkrindo Tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat serta telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 Nomor AHU-0066418.AH.01.11.Tahun 2020

Deed of Establishment No.25 dated February 24, 2020, and was last amended by Deed of Decree of the Shareholders of PT Jamkrindo (Persero) regarding Amendment to Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary in Central Jakarta and received the Establishment Ratification of a Limited Liability Company from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 9, 2020, Number AHU-0066418. AH.01.11. of 2020



Bidang Usaha Line of Business

Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.

Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKMK), Guarantee for BUMN, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.



Jaringan Usaha Business Network

9 (sembilan) Kantor Wilayah, 56 (lima puluh enam) Kantor Cabang dan 16 (enam belas) Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia
9 (nine) Regional Offices, 56 (fifty six) Branch Offices dan 16 (sixteen) Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia



Kepemilikan Ownership

Saham Seri A Dwiwarna
Pemerintah Republik Indonesia (0,0000001787%)
Series A Dwiwarna Shares
The Government of Republik Indonesia (0.0000001787%)

Saham Seri B
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
(99,9999998213%)
Series B Shares
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
(99.9999998213%)



Karyawan Tetap Permanent Employee

965 orang di tahun 2020 / 965 people in 2020



Alamat Address

Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp. : +62 21 6540335
Fax. : +62 21 6540344, 6540348
Email : contact@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id



@pt_jamkrindo



@pt_jamkrindo



Jamkrindo



PT Jamkrindo

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications



31 Mei / May

European Award for Best Practices 2020 European Award for Best Practices 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Gold Category Best Practices
Gold Category Best Practices

Acara/Event

BUMN Marketers Awards 2019
BUMN Marketers Awards 2019

oleh/by

European Society Quality Research
European Society Quality Research

01 Juli / July

Rekor MURI Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Perusahaan dengan Proses Perubahan Badan Hukum Tercepat
Companies with the Fastest Legal Entity Change Process

Acara/Event
Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by
MURI
MURI



01 Juli / July

Rekor MURI Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Perusahaan dengan Pergantian Badan Hukum Terbanyak
Companies with the Most Legal Entity Changing

Acara/Event
Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by
MURI
MURI



09 Juli / July

Emerging Stated Owned Enterprise Emerging Stated Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Terbaik II
Best II

Acara/Event
9th Anugerah BUMN 2022
9th BUMN Award 2022

oleh/by
BUMNTrack
BUMNTrack





29 Juli / July

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
 The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
 The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Acara/Event
 GRC & Performance Excellence Award 2020
 GRC & Performance Excellence Award 2020

oleh/by
 Businessnews
 Businessnews

16 September / September

The Most Promising Company in Strategic Marketing
The Most Promising Company in Strategic Marketing

Deskripsi Penghargaan/Award Description
 Bronze Winner
 Bronze Winner

Acara/Event
 BUMN Marketers Award 2020
 BUMN Marketers Award 2020

oleh/by
 BUMN Marketers Club
 BUMN Marketers Club



23 September / September

Excellent in Brand Among Indonesia Millenials in 2020
Excellent in Brand Among Indonesia Millenials in 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
 Gold Winner
 Gold Winner

Acara/Event
 BUMN Brand Award 2020
 BUMN Brand Award 2020

oleh/by
 RRI dan Economics
 RRI dan Economics

07 Oktober / October

Top GRC Awards 2020 #Star4
Top GRC Awards 2020 #Star4

Deskripsi Penghargaan/Award Description
 #Star4
 #Star4

Acara/Event
 Top Governance, Risk & Compliance 2020
 Top Governance, Risk & Compliance 2020

oleh/by
 Top Business
 Top Business



03 November / November

The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise
The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan/Award Description
 Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019
 Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019

Acara/Event
 11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020
 11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020

oleh/by
 Infobank
 Infobank

05 November / November

Corporate Communication Terbaik
The Best Corporate Communication

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Corporate Communication Terbaik
The Best Corporate Communication

Acara/Event
BUMN Branding & Marketing Award 2020
BUMN Branding & Marketing Award 2020

oleh/by
BUMNTrack
BUMNTrack



25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020
The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020

Acara/Event
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards

oleh/by
Businessnews
Businessnews



25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Acara/Event
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards

oleh/by
Businessnews
Businessnews



08 Desember / December

The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Acara/Event
Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, dan
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, dan
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

oleh/by
Tempo Country Contributor
Award 2020
Tempo Country Contributor
Award 2020



2020

**Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia**

*Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia*

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia
*Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia*

Acara/Event
TOP CSR PKBL of The Year 2020
TOP CSR PKBL of The Year 2020

oleh/by
Trans Co Indonesia dan Info Brand
Trans Co Indonesia dan Info Brand



Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2020

Certification that Applies in 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Date of Certification Issued</i>	Jenis Sertifikat <i>Certificate Type</i>	Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Dikeluarkan Oleh <i>Issued by</i>	Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period Until</i>
2 Mei 2018 <i>May 2, 2018</i>	Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 <i>2015 Quality Management Certification</i>	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan standard bertaraf Internasional yang bertujuan untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu Perusahaan <i>Quality Management System Certification with international standard that aims to guarantee the products or services produced by a Company</i>	Sucofindo	1 Mei 2021 <i>May 1, 2021</i>
5 Agustus 2020 <i>August 5, 2020</i>	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016 <i>2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification</i>	Sertifikasi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. <i>Certification to take preventive measures to prevent, detect, or address bribery occurring in an enterprise environment</i>	PT SAI Global Indonesia	4 Agustus 2023 <i>August 4, 2023</i>
21 Desember 2020 <i>December 21, 2020</i>	Sertifikasi Pemeringkatan AA+ dari Pefindo <i>AA+ Rating Certification from Pefindo</i>	Sertifikasi terhadap Perusahaan atas Risiko Kredit <i>Certification of Companies for Credit Risk</i>	PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO)	1 Desember 2021 <i>December 1, 2021</i>

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Association Membership

Untuk memperkuat bisnisnya, Jamkrindo telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, yaitu ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia).

To strengthen its business, Jamkrindo has joined the membership of the organization, namely ASIPPINDO (Association of Indonesian Guarantee Companies).

PERISTIWA PENTING

Significant Events



Penutupan Perdagangan BEI tahun 2019 dan pembukaan BEI tahun 2020 (IDX)

IDX Trading Closing in 2019 and IDX opening in 2020 (IDX)



Jakarta, Januari 2020

Jakarta, January 2020



Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrindo

General Meeting of Shareholders of PT Jamkrindo



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Live Berita Satu TV (Kesiapan Perusahaan Menghadapi COVID-19)

Live on Berita Satu TV (Company's Readiness to Deal with COVID-19)



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Sosialisasi Value BUMN AKHLAK

Socialization of Value of BUMN AKHLAK



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Jamkrindo dan PT Askrindo dengan Penjamin terkait Penjaminan KMK PEN

Signing of Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Askrindo with Guarantors related to KMK PEN Guarantee



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Peluncuran Logo BUMN dan Slogan BUMN

Launch of SOEs Logo and Slogan



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Seremoni HUT ke-50 Tahun PT Jamkrindo

50th Anniversary Ceremony of PT Jamkrindo



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Webinar Jamkrindo Talk

Webinar Jamkrindo Talk



Jakarta, Agustus 2020

Jakarta, August 2020



Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kemenkop dan KBUMN

Signing of Joint Agreement with the Ministry of Cooperatives and the Ministry of SOEs



Jakarta, Agustus 2020

Jakarta, August 2020



Ceremonial Penandatanganan PKS Penjaminan Program PEN dengan BPD Kalsel

Ceremonial Signing of Cooperation Agreement for PEN Program Guarantee with Local Development Bank in South Kalimantan



Jakarta, September 2020

Jakarta, September 2020



Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)

Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)



Jakarta, September 2020

Jakarta, September 2020



Webinar Penjaminan KMK PEN untuk Pemulihan Ekonomi Terdampak COVID-19

Webinar on KMK PEN Guarantee for Economic Recovery Impacted by COVID-19



Jakarta, Oktober 2020

Jakarta, October 2020



Ngopi Bareng Indonesia Financial Group (IFG)

Ngopi Bareng with Indonesia Financial Group (IFG)



Jakarta, Oktober 2020

Jakarta, October 2020



Penandatanganan Komitmen AKHLAK bersama PT BPUI

Signing of AKHLAK Commitment with PT BPUI



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Live Streaming Peluncuran IFG

Live Streaming of IFG Launch



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020





Program Pengenalan Direksi

Orientation Program for Directors



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Webinar Jamkrindo UMKM Appreciation Awards 2020

Webinar Jamkrindo MSMEs Appreciation Awards 2020



Jakarta, Desember 2020

Jakarta, December 2020



Kunjungan Kerja komisi VI DPR RI

Working Visit of Commission VI DPR RI



Banjarmasin, Desember 2020

Banjarmasin, December 2020

RIWAYAT SINGKAT JAMKRINDO

Brief History of Jamkrindo



Selayang Pandang Sejarah PT Jamkrindo

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No.51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.27 tanggal 31 Mei 1985.

History of PT Jamkrindo at a Glance

Starting from the real condition in which the development of cooperative was still behind compared to two other economic actors (SOE's and Private), the Government established Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) in 1970 which in its development was changed to Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) through Government Regulation No.51 dated December 23, 1981, which is renewed by Government Regulation No.27 dated May 31, 1985.

Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Peraturan Pemerintah No.95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No.41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan No.KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) merubah status badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari BUMN holding Perasuransian dan Penjaminan.

Along with its success in carrying out the functions and duties of PKK Perum in developing cooperatives through Credit Guarantee activities, the Government expanded the range of PKK Perum services, becoming not only limited to cooperatives, but also includes Micro, Small and Medium Enterprises through Government Regulation No.95 dated November 7, 2000 and at the same time changed the name of PKK Perum to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Furthermore, in May 2008, through Government Regulation No.41 dated May 19, 2008, the name of Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) was changed again become Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). The change of company name is related to business changes, the Company no longer provides loans directly to MSMEs and Cooperatives through profit sharing patterns, but focuses on the MSME and Cooperative credit guarantee business. In 2008 also, the Government issued Presidential Regulation No.2 dated January 26, 2008 concerning the Guarantee Institution. To implement the Presidential Regulation, the Government in this case the Ministry of Finance, issued Regulation of the Minister of Finance No.222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. With the regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued Decree No.KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009 which stipulates Perum Jamkrindo's business license as a Credit Guarantee company.

President of the Republic of Indonesia Joko Widodo officially changed the legal entity of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia or Perum Jamkrindo become a Limited Liability Company through Government Regulation No.11 of 2020 dated February 14, 2020 concerning the Change of Legal Entity Form from Public Corporation (PERUM) of Jaminan Kredit Indonesia into a Limited Liability Company (Persero) that has been enacted on February 17, 2020. This decision was strengthened by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Year 2020 concerning Ratification of establishment of Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of the Company PT Jaminan Kredit Indonesia was signed at the Ministry of SOE Building, Jakarta on February 24, 2020.

Then based on Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) changed the status of legal entity PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to PT Jamkrindo and officially became a subsidiary of the SOEs holding of Insurance and Guarantee.

Adapun, perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak Perusahaan Pasar Modal dan Jasa Keuangan:
 - PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), bergerak di bidang manajemen investasi
 - PT Bahana Sekuritas, bergerak dibidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek,
 - PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia
 - PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (advisory)
 - PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), bergerak dibidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung.
2. Anak Perusahaan Asuransi
 - PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askindo") yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum,
 - PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank.
 - PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja") bergerak dibidang asuransi sosial
 - PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") bergerak dibidang asuransi umum

Perubahan Nama Perusahaan

Kronologi proses perubahan nama PT Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985.
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2000.
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008.

Meanwhile, the companies that are members of the BUMN Holding Insurance and Guarantee are as follows:

1. Capital Market and Financial Services Subsidiaries:
 - PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), is engaged in investment management
 - PT Bahana Sekuritas, is engaged in securities underwriting and securities trading brokerage
 - PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), which is engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia
 - PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), is engaged in investment and financial advisory services (advisory)
 - PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), is engaged in building ownership, management, and rental.
2. Insurance Subsidiary
 - PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askindo") which carries out business in the field of credit insurance and general insurance services
 - PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") which provides guarantees, either directly or indirectly, to banks or non-banks.
 - PT Asuransi Jasa Raharja ("Jasa Raharja") is engaged in social insurance
 - PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") is engaged in general insurance

The Change of Company's Name

The chronology of the name change process of PT Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- The company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No.51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No.27 of 1985.
- The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No.95 of 2000.
- The company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No.41 of 2008.

- Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No.25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero).
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari holding Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.
- *In order to change the form of Perum Jamkrindo legal entity from Public Corporation (PERUM) to Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No.11/2020 which has been enacted on February 17, 2020. To comply with the provisions of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company signed the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) namely Deed No.25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020 and has been ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Year 2020 Concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero).*
- *Based on Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the Deed of Amendment to the Articles of Association No.2 dated April 9, 2020 which was ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02 Year 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding under the name of PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as PT Jamkrindo.*

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission and Corporate Culture

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No: S-286/MBU/05/2019 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Visi dan Misi Jamkrindo sebagai berikut:

In order to ensure the implementation of professional business activities based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No.S-286/MBU/05/2019 concerning Approval and Endorsement of the Company's Long-Term Plan, thus Jamkrindo's Vision and Mission are as follows:



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

To become a Leading Guarantee Company that Supports the National Economic Development.



Misi Mission

Meningkatkan **Aksesibilitas** finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang **Inovatif, Kompetitif** dengan pelayanan **Profesional, Efektif** dan **Efisien** secara **Berkelanjutan**.

*Improving MSMEs' and Cooperatives' Financial **Accessibilities** through the provision of Guarantee, which is **Innovative, Competitive** with a **Professional, Effective, and Efficient** Services **Sustainably**.*

Budaya Perusahaan

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya **"AKHLAK"**.

Corporate Culture

In accordance with the direction of the Minister of SOEs to all state-owned enterprises, so Jamkrindo's corporate culture consists of 5 (five) items of cultural values embraced by the Company, namely the culture of **"AKHLAK"**.



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



1

Sri Mulyanto
Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

2

Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

3

Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si
Komisaris Independen
Independent Commissioner

4

Diah Natalisa
Komisaris
Commissioner

5

Noor Ida Khomsiyati
Komisaris
Commissioner

6

Ari Wahyuni
Komisaris
Commissioner

7

Desty Arlaini
Komisaris
Commissioner



Sri Mulyanto

Komisaris Utama/Independen

President Commissioner/Independent

Periode Jabatan: 27 Oktober 2017 – 26 Oktober 2022, Periode Pertama

Term of Office: October 27, 2017 – October 26, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Klaten
8 Oktober / October 8

1958

62 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1993)

(S1) Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Education

Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, United States (1993)

Bachelor of Economics of Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Ketua Dewan Pengawas/Independen diemban sejak 27 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Sri Mulyanto diubah dari Ketua Dewan Pengawas/Independen menjadi Komisaris Utama/Independen.

Appointment History

The position of Chairman of the Supervisory Board/Independent has been carried out since October 27, 2017, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017, concerning Dismissal and Appointment of Chairman of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Chairman of the Supervisory Board/President Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Sri Mulyanto's position was changed from Chairman of the Supervisory Board/Independent to President Commissioner/Independent.

Riwayat Profesi

Direktur Umum dan SDM PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Komisaris PT Antam (2011-2012), Komisaris PT Jasa Raharja (2008-2012), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN (2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Kementerian BUMN (2006), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian BUMN (2002).

Professional History

Director of General Affairs and HR of PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Commissioner of PT Antam (2011-2012), Commissioner of PT Jasa Raharja (2008-2012), Assistant Deputy for Services Business III, the Ministry of SOEs (2010), Assistant Deputy for Insurance Business Affairs, the Ministry of SOEs (2006), Assistant Deputy of Construction Services Business Affairs, the Ministry of SOEs (2002).

Rangkap Jabatan

Sri Mulyanto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Sri Mulyanto does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Sri Mulyanto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Sri Mulyanto does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders



Muhammad Muchlas Rowi

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan: 17 Oktober 2019 – 16 Oktober 2024, Periode Pertama

Term of Office: October 17, 2019 – October 16, 2024, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Garut
31 Agustus / August 31

1972

48 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S1) Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (1998)

(S2) Magister Manajemen di STIE IBMT Surabaya (2019)

Education

Bachelor of Philosophy of Gadjah Mada University (1998)

Master of Management of STIE IBMT Surabaya (2019)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen diemban sejak 17 Oktober 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen/Komisaris Independen ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Muchlas Rowi diubah dari Anggota Dewan Pengawas Independen menjadi Komisaris Independen.

Appointment History

The position of Member of the Independent Supervisory Board has been carried out since October 17, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as the Independent Supervisory Board/Independent Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Muchlas Rowi's position was changed from Member of the Independent Supervisory Board/Independent to Independent Commissioner.

Riwayat Profesi

Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Institut Bisnis Muhammadiyah (2019 - sekarang), Pemilik Rosbuck Milk & Coffee (2018 - sekarang), General Manager Marketing PT Intan Sejati Klaten (2016 - 2018), Pimpinan Umum Monday Media Group (2015 - sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014 - sekarang), Komisaris PT Semen Indonesia Beton (2020 - sekarang).

Professional History

Treasurer of Daily Development Board of Muhammadiyah Business Institute (2019 - present), Rosbuck Milk & Coffee's owner (2018 - present), General Manager of Marketing of PT Intan Sejati Klaten (2016 - 2018), Managing Director of Monday Media Group (2015 - present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014 - present), Commissioner of PT Semen Indonesia Beton (2020 - present).

Rangkap Jabatan

Pimpinan Umum Monday Media Group (2015 - sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014 - sekarang).

Concurrent Position

Managing Director of Monday Media Group (2015-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014 - present).

Hubungan Afiliasi

Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Muhammad Muchlas Rowi does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan: 18 Januari 2021 - 17 Januari 2026, Periode Pertama

Term of Office: January 18, 2021 – January 17, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta
13 Oktober / October 13

1959

63 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006)

(S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004)

(S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1986)

(DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akutansi Negara (1981)

Education

Master of Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006)

Master of Management, Bhayangkara University (2004)

Bachelor of Economics from Faculty of Economics, Krisnadwipayana University (1986)

Diploma III from The State Accounting College (1981)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Komisaris Independen diemban sejak 18 Januari 2021 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Jamkrindo, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No.SK-19/MBU/01/2021 dan No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode pertama, sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan.

Appointment History

The position of the Independent Commissioner has been carried out since January 18, 2021, through the resolution of shareholders of PT Jamkrindo, the Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as the capital owner of PT Jamkrindo No.SK-19/MBU/01/2021 and No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is his first period as the Independent Commissioner, previously he had never served in the Supervisory Board /Board of Commissioners of the Company.

Riwayat Profesi

Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000 - 2006), Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006 - 2009), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009 - 2012), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012 - 2016), Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016 - 2017), dan Direktur PT Indobagus Investama (2018).

Professional History

Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Tax Inspection and Investigation Office (2000 - 2006), Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Medium Tax Office (2006 - 2009), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Tax Office, Cilandak (2009 - 2012), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Tax Office, Pasar Minggu (2012 - 2016), Head of Jakarta Tax Office, Cilandak (2016-2017), and Director of PT Indobagus Investama (2018).

Rangkap Jabatan

Hernita Alius tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Hernita Alius does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Hernita Alius tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.

Affiliate Relationships

Hernita Alius does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Noor Ida Khomsiyati

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan : 12 April 2016 – 11 April 2021, Periode Pertama

Term of Office: April 12, 2016 – April 11, 2021, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domisile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pati
8 Mei / May 8

1971

49 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister jurusan Manajemen SDM Universitas Bhayangkara (2006)

(S1) Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1995)

Education

Master of HR Management of Bhayangkara University, (2006)

Bachelor of Law of Diponegoro University, Semarang (1995)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 12 April 2016 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Noor Ida Khomsiyati diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris.

Appointment History

The position of Member of the Supervisory Board has been carried out since April 12, 2016, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-76/MBU/4/2016 dated April 12, 2016, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board/Board of Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Noor Ida Khomsiyati's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.

Riwayat Profesi

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014 - sekarang), Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN (2012 - 2014), Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2013 - 2015), Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II C Kementerian BUMN (2010 - 2012), Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN (2006 - 2010).

Professional History

Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014 - present), Head Division of Service and Legal Assistance 1 of the Ministry of SOEs (2012 - 2014), Member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) (2013 - 2015); Subdivision Head of Services and Legal Assistance II C of the Ministry of SOEs (2010 - 2012), Subdivision Head of Legal Services of the Ministry of SOEs (2006 - 2010).

Rangkap Jabatan

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014 - sekarang)

Concurrent Position

Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014 - present)

Hubungan Afiliasi

Noor Ida Khomsiyati tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Noor Ida Khomsiyati memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN.

Affiliate Relationships

Noor Ida Khomsiyati does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Noor Ida Khomsiyati has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs.



Diah Natalisa

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 3 Mei 2017 – 2 Mei 2021, Periode Pertama (tidak lagi menjabat sejak 18 Januari 2021)
Term of Office: May 3, 2017 – May 2, 2021, 1st Period (no longer in office since January 18, 2021)

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Palembang
 15 November / November 15

1963

57 Tahun
 Years Old

Pendidikan

Profesor dan (S3) Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (1999)
 (S2) Magister Manajemen, University of Kentucky (1992)
 (S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya (1987).

Education

*Professor and Doctor of Economics from Airlangga University (1999)
 Master of Management from University of Kentucky (1992)
 Bachelor of Economics majoring in Management from Sriwijaya University (1987).*

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Mei 2015 melalui Keputusan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Diah Natalisa diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-19/MBU/01/2021 dan Keputusan Direktur Utama PT BPUI (Persero) No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris karena masa jabatannya yang habis di tahun 2021.

Appointment History

Served as a Member of the Supervisory Board since May 3, 2015 through the Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-88/MBU/05/2017 dated May 3, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as Member of the Supervisory Board/Board of Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-19/MBU/01/2021 and the President Director of PT BPUI (Persero) Decree No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 dated January 18, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa no longer serves as Board of Commissioners due to her expired term in 2021.

Riwayat Profesi

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016 - sekarang), Koordinator KOPERTIS Wilayah II Kemdikbud RI (2008 - 2016), Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya (2005 - 2008).

Professional History

Deputy for Public Service of the Ministry of PANRB (2016 - present), Coordinator of KOPERTIS Region II of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia (2008 - 2016), Chairman of the Master of Management Study Program of Sriwijaya University (2005 - 2008).

Rangkap Jabatan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016 - sekarang)

Concurrent Position

Deputy for Public Service of the Ministry of PANRB (2016 - present)

Hubungan Afiliasi

Diah Natalisa tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Diah Natalisa memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian PANRB.

Affiliate Relationships

Diah Natalisa does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Diah Natalisa has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of PANRB.



Ari Wahyuni

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 3 Januari 2019 – 2 Januari 2024, Periode Pertama

Term of Office: January 3, 2019 – January 2, 2024, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bogor, West Java, Indonesia

Surabaya

9 November / November 9

1966

54 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master of Public Management Carnegie - Mellon University (1994)

(S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponegoro (1990)

Education

Master of Public Management Carnegie- Mellon University (1994)

Bachelor of Law (civil affairs) Diponogoro University (1990)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Komisaris diemban sejak 3 Januari 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Ari Wahyuni diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris.

Appointment History

The position of Member of the Board of Commissioners has been carried out since January 3, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Ari Wahyuni's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.

Riwayat Profesi

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 - sekarang), Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013 - September 2018), Dewan Pengawas PERURI (2013 - 2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009 - 2013), Dewan Komisaris PT PANN (2010 - 2013), Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK (2008 - 2009), Kepala Bagian Pengawasan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM (2004 - 2006), Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM (1990 - 2000).

Professional History

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present), Director of Investment Management System of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013 - September 2018), PERURI Supervisory Board (2013 - 2018), Secretary of the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009 - 2013), Board of Commissioners Member of PT PANN (2010 - 2013), Head of BPPK General Finance Education and Training Center (2008 - 2009), Division Head of Investment Policy Supervision, Investment Management and Research Bureau of BAPEPAM (2004 - 2006), Division Head of Legislation, Legislation, and Legal Assistance Bureau of BAPPEPAM (1990 - 2000).

Rangkap Jabatan

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 – sekarang)

Concurrent Position

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present)

Hubungan Afiliasi

Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Ari Wahyuni memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian Keuangan.

Affiliate Relationships

Ari Wahyuni does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Ari Wahyuni has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of Finance.



Desty Arlaini

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 2 Juni 2021 – 1 Juni 2026, Periode Pertama

Term of Office: June 2, 2021 – June 1, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Palembang

4 Desember / December 4

1976

44 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister jurusan Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2006)

(S1) Sarjana jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2000)

(D3) Ahli Madya jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997)

Education

Master of Management Science, University of Indonesia (2006)

Bachelor of Economics majoring in Accounting, YAI College (2000)

Associate of Accounting, State College of Accounting (1997)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Komisaris diemban sejak 2 Juni 2021 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Para Pemegang Saham PT Jamkrindo Pemilik Modal No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrindo ini merupakan periode pertama.

Appointment History

The position as Commissioner has been carried out since June 2, 2021, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-182/MBU/06/2021 and President Director Decree of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 dated June 2, 2021 concerning Dismissal and Appointment of PT Jaminan Kredit Indonesia Board of Commissioners Member and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). This position is her first period as Commissioner.

Riwayat Profesi

Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021 - sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021 - sekarang), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020 - 2021), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020), Koordinator Kementerian BUMN (2020 - 2021), Pengendali Kelompok Kementerian BUMN (2020), Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI (2020 - 2021), Komisaris PT Perkebunan Nusantara II (2018 - 2020), Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (2018 - 2019), Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia Kementerian BUMN (2017 - 2020), Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2013 - 2018), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011 - 2014), Anggota Komite PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009 - 2011).

Professional History

Act. Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021 - present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021 - present), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2020 - 2021), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2022), Coordinator of the Ministry of SOEs (2020 - 2021), Controlling Group of The Ministry of SOEs (2020), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara VI (2020 - 2021), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara II (2018 - 2020), Assistant Deputy of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2018 - 2019), Head of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2017 - 2020), Secretary of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2013 - 2018), Secretary of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011 - 2014), Committee Member of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009 - 2011).

Rangkap Jabatan

Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021 - sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021 - sekarang)

Concurrent Position

Act. Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021 - present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021 - present)

Hubungan Afiliasi

Desty Arlaini tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Desty Arlaini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama seri A melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN.

Affiliate Relationships

Desty Arlaini does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors Desty Arlaini has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Profile Of Sharia Supervisory Board



Prof. Dr. Hasanudin, AF, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 – sekarang, Periode Ketiga

Term of Office: July 1, 2016 – present, 3rd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia

Majalengka
18 Juli / July 18

1945

75 Tahun
Years Old

Pendidikan

- (S3) Doktor bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994)
- (S2) Magister bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989)
- (S1) Sarjana jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974)

Education

- Doctor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994)*
- Master of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989)*
- Bachelor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974)*

Riwayat Penunjukan

Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 19 Oktober 2006 untuk periode hingga 30 Juni 2013, diangkat lagi untuk periode 1 Juli 2013 - 30 Juni 2016, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Appointment History

The position of Chairman of the Sharia Supervisory Board has been carried out since October 19, 2006 for the period of June 5, 2013, re-appointed again for the period of July 1, 2013 to June 30, 2016, and re-appointed again in 2016 through the Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

Riwayat Profesi

Anggota BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) (2004 – 2007), Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta (2002 – 2006), Dosen Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI DKI Jakarta.

Professional History

Member of BPKN (National Consumer Protection Agency) (2004 - 2007), Dean of the Faculty of Sharia UIN Jakarta (2002 - 2006), Lecturer in Ulema Cadre Education (PKU) of Indonesia Council of Ulema (MUI) DKI Jakarta.

Rangkap Jabatan

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (1998 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asei Syariah, Anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syariah Kementerian Kesehatan RI, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000 - sekarang), Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat (2010 - sekarang).

Concurrent Position

Chairman of the Victoria Syariah Bank Supervisory Board (1998 - present), Chair of the Asuransi Asei Syariah's Supervisory Board, Member of the Health and Sharia Advisory Council of the Indonesian Ministry of Health, Member of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulema (2000 - present), Chairperson of the Central Commission of Indonesian Council of Ulema's Fatwa (2010 - present).

Hubungan Afiliasi

Hasanudin tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Komisaris, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Hasanudin does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Member of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 - sekarang, Periode Ketiga

Term of Office: July 1, 2016 - present, 3rd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Poso

12 Februari / February 12

1964

56 Tahun
Years Old

Pendidikan

Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung (1989)

Education

Bachelor of Agriculture from Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 19 Oktober 2006 untuk periode hingga 5 Juni 2013, diangkat lagi untuk periode 1 Juli 2013 - 30 Juni 2016, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Appointment History

The position of Member of the Sharia Supervisory Board has been carried out since October 19, 2006 for the period of June 5, 2013, re-appointed again for the period of July 1, 2013 to June 30, 2016, and re-appointed again in 2016 through the Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

Riwayat Profesi

Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008 - 2012), Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia (2008 - 2014), Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (2008 - 2015), Dewan Pengawas Syariah Bank Tabungan Negara-Unit Syariah (2010 - 2017), Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2015 - 2017), Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (2005 - 2016).

Professional History

Member of the Bank Indonesia Sharia Banking Committee (2008 - 2012), Indonesian Waqf Agency Deputy Public Relations (2008 - 2014), Expert Staff of ICDIF-LPPI Directors (2008 - 2015), Sharia Supervisory Board of the Bank Tabungan Negara - Sharia Unit (2010 - 2017), Member of the Financial Services Authority Sharia Financial Services Development Committee (2015 - 2017), PT Central Asia Raya Sharia Supervisory Board (2005 - 2016).

Rangkap Jabatan

Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Panin Daichi Life (2015 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Reasuransi Nasional Indonesia (2013 - sekarang).

Concurrent Position

Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - Now), Chairman of the Panin Daichi Life Sharia Supervisory Board (2015 - Now), Chairman of PT Reasuransi Nasional Indonesia Sharia Supervisory Board (2013 - Now).

Hubungan Afiliasi

Muhammad Syakir Sula tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Komisaris, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Muhammad Syakir Sula does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.

PROFIL DIREKSI

Board Of Directors Profile



1

Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama

President Director

2

Suwarsito

Direktur Bisnis Penjaminan

Director of Business of Guarantee

3

Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan

Director of Operations and Network

4

Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan

Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance

5

I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Director of Finance, Investment and Risk Management



Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama

President Director

Periode Jabatan: 26 Oktober 2020 – 25 Oktober 2025, Periode Pertama

Term of Office: October 26, 2020 – October 25, 2025, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Yogyakarta

28 November / November 28

1969

51 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S1) Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (1994)

(S2) Akuntansi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1996)

Education

Bachelor of Forestry from Gadjah Mada University (1994)

Master of Management Accounting from Gadjah Mada University (1996)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur Utama diemban sejak 26 Oktober 2020 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 dan 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia.

Appointment History

The position of President Director has been carried out since October 26, 2020 through the Decree of the Minister of SOEs as the shareownership of Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 and No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2021, concerning Dismissal and Appointment of President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.

Riwayat Profesi

Wakil Direktur BNI pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Maret 2016. Sebelumnya Menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2011 - 2014), Kepala Badan Usaha Milik Negara & Pemerintah Divisi Institusi (2014 - 2015), Kepala Divisi Commercial Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2015 - 2016), dan Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Professional History

Vice Director of BNI at the General Meeting of Shareholders (GMS) on March 10, 2016. Previously Served as Head of Corporate Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2011 - 2014), Head of State-Owned Enterprises & Government, Institutional Division (2014 - 2015), Head of Commercial Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2015 - 2016), and Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Rangkap Jabatan

Putrama Wahyu Setyawan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Putrama Wahyu Setyawan does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Putrama Wahyu Setyawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Putrama Wahyu Setyawan does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Suwarsito

Direktur Bisnis Penjaminan

Director of Business of Guarantee

Periode Jabatan: 22 Maret 2021 – 21 Maret 2026, Periode Pertama

Term of Office: March 22, 2021 – March 21, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Sragen

28 Februari / February 28

1972

48 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S1) Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ekonomi (1996)

(S2) Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar (2007)

Education

Bachelor of Economics from Diponegoro University, Semarang (1996)

Master of Management from Hasanuddin University, Makassar (2007)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 22 Maret 2021 melalui Keputusan Menteri BUMN No.SK-94/MBU/03/2021 dan No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia, dan dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Senin, 22 Maret 2021.

Appointment History

The position of Director has been carried out since March 22, 2021 through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-94/MBU/03/2021 and No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 concerning Dismissal and Appointment of Member of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia and was reading at the General Meeting of Shareholders on Monday, March 22, 2021.

Riwayat Profesi

Kepala Divisi Bisnis 2 PT Jamkrindo (2018)

Professional History

Head of Business Division 2 of PT Jamkrindo (2018)

Rangkap Jabatan

Suwarsito tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

Concurrent Position

Suwarsito does not have a concurrent position at other companies/ institutions.

Hubungan Afiliasi

Suwarsito tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Suwarsito does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan

Director of Operations and Network

Periode Jabatan: 21 November 2017 – 20 November 2022, Periode Pertama

Term of Office: November 21, 2017 – November 20, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Cibubur, Jawa Barat, Indonesia

Cibubur, West Jawa, Indonesia

Malang
31 Oktober / October 31

1971

49 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002)

(S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996)

Education

Master of Management, Hasanuddin University (2002)

Bachelor of Management, Universitas Airlangga (1996)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Appointment History

The position of Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director.

Riwayat Profesi

Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013 - 2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012 - 2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011 - 2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010 - 2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006 - 2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004 - 2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003 - 2004).

Professional History

Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2017), Head of Jakarta Special Branch Office, Perum Jamkrindo (2013 - 2014), Head of the Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claims and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2013), Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2012 - 2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011 - 2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010 - 2011), Section Head of Guarantee of the Head Office, Perum Jamkrindo (2006 - 2010), Section Head of Operations of Jakarta Branch Office, Perum Jamkrindo (2004 - 2006), Section Head of Operations of Bandung Branch Office, Perum Jamkrindo (2004), Section Head of Operations of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2003 - 2004).

Rangkap Jabatan

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Kadar Wisnuwarman does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Kadar Wisnuwarman does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan

Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance

Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022, Periode Pertama

Term of Office: September 7, 2017 – September 6, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bekasi, West Java, Indonesia

Semarang
5 September / September 5

1960

60 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Ekonomi Manajemen, Universitas Brawijaya (2003)

(S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1985)

Education

Master of Management Economics, Universitas Brawijaya (2003)

Bachelor of Civil Engineering, Universitas Brawijaya (1985)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Sebelum pengangkatannya di tahun 2017, Sulis Usdoko belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Appointment History

The position of Director has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-187/MBU/09/2017 dated September 7, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director. Prior to his appointment in 2017, Sulis Usdoko had never served in the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

Riwayat Profesi

Direktur Bidang Collection Management, Asset Management, Legal dan Dokumen Perkreditan, Bank BTN (2015 - 2017), Kepala Divisi Bidang Dana Pihak Ketiga Retail dan Jasa-jasa, Bank BTN (2011 - 2015), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Bank BTN (2008 - 2011), Kepala Kantor Cabang Kelas 1, dan Kepala Kantor Cabang Utama, Bank BTN (1997 - 2010), Staf hingga Kepala Bagian, Bank BTN (1986 - 1995).

Professional History

Director of Collection Management, Asset Management, Legal and Credit Documents, Bank BTN (2015 - 2017), Head of Third Party Funds Retail and Services Division, BTN Bank (2011 - 2015), Head of Information Technology Division, Bank BTN (2008 - 2011), Head of Branch Office Class 1, and Head of Main Branch Offices, BTN Bank (1997 - 2010), Staff to Head of Section, Bank BTN (1986 - 1995).

Rangkap Jabatan

Sulis Usdoko tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

Concurrent Position

Sulis Usdoko does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Sulis Usdoko tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Sulis Usdoko does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Director of Finance, Investment and Risk Management

Periode Jabatan: 15 Januari 2018 – 14 Januari 2023, Periode Kedua

Term of Office: January 15, 2018 – January 14, 2023, 2nd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Balikpapan

25 Februari / February 25

1959

61 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master Of Science Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston, Amerika Serikat (1995)

(S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988)

(D3) Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981)

Education

Master of Science, Majoring in Economics, Northeastern University Boston, USA (1995)

Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, University of Pancasila (1988)

Diploma of Accounting of STAN Jakarta (1981)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-22/MBU/01/2018, untuk periode kedua.

Appointment History

The position of Director has been carried out since January 15, 2013 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 concerning Dismissal, Change of Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors perum Jamkrindo, Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-44/MBU/2014 concerning Changes in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Indonesian Public Corporation (Perum) Credit Guarantee. This position is his first period as Director. Then reappointed based on the Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-22/MBU/01/2018, for the second period.

Riwayat Profesi

Plt. Direktur Utama Perum Jamkrindo (7 September 2017 - 21 November 2017), Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010 - sekarang). Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008 - 2011), Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007 - 2011), Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003 - 2009), Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2006 - 2010), Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006), Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN (2002 - 2006).

Professional History

Act. President Director of Perum Jamkrindo (September 7, 2017 - November 21, 2017), Assistant Deputy for Services Business II, the Ministry of SOEs (2010 - present) Member of the Board of Commissioners of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008 - 2011), Member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007 - 2011), Member of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003 - 2009), Assistant Deputy of Plantation Business Division II, the Ministry of SOEs (2006 - 2010), Head of Plantation Business Division IIA, the Ministry of SOEs (2006), Acting Head of Agriculture Production Facility Business Division of the Ministry of SOEs (2002 - 2006).

Rangkap Jabatan

I. Rusdonobanu tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

I. Rusdonobanu does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

I. Rusdonobanu tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

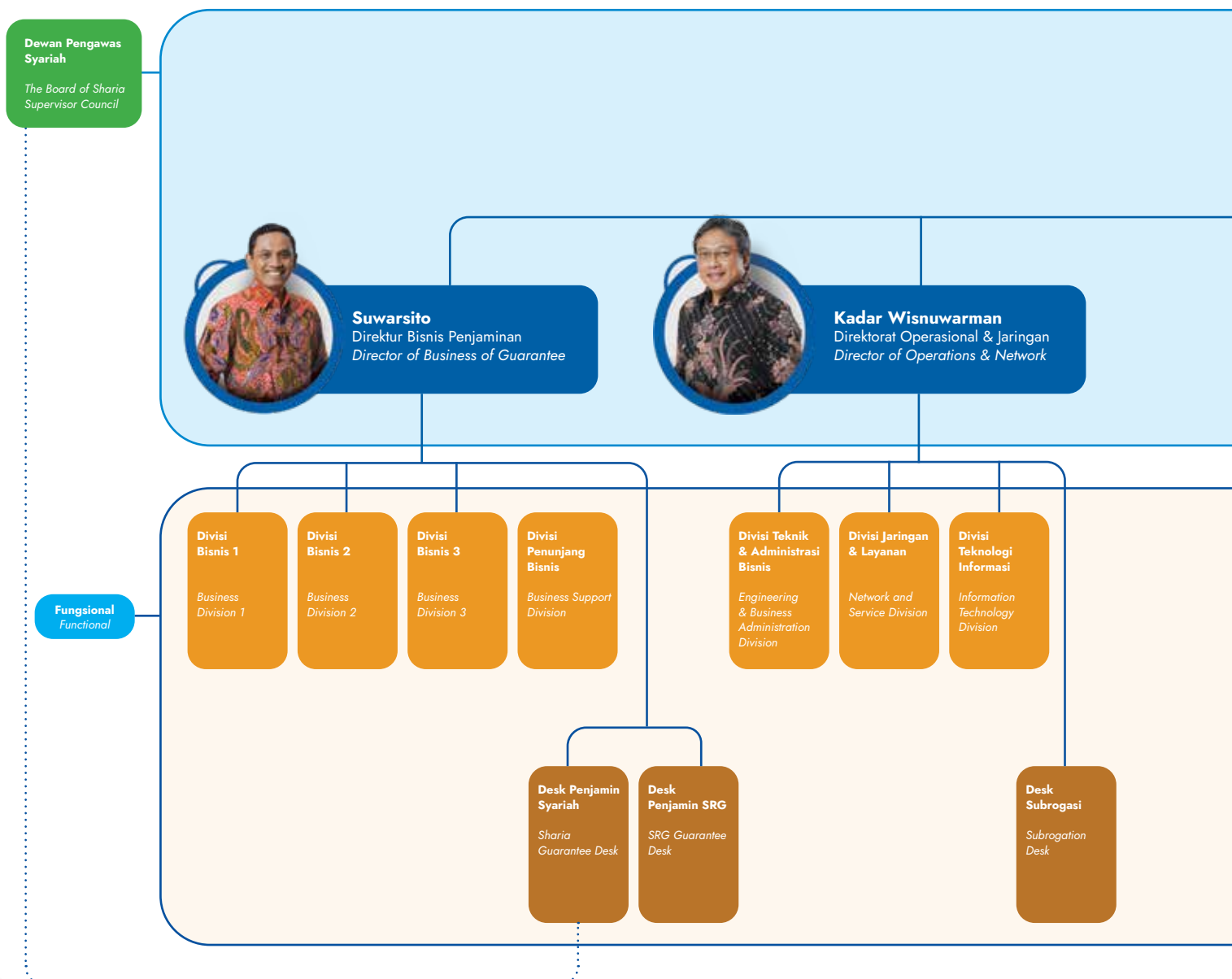
I. Rusdonobanu does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Setiap organisasi selalu menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan tersebut diperlukan pengelolaan organisasi yang efektif. Struktur Organisasi PT Jamkrindo telah ditetapkan dalam Ketetapan Direksi No.01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Every organization always faces the dynamics of environmental change, both internally and externally. To deal with the dynamics of environmental change, effective organization management is required. The Organizational Structure of PT Jamkrindo has been stipulated in the Board of Directors Decree No.01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018.





Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama
President Director



Sulis Usdoko
Direktur MSDM,
Umum, & Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs
and Compliance



I. Rusdonobanu
Direktorat Keuangan,
Investasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment
and Risk Management

**Sekretaris
Perusahaan**
Corporate
Secretary

**Satuan
Pengawasan
Intern**
Internal Control
Unit

**Divisi
Perencanaan
Strategis**
Strategic Planning
Division

**Divisi
Manajemen
Sumber Daya
Manusia(MSDM)**
HRM Division

Divisi Umum
General Affairs
Division

**Divisi
Hukum dan
Kepatuhan**
Legal and
Compliance
Division

**Divisi
Keuangan dan
Investasi**
Finance and
Investment
Division

**Divisi
Akuntansi**
Accounting
Division

**Divisi
Manajemen
Risiko (PUKM)**
Risk Management
(PUKM) Division

Divisi Klaim
Claim Division

Wilayah
Regional

Cabang Tipe A/B/C/D
Branch Type A/B/C/D

Unit Pelayanan
Service Unit

Kantor Cabang Khusus
Special Branch Office

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

Line of Business and Products and Services

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Penerima Jaminan

Berdasarkan Akta No.2, tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan dan Kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar Perusahaan

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

Business Activities Based on Articles of Association: Guarantee Recipients

Based on Deed No.2, dated April 9, 2020 concerning Amendments to the Articles of Association in article 3 mentioned the Company's purpose and objective is to carry out business activities guarantees for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantees for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, and other Guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of corporate governance.

Business Activities Carried Out and Its Conformity to the Articles of Association of the Company

In an effort to achieve these aims and objectives, the Company can conduct several business activities and business development policies to support financing. The following is the implementation of business activities and business development policies that have been carried out.

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/has not been performed	Keterangan Description
1	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Penjaminan Program PEN <i>Available on General Credit Guarantee products, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee, PEN Program Guarantee</i>
2	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya <i>Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK <i>Available on the KKLK Multipurpose Credit Guarantee product</i>
3	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan <i>Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs</i>	✓	Penyaluran program kemitraan <i>Distribution of partnership programs</i>
4	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✗	Belum / Tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/has not been performed	Keterangan Description
5	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO <i>Available on OTO Credit Guarantee products</i>
6	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of trade transactions carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang <i>Available on Goods Distribution Guarantee products</i>
7	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa <i>surety bond</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Surety Bond, <i>Surety Bond Co-Guarantee</i> , Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa <i>Available on Surety Bond products, Surety Bond Co-Guarantee, Guarantee of Construction Loans and Procurement of Goods/Services.</i>
8	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi <i>Co-Guarantee</i> <i>Available on Counter Guarantee Bank Credit Guarantee and Co-Guarantee Counter Guarantee Bank Credit Guarantee products</i>
9	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✗	Belum / Tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
10	Penjaminan <i>letter of credit</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;</i>	✗	Belum / Tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
11	Penjaminan kepabeanan (<i>Custom Bond</i>) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Customs guarantees (Custom bonds) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond</i>
12	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond products</i>
13	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (<i>start up business</i>) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on General Credit guarantee products, and Micro Credit Guarantees</i>
14	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on Micro Credit Guarantee products</i>
15	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan BUMN lain <i>Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises</i>	✓	Terdapat dalam produk <i>Surety Bond</i> , Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan <i>Invoice</i> <i>Available in Surety Bond products, KUR Collateral Guarantee, Invoice Financing Guarantee</i>

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/has not been performed	Keterangan Description
16	Penjaminan sistem resi gudang <i>Credit Guarantee Based on Warehouse Receipt</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Subsidi Resi Gudang <i>Available on the Warehouse Receipt Credit Guarantee Subsidy product</i>
17	Penjaminan Kredit Berbasis Resi Gudang telah dijalankan <i>Warehouse Receipt Based Credit Guarantee has been implemented</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Skema Subsidi Resi Gudang dan Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Available in the product Warehouse Receipt Subsidy Guarantee Scheme and Warehouse Receipt Credit Guarantee</i>
18	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan <i>Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Arrum <i>Available on Multipurpose Credit Guarantee products, Arrum Credit Guarantee</i>
19	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan <i>Provision of management consulting services related to Guarantee business activities</i>	✓	Dilakukan oleh korporasi <i>Operated by the corporation</i>
20	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Ranking, management consulting, management services, assistance/empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives and</i>	✓	Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM <i>Operated by the Risk Management Division and PUKM</i>
21	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. <i>Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority.</i>	✓	Penjaminan Bersama KUR <i>KUR Collateral Guarantee</i>

✓ = Sudah dijalankan | ✗ = Belum/tidak dijalankan
 ✓ = Has been performed | ✗ = Has not been performed

Kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf r dan huruf s. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

The company's main business activities mentioned above can be performed in the form of co-guarantee except the main business activities as referred to in paragraph 2 letter r and letter s. In addition to the main business activities as referred to in paragraph 2, the Company may carry out business activities in order to optimize the utilization of the Company's resources.

Produk Usaha Penjaminan

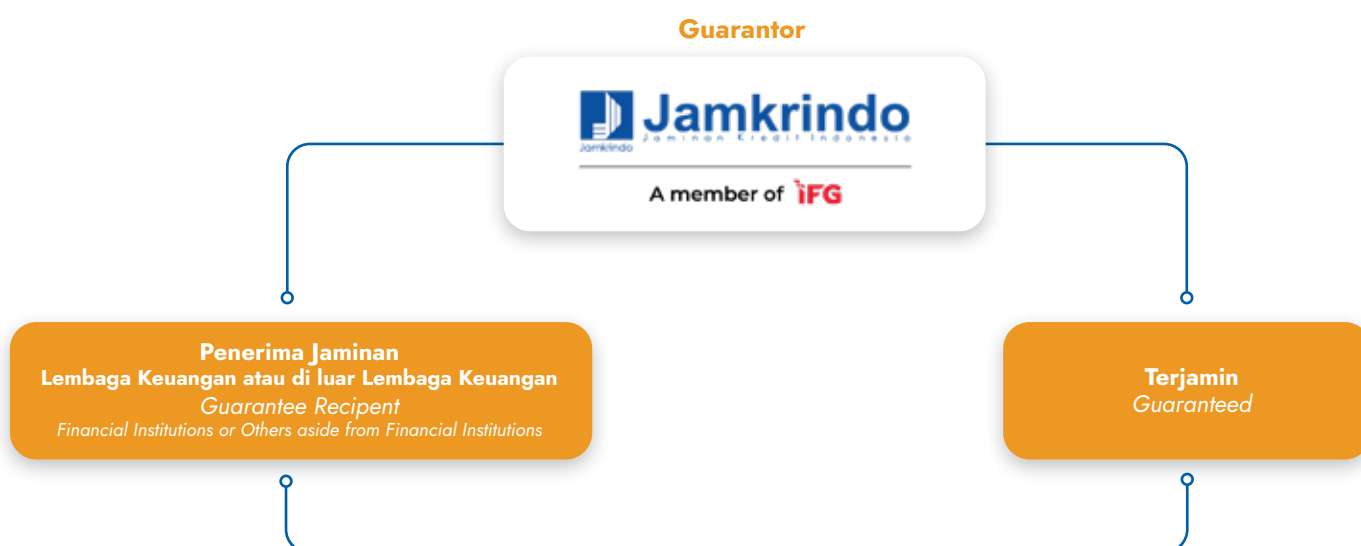
Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Guarantee Business Products

Credit Guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit giving business entity called the Guarantee Receiver, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of Guarantee but does not eliminate guaranteed financial obligations to the Recipient of Guarantee until the Recipient of Guarantee states the Guaranteed Credit is paid off.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Receiver when the loan application from Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Receiver but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.

Jenis-jenis Produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

The types of guarantee business products include the following:

No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
1	Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Guarantee of People's Business Credit</i>	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. <i>Venture Capital Credit/Financing and/or investment to MSMEs in a productive and feasible, but not yet bankable business field which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help develop productive businesses.</i>
2	Penjaminan KPR Sejahtera FLPP <i>KPR Sejahtera Guarantee-Housing Financing Liquidity Facility</i>	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit kepemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. <i>Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed installments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.</i>

No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
3	Penjamin Sistem Resi Gudang <i>Guarantee on the Warehouse Receipt System</i>	Kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang <i>Guarantee activities that protect the rights of Warehouse Receipts and/or Guarantee Rights Recipients in the event of failure, incompetence and/or bankruptcy of warehouse managers in carrying out their obligations and maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System</i>
4	Penjaminan Kredit Umum <i>Guarantee on General Credit</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) <i>Guarantee on credit/financing provided by the Recipient of the Other Financial Institution Guarantee (Non-Bank) to the Guaranteed for the purposes of additional Working Capital and/or Investment in the context of guaranteed business development and improvement, in which the guarantee process is carried out on a case-by-case basis</i>
5	Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah <i>plafond</i> kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>) <i>Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).</i>
6	Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa <i>Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bowheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. <i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bowheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.</i>
7	Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/ instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. <i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whose distribution is done directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.</i>
8	Penjaminan Distribusi Barang <i>Goods Distribution Guarantee</i>	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrikan (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan <i>case by case</i>). <i>Credit guarantees for credit/financing of distribution which is given provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case basis)</i>
9	Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi Bank <i>Guarantee on Guarantee/Counter Guarantee Bank</i>	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi. <i>A guarantee given by the Guarantor (Perum Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted</i>

No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
10	<i>Surety Bond</i>	Suatu perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut <i>A 3-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Bondee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations</i>
11	<i>Payment Bond</i>	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan. <i>Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the Guaranteed's payment to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver</i>
12	<i>Customs Bond</i>	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & <i>import</i> dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada <i>Obligee</i> (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya. <i>Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations.</i>
13	Penjaminan Keagenan Kargo <i>Cargo Agency Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>. <i>A guarantee that is given to the Recipient of Guarantee/Obligee (The Transportation Service Provider) for guaranteed obligations/principal (Cargo Agent) in making payment of freight costs to the Recipient of Guarantee/Obligee.</i>
14	Penjaminan <i>Invoice Financing</i> <i>Guarantee of Invoice Financing</i>	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh penerima jaminan. <i>Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients.</i>
15	Penjaminan <i>Supply Chain Financing</i> <i>Guarantee of Supply Chain Financing</i>	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK <i>pre Financing</i>, KMK <i>Post Financing</i> dan KMK Distributor. <i>Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain CORE COMPANIES in the form of KMK Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor</i>
16	Penjaminan Kemaritiman/Jaring <i>Maritime/Fisheries Guarantee</i>	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan <i>Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries</i>
17	Penjaminan Pembiayaan Otomotif <i>Automotive Financing Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna <i>Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose</i>
18	Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang <i>Credit Guarantee on Subsidy Scheme of Warehouse Receipt</i>	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-Undang No.9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya <i>The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks / Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No.9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments</i>

No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
19	Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Warehouse Receipt Credit Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan. Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/ CMA</i>) <i>Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No.9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management (CMA)</i>
20	Penjaminan Fintech <i>Fintech Guarantee</i>	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender melalui penyelenggara (<i>peer to peer landing</i>) kepada borrower <i>Guarantee on information technology-based money lending services that are channeled by lenders through the organizer (peer to peer landing) to the borrower</i>
21	Penjaminan KPR <i>Guarantee of Home Ownership Loans</i>	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (Non Bank) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko <i>Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/ apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse</i>
22	Penjaminan Capital Management Guarantee (CMG) <i>Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)</i>	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. <i>Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.</i>
23	Penjaminan Program PEN <i>PEN Program Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional <i>Guarantees provided in the context of implementing Government Regulations concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or facing threats that endanger the National Economy and or Financial System Stability as well as National Economic Rescue</i>

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Demografi Karyawan

Jamkrindo memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam memberikan produk dan layanan jasa penjaminan kredit. Per akhir tahun 2020, Jamkrindo memiliki 1.743 karyawan mengalami kenaikan sebesar 0,40% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2019 yaitu 1.736 orang. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan karyawan pegawai tidak tetap di tahun 2020.

Employee Demographics

Jamkrindo has employees with a superior work culture which is the most valuable asset in providing credit guarantee products and services. By the end of 2020, Jamkrindo has 1,743 employees increased by 0.40% compared to the number of employees as of December 31, 2019 of 1,736 people. The increase was mainly due to the addition of non-permanent employees in 2020.

Profil demografi karyawan Jamkrindo dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

The demographic profile of Jamkrindo employees can be seen in the following tables and charts.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

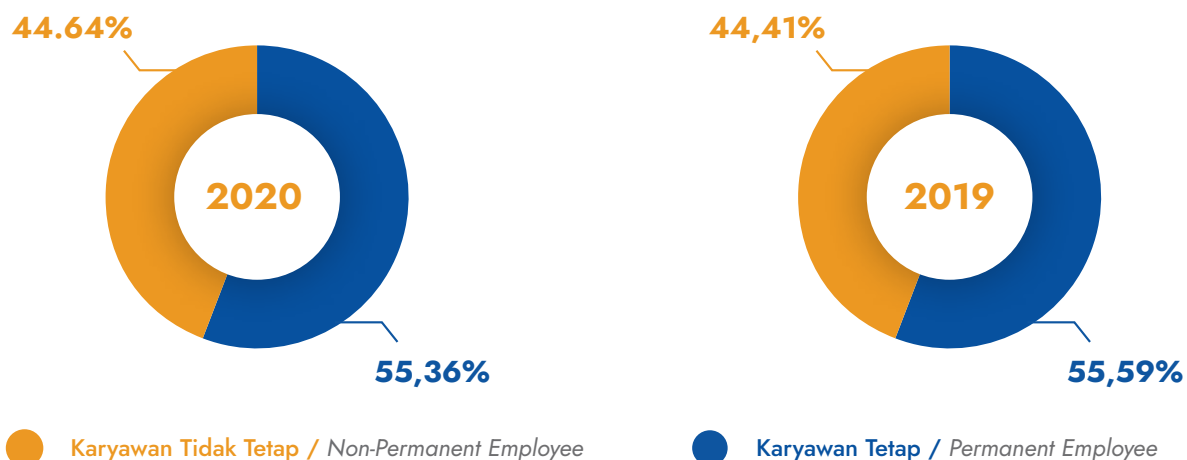
Employee Demographics by Employment Status (People)

Status Kepegawaian Employment Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total (1)	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total (2)	Persentase Percentage	Jumlah Total (3=1-2)	Persentase Percentage (3/2)
Tetap Permanent										
Permanen (PKWTT) Permanent (PKWTT)	586	372	958	54,96%	588	369	957	55,13%	1	0,10%
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah Assigned to a Subsidiary, PT Jamkrindo Syariah	4	1	5	0,29%	5	1	6	0,35%	(1)	-16,67%
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	1	1	2	0,11%	1	1	2	0,12%	-	-
Sub Jumlah Tetap Sub Total Permanent	591	374	965	55,36%	594	371	965	55,59%	-	-
Tidak Tetap Non Permanent										
Kontrak Contract	501	195	696	39,93%	432	168	600	34,56%	96	16%
Magang Bersertifikasi Certified Apprentice	16	32	48	2,75%	37	76	113	6,51%	(65)	-57,52%
Prohire Prohire	8	3	11	0,63%	7	2	9	0,52%	2	22,22%
KKWT KKWT	6	17	23	1,32%	11	38	49	2,82%	(26)	53,06%
Sub Jumlah Tidak Tetap Sub Total Non Permanent	531	247	778	44,64%	509	262	771	44,41%	7	0,91%
Jumlah Total	1.122	621	1.743	100,00%	1.103	633	1.736	100,00%	7	0,40%

L = Laki-Laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Composition of Number of Employees Based on Employment Status

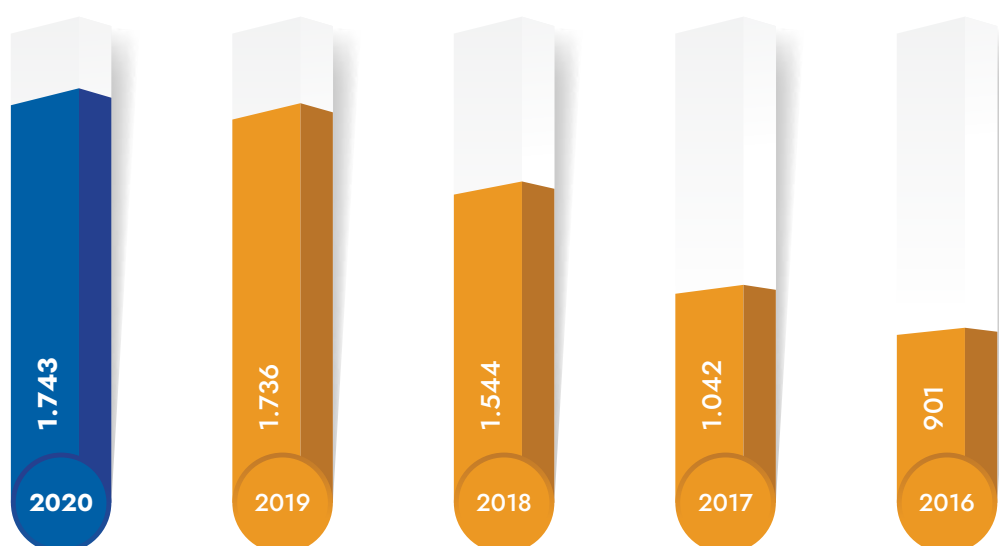


Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap khususnya karyawan dengan status Permanen (PKWTT). Penambahan jumlah karyawan Jamkrindo diperoleh dari kenaikan jumlah karyawan tidak tetap, terutama karyawan kontrak.

Based on employment status, the composition of Jamkrindo employees is dominated by permanent employees, especially employees with Permanent status (PKWTT). The increase in the number of Jamkrindo employees is obtained from the increase in the number of non-permanent employees, especially contract employees.

Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2016-2020

Movement of Number of Employees in the Last 5 (Five) Years 2016-2020

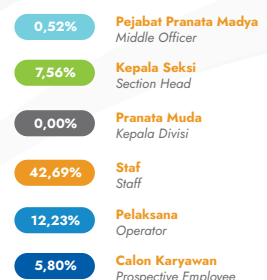
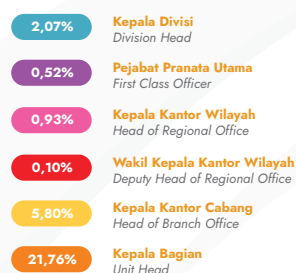
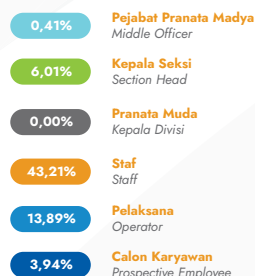
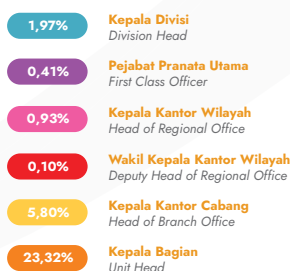
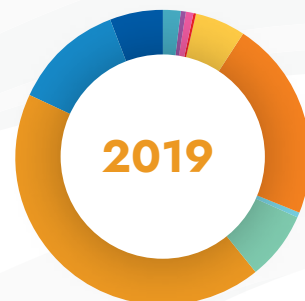
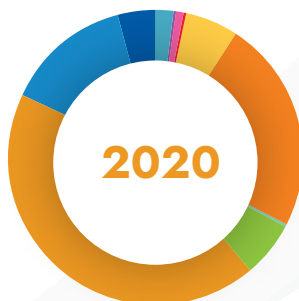


Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi (orang)

Demographics of Permanent Employees by Organizational Level (people)

Level Organisasi Organization Level	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Kepala Divisi Division Head	12	7	19	1,97%	13	7	20	2,07%	(1)	5,00%
Pejabat Pranata Utama First Class Officer	3	1	4	0,41%	4	1	5	0,52%	(1)	-20,00%
Kepala Kantor Wilayah Head of Regional Office	9	-	9	0,93%	9	-	9	0,93%	-	-
Wakil Kepala Kantor Wilayah Deputy Head of Regional Office	1	-	1	0,10%	1	-	1	0,10%	-	-
Kepala Kantor Cabang Head of Branch Office	49	7	56	5,80%	49	7	56	5,80%	-	-
Kepala Bagian Unit Head	165	60	225	23,32%	153	57	210	21,76%	15	7,14%
Pejabat Pranata Madya Middle Officer	3	1	4	0,41%	3	2	5	0,52%	(1)	-20,00%
Kepala Seksi Section Head	25	33	58	6,01%	29	44	73	7,56%	(15)	-20,55%
Pranata Muda Junior Officer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Staff	231	186	417	43,21%	238	174	412	42,69%	5	1,21%
Pelaksana Operator	78	56	134	13,89%	74	44	118	12,23%	16	13,56%
Calon Karyawan Prospective Employee	15	23	38	3,94%	21	35	56	5,80%	(18)	-32,14%
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan level organisasi, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh level Staf. Penambahan terbesar didapatkan dari Kepala Bagian serta Pelaksana, sedangkan terdapat pengurangan Kepala Seksi dan Calon Karyawan Tetap

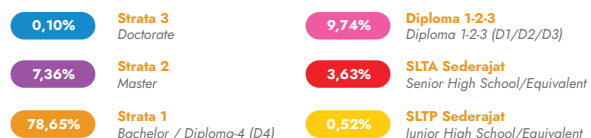
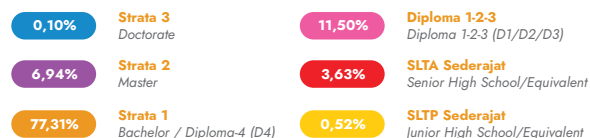
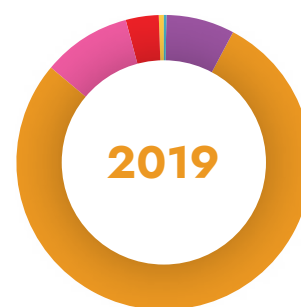
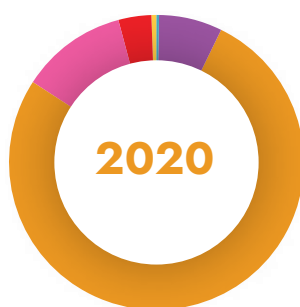
Based on the organizational level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by staff level. The largest additions were obtained from Unit Head and Operator, while there was a reduction in Section Head and prospective permanent employees.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

Demographic of Permanent Employees by Education Level (people)

Jenjang Pendidikan Education Level	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Strata-3 (S3) Doctorate	1	-	1	0,10%	1	-	1	0,10%	-	-
Strata-2 (S2) Master	46	21	67	6,94%	49	22	71	7,36%	(4)	-5,63%
Strata-1 (S1) / Diploma-4 (D4) Bachelor / Diploma-4 (D4)	462	284	746	77,31%	464	295	759	78,65%	(13)	-1,71%
Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3) Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3)	52	59	111	11,50%	50	44	94	9,74%	17	18,09%
SLTA Sederajat Senior High School/Equivalent	25	10	35	3,63%	25	10	35	3,63%	-	-
SLTP Sederajat Junior High School/Equivalent	5	-	5	0,52%	5	-	5	0,52%	-	-
SD Elementary School	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma 4 (D4). Penambahan didapatkan dari Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3), sedangkan terdapat pengurangan pada karyawan dengan latar belakang pendidikan Strata-2 (S2) dan Strata-1 (S1) / Diploma-4 (D4).

Based on the education level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by employees with a bachelor's degree /Diploma 4 (D4) background. The addition is obtained from Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3), while there is a reduction in employees with an educational background of Master (S2) and Bachelor (S1) / Diploma-4 (D4).

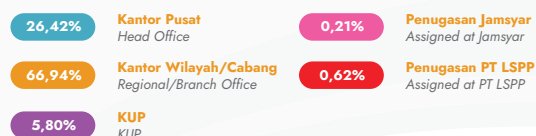
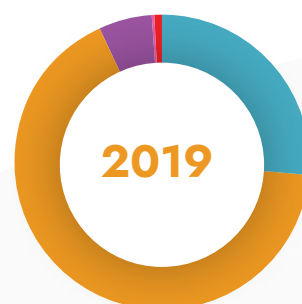
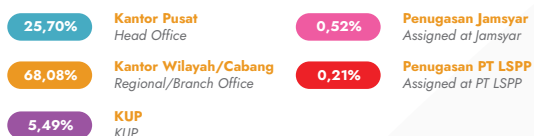
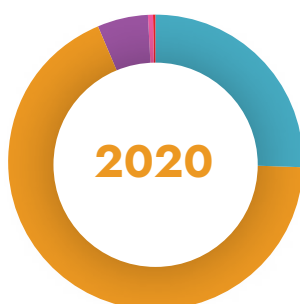
Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja (orang)

Demographic of Permanent Employees by Placement/Operating Area (people)

Penempatan/Wilayah Kerja Placement/Operating Area	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Kantor Pusat Head Office	142	106	248	25,70%	145	110	255	26,42%	(7)	-2,75%
Kantor Wilayah/Cabang Regional/Branch Office	411	246	657	68,08%	408	238	646	66,94%	11	1,70%
KUP KUP	33	20	53	5,49%	35	21	56	5,80%	(3)	-5,36%
Penugasan Jamsyar Assigned at Jamsyar	4	1	5	0,52%	5	1	2	0,21%	(1)	-16,67%
Penugasan PT LSPP Assigned at PT LSPP	1	1	2	0,21%	1	1	6	0,62%	-	-
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan

M = Male / F = Female



Berdasarkan penempatan/wilayah kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang bertugas di Kantor Wilayah/Cabang.

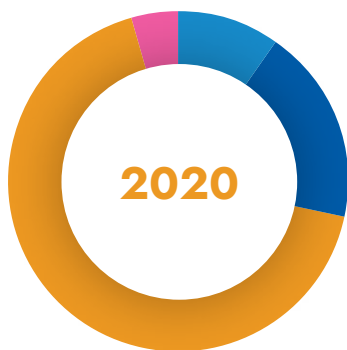
Based on the placement/operating area, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who serve in the Regional/Branch Office.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Demographic of Permanent Employees by Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
≥ 56 tahun ≥ 56 years old	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46-55 tahun 46-55 years old	62	25	87	10,05%	56	22	78	8,08%	9	11,54%
36-45 tahun 36-45 years old	115	66	181	18,75%	96	60	156	16,17%	25	16,03%
26-35 tahun 26-35 years old	402	252	654	67,77%	429	265	694	71,92%	(40)	-5,76%
≤ 25 tahun ≤ 25 years old	12	31	43	4,45%	13	24	37	3,83%	6	16,22%
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

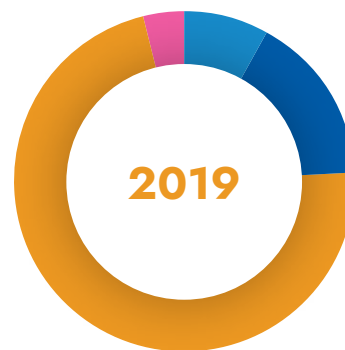


10,05% 46-55 Tahun
46-55 years old

67,77% 26-35 Tahun
26-35 years old

18,75% 36-45 Tahun
36-45 years old

4,45% ≤ 25 Tahun
≤ 25 years old



8,08% 46-55 Tahun
46-55 years old

71,92% 26-35 Tahun
26-35 years old

16,17% 36-45 Tahun
36-45 years old

3,83% ≤ 25 Tahun
≤ 25 years old

Berdasarkan kelompok usia, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang berada dalam kelompok usia 26-35%.

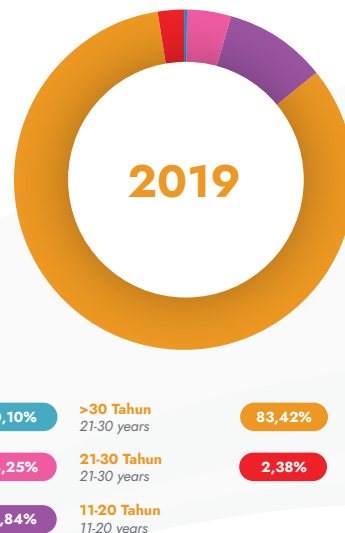
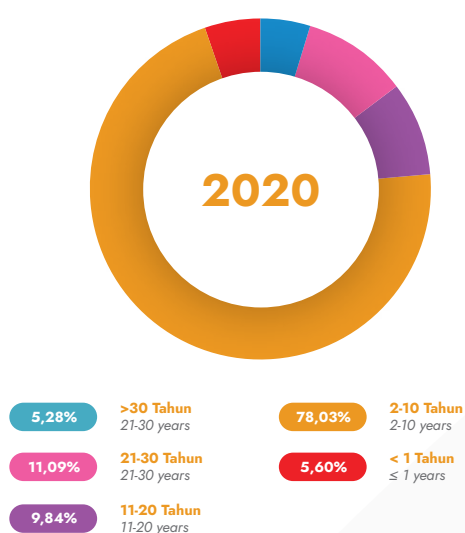
Based on the age range, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who are in the 26-35% age group.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja (orang)

Demographic of Permanent Employees by Serving Period (people)

Masa Kerja Serving Period	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
≥ 30 tahun ≥ 30 years	-	-	-	-	1	-	1	0,10%	(1)	-100,00%
21-30 tahun 21-30 years	34	17	51	5,28%	28	13	41	4,25%	10	24,39%
11-20 tahun 11-20 years	63	44	107	11,09%	53	42	95	9,84%	12	12,63%
2-10 tahun 2-10 years	472	281	753	78,03%	502	303	805	83,42%	(52)	-6,46%
≤ 1 tahun ≤ 1 years	22	32	54	5,60%	10	13	23	2,38%	31	134,78%
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan masa kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun. Terdapat penambahan karyawan tetap Jamkrindo dengan masa kerja 11-20 tahun dan 21-30 tahun, sedangkan karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun mengalami penurunan.

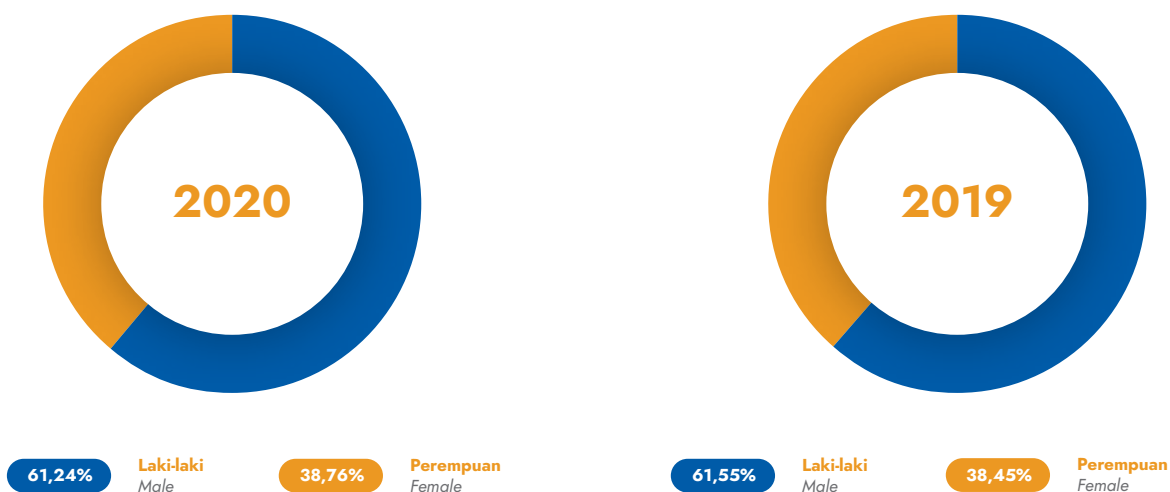
Based on the serving period, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees with a serving period of 2-10 years. There are additional permanent employees of Jamkrindo with a serving period of 11-20 years and 21-30 years, while permanent employees with a serving period of 2-10 years was decreased.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Permanent Employees by Gender (people)

Gender Gender	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Laki-laki Male	591	61,24%	594	61,55%	(3)	-0,5%
Perempuan female	374	38,76%	371	38,45%	3	0,8%
Jumlah Total	965	100,00%	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Sebagian besar karyawan tetap Jamkrindo adalah karyawan laki-laki.

Most of Jamkrindo's permanent employees are male employees.

KINERJA JAMKRINDO

Jamkrindo's Performance

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Uraian Description	2020	2019*	2018
Total Aset Total Assets	19.122.829	16.770.270	15.146.126
Total Liabilitas Total Liabilities	10.266.950	8.092.195	6.729.540
Total Ekuitas Total Equity	8.855.879	8.678.075	8.416.586

*disajikan kembali | restated

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Statements of Profit or Loss and Comprehensive Income

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Uraian Description	2020	2019*	2018
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	2.633.393	2.152.072	1.248.710
Beban Klaim Claim Expenses	1.830.400	1.737.959	723.274
Penjaminan Bersih Net Guarantee	802.993	414.113	525.437
Komisi - Bersih Commission - Net	(27.195)	(48.138)	-
Pendapatan Investasi Bersih Investment Income - Net	799.211	782.810	684.108
Beban Usaha Operating Expenses	(903.670)	(991.759)	(693.236)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih Other Income (Expenses)-Net	51.130	24.612	(8.025)
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	722.469	181.638	508.284
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(118.307)	(139.147)	(117.274)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	604.162	42.491	391.010
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan (Expense)/Income Tax Benefit	(148.029)	156.420	397.543
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	456.133	198.911	397.544
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	89.480	102.334	(135.957)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income For The Current Year	545.613	301.245	261.586

*disajikan kembali | restated

Uraian Description	2020	2019*	2018
Laba Komprehensif Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income Attributed To:			
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner	545.612	301.247	-
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	1	(2)	-

*disajikan kembali | restated

Laporan Arus Kas

Statements of Cash Flows

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Uraian Description	2020	2019*	2018
Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Operasi Cash Flow From Operating Activities	528.040	9.666	491.688
Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Investasi Cash Flow From Investment Activities	(115.549)	(116.668)	360.876
Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flow From Financing Activities	(400.000)	(39.754)	(80.185)
Kenaikan/Penurunan (Bersih) Kas dan Setara Kas Increase /Decreased (Net) In Cash and Cash Equivalents	12.491	(146.756)	772.379
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Equivalents at The Beginning of Year	88.614	235.370	5.417.929
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Equivalents at The End of Year	101.105	88.614	6.190.307

*disajikan kembali | restated

Rasio Keuangan

Financial Ratios

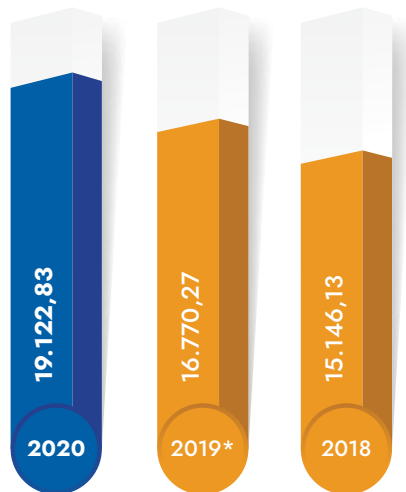
Uraian Description	2020	2019*	2018
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
• Current Ratio	219,19%	205,18%	450,89%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio			
• Debt to Equity Ratio	186,26%	207,47%	43,78%
Rasio Rentabilitas Rentability Ratio			
• Net profit margin	16,14%	8,60%	24%
• Profit Margin on Sales	21,05%	6,19%	25,10%
• Return on Assets	4,03%	1,14%	3,29%
• Return on Equity	5,20%	2,33%	3,50%

*disajikan kembali | restated

Aset

Assets

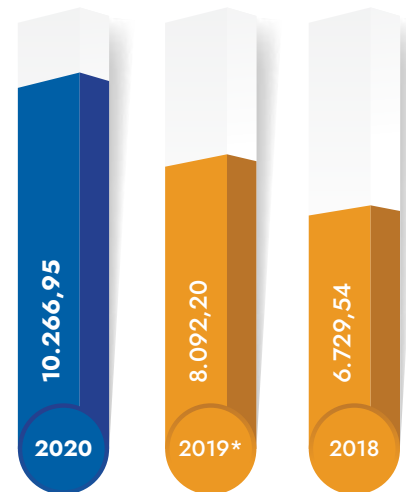
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Liabilitas

Liabilities

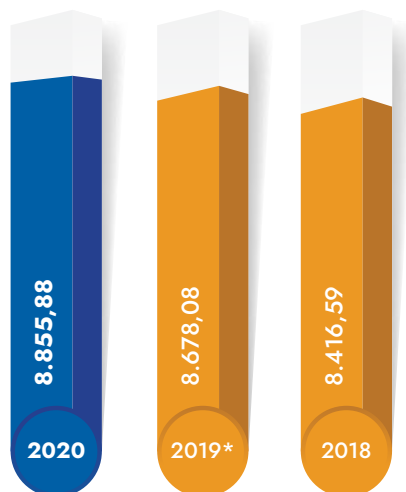
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Ekuitas

Equity

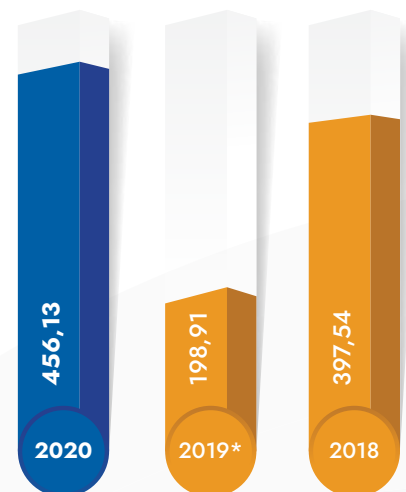
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Laba Tahun Berjalan

Current Year Profit

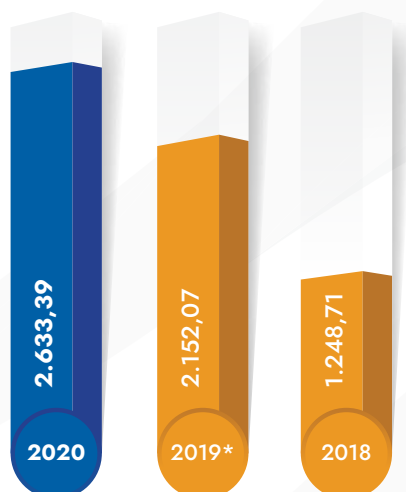
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Pendapatan Penjaminan

Guarantee Income

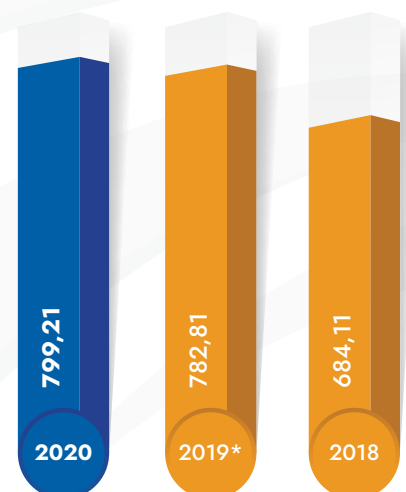
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Pendapatan Investasi Bersih

Investment Income - Net

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Review

► STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA Business Development Strategy

Pada tahun 2020, Perusahaan lebih fokus pengembangan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses melalui teknologi informasi/otomasi dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif serta memanfaatkan pengetahuan sebagai faktor pendorong yang mendukung keputusan bisnis, sesuai dengan tema RKAP Perusahaan tahun 2020 yaitu, *Strengthen Capability Towards Technology-based & Knowledge-driven Organization*. Lebih lanjut, pencapaian perusahaan berdasarkan arahan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Portofolio Produk Eksisting, Baru, dan Kolaborasi BUMN Berorientasi pada Profitabilitas
PT Jamkrindo ikut terlibat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Penjaminan Kredit Modal Kerja PEN untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini dijalankan pemerintah sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, Perusahaan menjalin kerjasama kolaborasi dengan BUMN, Himbara, Himpara dan Non bank lainnya, telah terdapat penandatanganan MoU Kolaborasi BUMN antara Jamkrindo dan BUMN lainnya dalam rangka kolaborasi BUMN. Kemudian terdapat realisasi Perjanjian Kerjasama dengan PT Amarta Mikro Fintek tentang Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja (kelompok) yang merupakan Penjaminan Kredit Mikro melalui lembaga *fintech* yaitu PT Amarta.

Rencana perusahaan untuk menutup Unit Usaha Syariah (Desk Penjaminan Syariah) sudah mendekati tahapan akhir dimana tahapan untuk pembuatan kajian sudah dilakukan pada tahun 2019, konfirmasi kepada Penerima Jaminan sudah dilakukan. Pada saat ini sedang dilakukan *cleansing data*, proses *phase out* direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020.

2. Memperkuat Portofolio Usaha dan Investasi
Perusahaan akan melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan "PT Jamkrindo Syariah" terkait dengan penutupan Unit Usaha Syariah. Divisi Keuangan & Investasi telah melakukan koordinasi dengan Divisi Bisnis untuk dilakukan analisa optimalisasi resiprosal deposito baik secara *on desk* atau *on the spot*, sehingga selain mendapatkan bunga deposito, perusahaan juga mendapatkan imbal jasa penjaminan. Perusahaan juga melakukan rekomposisi portofolio dengan fokus pada instrumen investasi pendapatan tetap.

In 2020, the Company is more focused on development by improving the efficiency and effectiveness of processes through information technology/automation and the creation of a conducive work environment and utilizing knowledge as a driving factor that supports business decisions, in accordance with the theme of the Company's RKAP in 2020 namely, Strengthen Capability Towards Technology-based & Knowledge-driven Organization. Furthermore, the Company's achievements based on the strategy directions are as follows:

1. *Strengthen existing and new portfolios, and SOEs Synergies with profitability-oriented product*
PT Jamkrindo is involved in the National Economic Recovery (PEN) program through PEN Working Capital Loan Guarantee for micro, small, and medium enterprises. This program is run by the government as a stimulus to encourage the economy affected by the COVID-19 pandemic. In addition, the Company establishes collaboration with BUMN, Himbara, Himpara and other non-banks, there have been signatories of the MoU of SOE Collaboration between Jamkrindo and other SOEs in order to SOEs Synergy. Then there is the realization of cooperation agreement with PT Amarta Mikro Fintek on Working Capital Financing Guarantee (group) which is a Micro Credit Guarantee through fintech institutions namely PT Amarta.

The Company's plan to close the Sharia Business Unit (Sharia Assurance Desk) is nearing the final stage where the stage for making study has been conducted in 2019, confirmation to the Guarantee Recipient has been done. Currently cleansing data is being conducted, and the phase out process is planned to be implemented by the end of 2020.

2. *Strengthening Business Portfolio and Investment*
The Company will invest capital in its subsidiary "PT Jamkrindo Syariah" in connection with the closure of sharia business units. The Finance & Investment Division has been coordinating with Business Division to analyze the optimization of reciprocal deposits either on desk or on the spot, so that in addition to obtaining deposit interest, the Company also gets guarantee services return. The Company also re-compositions the portfolio with focus on fixed income investment instruments.

3. **Memperkuat dan Mengembangkan Jejaring Kemitraan untuk Penetrasi dan Perluasan Pasar**
Meningkatkan jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dikerjasamakan dengan mitra dalam penyaluran KUR maupun KPRS. Adapun PKS KUR yang telah ditandatangani selama triwulan I tahun 2020 yaitu PKS dengan Bukopin, PT BRI Agroniaga, PT BPD Jatim.
Rencana kerjasama dengan PT Pegadaian untuk Penjaminan produk Pinjaman Modal Produktif (*Invoice Financing*). Kemudian adanya rencana pembaharuan PKS Penjaminan Pinjaman Perorangan dan Pensiunan dengan KSP Nusantara (KOPNUS). Sedangkan untuk mengakomodir permintaan pasar atas produk penjaminan yang belum tersedia, saat ini Jamkrindo sedang mengembangkan *market place guarantee*. Penguasaan pasar *suretyship* dilakukan dengan memperkuat jaringan channel penjualan penjaminan *suretyship* yang tersebar dengan skema SaKa-SaKi (Satu Kabupaten, Satu Kaki), dengan langkah kegiatan melakukan analisa permohonan channel penjualan baru dan perpanjangan.
4. **Meningkatkan Preferensi Pelanggan Terhadap Produk Jamkrindo**
Perusahaan terus berusaha meningkatkan preferensi mitra melalui pelaksanaan survey kepuasan pelanggan. Selain hal tersebut, untuk dapat meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai Perusahaan, maka Perusahaan selalu terbuka untuk melakukan komunikasi pemasaran melalui konten media sosial yang dimiliki PT Jamkrindo, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube serta situs web PT Jamkrindo. Untuk mengenalkan perusahaan kepada mitra maupun masyarakat, perusahaan mengikuti beberapa award bergengsi seperti anugerah BUMN, Governance, Risk & Compliance Award dan CEO & Corporate Award, selain itu juga perusahaan mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai perusahaan yang melakukan perubahan badan hukum tercepat serta penghargaan dari Iconomics untuk Direktur Utama sebagai The Best CEO 2020.
5. **Meningkatkan Efektivitas dan Standardisasi Proses Kerja**
Secara terus menerus prosedur/SOP dan kebijakan Perusahaan dilakukan penyempurnaan sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Pada tahun 2019, perusahaan telah menyelesaikan 18 kebijakan dan prosedur/SOP baru maupun perubahan, antara lain tentang bisnis penjaminan, kebijakan investasi, *business continuity management* (BCM), penerapan manajemen risiko, manual akuntansi, dan master plan teknologi informasi. Selain itu Perusahaan juga terus memperkuat pengelolaan layanan klaim dengan *time accuracy in claim process* 12 hari kerja serta telah mereview kembali pembaharuan PKS dan penyempurnaan ketentuan internal terkait klaim.
3. ***Strengthening and Developing Partnership Networks for Market Penetration and Expansion***
Increasing the number of Cooperation Agreements (MCC) that are cooperated with partners in the distribution of KUR and KPRS. The KUR Cooperation Agreements that has been signed during the first quarter of 2020 is the MCC with Bukopin, PT BRI Agroniaga, PT BPD Jatim.
Cooperation plan with PT Pegadaian for Guarantee of Productive Capital Loan (Invoice Financing) products. Then there is the plan to renew the MCC Guarantee of Individual and Pensioner Loans with KSP Nusantara (KOPNUS). As for accommodating market demand for guarantee products that are not yet available, Jamkrindo is currently developing a market place guarantee. The mastery of the suretyship market is carried out by strengthening the network of suretyship guarantee sales channels spread with the SaKa-SaKi scheme (One District, One Foot), by conducting an analysis activity on new sales channel applications and extensions.
4. ***Increase Customer Preference for Jamkrindo Products***
The Company continuously strives to improve partner preferences through the implementation of customer satisfaction surveys. In addition, in order to increase public awareness about the Company, the Company is always open to conduct marketing communications through social media content owned by PT Jamkrindo, such as Instagram, Facebook, Twitter, and Youtube as well as PT Jamkrindo's web.
To introduce the Company to partners and public, the Company participated in several prestigious awards such as SOEs award, Governance, Risk & Compliance Award and CEO & Corporate Award, in addition the Company also received an award from MURI as the Company with the fastest legal entity change as well as an award from Iconomics for President Director as The Best CEO 2020.
5. ***Improving The Effectiveness and Standardization of Work Processes***
The Company's continuously improves procedures/SOPs and policies so that it can be more effective and efficient in supporting the Company's business processes. In 2019, the Company has completed 18 new policies and procedures/ SOPs as well as changes, among others, about the guarantee business, investment policy, Business Continuity Management (BCM), the application of risk management, accounting manuals, and information technology master plans. In addition, the Company also continues to strengthen the management of claims services with time accuracy in claim process 12 working days and has reviewed the renewal of MCC and improvement of internal provisions related to claims.

6. Meningkatkan Efisiensi Proses Internal dan Eksternal dengan Berbasis IT & Otomasi

Perusahaan juga telah mengembangkan dashboard kinerja perusahaan dan unit kerja untuk fungsi bisnis, antara lain Divisi Penunjang Bisnis telah membuat Aplikasi Sistem Informasi Performa Penjaminan (SIPP) dan Divisi Klaim telah membuat aplikasi *Claim Monitoring Service* (CMS). Dalam penagihan piutang IJP, piutang reasuransi, pengajuan reasuransi, dan piutang *co-guarantee*, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Teknik Administrasi Bisnis telah mengembangkan aplikasi monitoring piutang IJP KUR Gen 2. Selain itu, sedang dilakukan pengembangan terhadap aplikasi pengelolaan mitigasi risiko bisnis penjaminan.

7. Meningkatkan Kinerja Bisnis Melalui Pemanfaatan *Machine Learning*

Pada sasaran strategis meningkatkan kinerja bisnis melalui pemanfaatan *machine learning* perusahaan memiliki program untuk mengembangkan *machine learning* dengan pendekatan DWHBI untuk prediksi IJP, Klaim, Subrogasi. Pada tahun 2020 juga perusahaan mengenalkan *machine learning* kepada seluruh karyawan melalui program Training of the Trainers (TOT).

8. Mengoptimalkan Peningkatan dan Pembinaan UMKMK untuk peningkatan *Market Share*

Dalam upaya meningkatkan peran pendampingan dan konsultasi manajemen terhadap UMKMK, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melakukan pendampingan bagi UMKMK Terjamin dan Calon Terjamin untuk menjadi UMKMK Binaan pada masing-masing Kantor Wilayah/Kantor Cabang. Sehubungan dengan terjadinya pandemi virus COVID-19, maka untuk melaksanakan kegiatan seminar UMKMK melalui media online (webinar). Webinar pertama telah dilakukan di Kanwil V Semarang dengan tema menyusun laporan keuangan serta sosialisasi UMKMK layak pada tanggal 18 Juni 2020.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah melakukan pelatihan dan sosialisasi UMKMK berkerjasama dengan BNP2TKI dan Kemenkop juga pelatihan di Banyuwangi dan Mataram untuk meningkatkan jumlah UMKMK binaan dan UMKMK berperingkat.

9. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas SDM

Guna memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga meningkatkan produktivitas Perusahaan, maka Divisi MSDM telah melakukan penyusunan *HR Strategic Plan*. Divisi MSDM juga telah melakukan asesmen pejabat dan pengembangan karyawan secara terus menerus serta melakukan rekrutmen karyawan melalui Program Perekrutan Bersama BUMN dan juga melakukan rekrutmen tenaga kontrak *entry level hire* dari Program Magang Mahasiswa

6. *Improving Internal and External Process Efficiency with IT-Based & Automation*

The Company has also developed the Company's performance dashboard and work units for business functions, among others Business Support Division has created Guarantee Performance Information System Application (SIPP) and Claims Division has created Claim Monitoring Service (CMS) application. In the collection of IJP receivables, reinsurance receivables, reinsurance filings, and co-guarantee receivables, Information Technology Division and Business Administration Engineering Division have developed the IJP KUR Gen 2 receivables monitoring application. In addition, the Company also develops the risk mitigation management application for guarantee business.

7. *Improving Business Performance Through Machine Learning Utilization*

On strategic goals, the Company has an effort in improving business performance through machine learning utilization program by developing machine learning with DWHBI approach to IJP prediction, Claims, Subrogation. In 2020, the company also introduced machine learning to all employees through the Training of the Trainers (TOT) program.

8. *Optimizing the Rating and Development of MSMEs for market share improvement*

In an effort to increase the role of mentoring and consulting management to MSMEs, Risk Management and PUKM Division conduct assistance for MSMEs Guaranteed and Guaranteed Candidates to become Target MSMEs in each Regional/Branch Offices. In connection with the COVID-19 virus pandemic, so MSME seminar activities is conducted through online media (webinars). The first webinar was held at Kanwil V Semarang with the theme of preparing financial statements and socialization of eligible MSMEs on June 18, 2020.

Risk Management and PUKM Division has conducted training and socialization of MSMEs in collaboration with BNP2TKI and Ministry of Cooperatives as well as training in Banyuwangi and Mataram to increase the number of MSMEs partners and ranking.

9. *Improving Human Resources Competency and Productivity*

In order to strengthen existing Human Resources (HR) so as to increase the productivity of the Company, HR Management Division has conducted the preparation of HR Strategic Plan. HR Management division has also conducted official assessment and continuous employee development as well as employees recruitment through the SOEs Joint Recruitment Program and also recruited contract personnel for entry level hire from the Certified Student Internship Program to occupy

Bersertifikat untuk dapat menempati di unit kerja yang membutuhkan. Divisi MSDM telah melakukan Pendidikan dan pelatihan baik dengan pihak internal maupun eksternal untuk meningkatkan kompetensi SDM.

10. **Memperkuat Pengelolaan Pengetahuan Organisasi**
PT Jamkrindo mengembangkan *Knowledge Management (KM)* sebagai pusat informasi dan pengelolaan pengetahuan organisasi sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan sharing knowledge. Saat ini, dalam proses penyempurnaan KM telah dilakukan audit KM oleh KM Plus. Selain itu, Divisi MSDM sedang dalam proses penyusunan konsep taksonomi pengetahuan perusahaan sehingga memudahkan dalam melakukan manajemen pengetahuan perusahaan. Beberapa konsep yang sedang disusun oleh Divisi MSDM guna dapat memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi, antara lain konsep dokumentasi *tacit knowledge* terkait *best practice* dan *lesson learned* yang dapat meningkatkan pengetahuan karyawan, konsep pengembangan *Collaborative Knowledge Sharing* sehingga dapat terselenggara secara konsisten.
11. **Meningkatkan Internalisasi Budaya Inovasi**
Dalam hal meningkatkan internalisasi budaya inovasi pada setiap karyawan, maka telah diselenggarakan lomba inovasi dan lesson learned yang diikuti oleh setiap Unit Kerja pada saat HUT PT Jamkrindo. Selain itu, sedang dalam penyusunan konsep Kebijakan Manajemen Inovasi oleh Divisi MSDM dan pembentukan *Tim Task Force* yang membidangi manajemen inovasi.
12. **Meningkatkan Budaya Sadar Risiko & Penerapan Prinsip Tarif (GCG)**
Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan mitra dalam rangka pengelolaan risiko perusahaan. Perumusan strategi untuk mendukung sasaran tersebut yaitu melakukan kerja sama dengan Dukcapil, Infobank dan Pefindo Biro Kredit. Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah membuat video edukasi manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap *risk awareness* agar lebih atraktif dan mudah dipahami. Selain itu divisi ini telah melakukan sosialisasi Manajemen Risiko bagi seluruh *Risk Owner* agar dapat meningkatkan kesadaran para *Risk Owner* terhadap fungsi dan peranan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan proses bisnis di Perusahaan.

the position in the relevant work unit. HR Management Division has conducted education and training with either internal and external parties to improve human resources competencies.

10. **Strengthening Organizational Knowledge Management**
PT Jamkrindo develops Knowledge Management (KM) as an information center and knowledge management organization so as to facilitate employees in sharing knowledge. Currently, KM Plus has conducted KM audit in process to improving KM. In addition, HR Management Division is in process to drafting the concept of corporate knowledge taxonomy, making it easier to manage the Company's knowledge. To strengthen the management of organizational knowledge, HR Management Division prepares some concepts among others, the documentation concept of tacit knowledge related to best practice and lesson learned that can improve employee knowledge, the development concept of collaborative knowledge sharing so that it can be held consistently.
11. **Improving The Internalization of Innovation Culture**
In terms to improve the internalization of innovation culture in every employee, there has been an innovation competition and lesson learned which is followed by each Work Unit at the anniversary of PT Jamkrindo. In addition, HR Management Division is preparing the concept of Innovation Management Policies and establish a Task Force Team to manage innovation.
12. **Improving Risk Aware Culture & Implementation of Tariff Principles (GCG)**
The Company has formulated strategy to strengthen the Company's risk management by cooperating with partners, among other with Dukcapil, Infobank and Pefindo Credit Bureau. The Risk Management and PUKM Division have created risk management education videos to improve employees' understanding of risk awareness to make it more attractive and easy to understand. In addition, this division has conducted Risk Management socialization for all Risk Owners in order to raise the Risk Owner awareness to the Risk Management functions and roles in implementing the Company's business processes.

Indonesia Financial Group

Tahun 2020, Perusahaan bergabung dalam *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG). Hal ini mendorong Perusahaan untuk fokus kepada aspek komersial untuk meningkatkan laba perusahaan, dengan tetap memprioritaskan layanan kepada UMKM-K sesuai misi pendirian perusahaan. Fokus ini mendorong Perusahaan untuk bersikap

Indonesia Financial Group

In 2020, the Company joined the Holding of BUMN Insurance and Guarantee, Indonesia Financial Group (IFG). This encourages the Company to focus on commercial aspects to improve the company's profit, while prioritizing services to MSMEs in accordance with the company's founding mission. This focus encourages the Company to be professional, integrity and ethical in conducting

profesional, integritas dan beretika dalam melakukan operasional perusahaan, hal ini mencakup peningkatan kinerja dan tata kelola.

Dengan kapasitas penjaminan yang masih cukup besar, Perusahaan dapat melakukan penjaminan produk-produk kredit perbankan dan proyek infrastruktur yang lebih besar lagi, namun dengan besarnya penjaminan berpotensi tingkat klaim penjaminan meningkat sehingga perlu memperkuat analisis penjaminan untuk menghadapi ancaman tersebut. Selain itu, Perusahaan perlu meningkatkan kompetensi SDM terkait dalam meningkatkan produk kredit dan penjaminan, analisis risiko produk penjaminan, pengelolaan dan pembinaan UMKMK, pengelolaan investasi, pemasaran, kreativitas, inovasi, *business acumen*, dan pelayanan.

Holding berpotensi menjembatani bentuk pengaturan *playing field* yang disesuaikan dengan peraturan terkait, kondisi sektoral, azas mitigasi risiko, penetapan *investment guidelines* dan *pricing committee*. Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan ke depannya dapat memberikan *guidelines* mengenai *playing field* antar sesama anggota Holding terkait dengan penetrasi produk ke depannya, terutama terkait dengan isu *pricing war* di lini bisnis asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi umum syariah, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan asuransi kredit. Sedangkan untuk *spreading risk* tercipta di lini bisnis reasuransi jiwa dan reasuransi umum.

Pembentukan Holding BUMN Perasuransi dan Penjaminan akan memberikan nilai tambah dari sisi pengembangan bisnis melalui kolaborasi antar anggota Holding, baik dari sisi pengembangan produk sampai dengan pengelolaan jalur distribusi perusahaan. Optimalisasi struktur organisasi melalui *Shared Services* dan sentralisasi juga dapat menjawab tantangan dari sisi standarisasi pelayanan internal dan perbaikan komposisi margin dengan adanya nilai tambah dari efisiensi.

Specialization dapat dilakukan oleh PT Jamkrindo karena berdasarkan pembagian bisnis *existing*, PT Jamkrindo tidak memiliki irisan dengan entitas-entitas lainnya, sehingga memiliki potensi untuk melakukan *specialization* pada segmen Penjaminan. Dengan melakukan *specialization*, keuntungan yang dapat diperoleh adalah:

- Fokus upaya pada satu segmen
- Pengembangan keahlian pada satu bidang
- *Research & Development* produk yang kuat
- Otonomi dalam pengembangan bisnis & strategi
- *Value Proposition* jelas bagi konsumen

the company's operations, this includes improving performance and governance.

With a large guarantee capacity, the Company can guarantee banking loan products and even larger infrastructure projects. But the amount of guarantee can potentially increase the level of guarantee claims, so a strong guarantee analysis is needed to deal with the threat. In addition, the Company needs to improve the competence of human resources to improve credit and guarantee products, risk analysis of guarantee products, management and coaching of MSMEs, investment management, marketing, creativity, innovation, business accrued, and services.

Holding has the potential to bridge the form of playing field arrangements that are adjusted to related regulations, sectoral conditions, risk mitigation principles, investment guidelines and pricing committees. Holding of SOEs Insurance and Guarantee in the future can provide guidelines on playing field among fellow Holding members related to product penetration in the future, especially related to the issue of pricing war in the business line of motor vehicle insurance, fire insurance, personal accident insurance, sharia general insurance, health insurance, education insurance and credit insurance. As for spreading risk created in the business line of life reinsurance and general reinsurance.

The establishment of Holding of SOEs Insurance and Guarantee will provide added value in terms of business development through collaboration between Holding members, both in terms of product development and management of the company's distribution channels. Optimization of organizational structure through Shared Services and centralization can also answer challenges in terms of internal service standardization and margin composition improvement with the added value of efficiency.

Specialization can be done by PT Jamkrindo because based on the existing business division, PT Jamkrindo does not have a slice with other entities, so it has the potential to specialize in the Guarantee segment. By doing specialization, the advantages that can be obtained are:

- *Focus effort on one segment*
- *Development of expertise in one area*
- *Strong product research & development*
- *Autonomy in business development & strategy*
- *Value Proposition is clear to consumers*

Pembentukan *Holding* diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dan efisiensi bagi seluruh anggota dan induk. Berikut adalah potensi kolaborasi dan efisiensi yang dapat terjadi setelah terbentuknya *Holding*:

- Peningkatan Bunga Deposito
- Efisiensi Biaya Transaksi
- Efisiensi dari *Integrated Marketing Program*
- Efisiensi Pengadaan
- Efisiensi dengan *Shared Services*
- Efisiensi Beban Depresiasi dan Sewa
- Efisiensi Beban Klaim

The establishment of Holding is expected to create collaboration and efficiency for all members and parents. Here are the potential collaborations and efficiencies that can occur after the formation of holding:

- *Increased Deposit Interest*
- *Efficiency in Transaction Fee*
- *Efficiency of Integrated Marketing Program*
- *Efficiency of Procurement*
- *Efficiency with Shared Services*
- *Depreciation and Efficiency of Rental Expense*
- *Efficiency of Claims Expenses*

ASPEK PEMASARAN *Marketing Aspects*

Jamkrindo turut menunjang program Pemerintah dibidang pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan lembaga keuangan atau bukan keuangan dan bantuan konsultasi manajemen serta melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan, sebagaimana diatur dalam PP No.41 Tahun 2008 jo PP nomor No.35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Jamkrindo also supports government programs in the development of Small, Medium Enterprises and Cooperatives through guarantee activities against financial or non-financial institution loans and management consulting assistance as well as conducting other business activities that can support the achievement of the Company's objectives, as stipulated in PP No.41 of 2008 jo PP number No.35 of 2018 concerning Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia.

Untuk itu, tahun 2020, di tengah kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, Jamkrindo terus meningkatkan kegiatan pemasaran dengan menerapkan strategi sebagai berikut:

Therefore, in 2020, in the midst of the COVID-19 pandemic crisis, Jamkrindo continues to increase marketing activities by implementing the following strategies:

Inisiatif Strategis <i>Strategic Initiatives</i>	Kebijakan <i>Policies</i>
Memperkuat portofolio produk <i>existing</i>, baru, dan kolaborasi Holding dan BUMN berorientasi pada profitabilitas <i>Strengthen existing and new portfolios, and SOEs Synergies with profitability-oriented product</i>	• Kelompok produk dengan profitabilitas tinggi didorong untuk bertumbuh <i>Product groups with high profitability are encouraged to grow</i> • Kelompok produk dengan profitabilitas rendah dapat dipertahankan bila secara teknis dapat diperbaiki <i>Product groups with low profitability can be maintained when technically corrected</i> • Kolaborasi BUMN dilakukan pada produk dengan profitabilitas tinggi pada sektor industri yang potensial <i>Collaboration of SOEs is conducted on products with high profitability in the potential sector</i> • Pengembangan produk mengikuti strategi bisnis <i>Holding</i> dan regulasi yang berlaku <i>Product development follows Holding's business strategy and applicable regulations</i> • Penyelenggaraan bisnis penjaminan memperhatikan prinsip risiko/<i>prudent</i> <i>The guarantee business implementation takes into account the principle of risk/prudent.</i>

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Kebijakan Policies
Memperkuat portofolio usaha dan investasi <i>Strengthening Business Portfolio and Investment</i>	- Diversifikasi usaha harus terkait dengan bisnis inti perusahaan dan strategi bisnis Holding <i>Business diversification should be related to the Company's core business and Holding's business strategy</i> - Pengelolaan portofolio usaha dan investasi memperhatikan prinsip prudent dan efektif <i>Business and investment portfolio management takes into account prudent and effective principles</i> - Laba dari anak perusahaan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat permodalan perusahaan tersebut sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas penjaminan <i>Profits from subsidiaries are used entirely to strengthen the Company's capital in order to support the increase in guarantee capacity</i>
Memperkuat & mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar <i>Strengthening and Developing Partnership Networks for Market Penetration and Expansion</i>	- Pengembangan jejaring tidak dengan membuka unit kerja baru (milik Jamkrindo) <i>Network development by not opening new work units (owned by Jamkrindo)</i> - Pengembangan jejaring menekankan kepada upaya anorganik <i>Network development emphasizes inorganic efforts</i> - Pengembangan jejaring dengan memanfaatkan potensi Holding <i>Network development by leveraging the potential of Holding</i>
Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo <i>Increase Customer Preference for Jamkrindo Products</i>	- Upaya peningkatan <i>brand preference</i> ditujukan kepada berbagai <i>stakeholder</i> secara berimbang dengan memperhatikan ketepatan media yang digunakan <i>Efforts to improve brand preference are aimed at various stakeholders in a balanced manner by considering the accuracy of media use</i> - Upaya peningkatan <i>brand preference</i> dengan memanfaatkan kekuatan <i>branding Holding</i> <i>Efforts to increase brand preference by harnessing the power of Holding branding</i>
Meningkatkan loyalitas pelanggan & mitra melalui CRM <i>Increase customer & partner loyalty through CRM</i>	- Pengelolaan hubungan ditujukan kepada penerima jaminan dan terjamin secara seimbang <i>Relationship management is aimed at guarantee recipients and guaranteed in a balanced manner</i> - Pengelolaan hubungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika dan kepatuhan <i>Relationship management is carried out with due regard to ethical and compliance principles</i>
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI <i>Improve the quality and coverage of IT-based customer service</i>	- Pengembangan aplikasi berdasarkan prinsip <i>business case</i> (manfaat) yang dapat dipertanggungjawabkan <i>Application development based on the responsible business case (benefit) principles</i> - Peningkatan kapabilitas IT bersama Holding <i>Improved IT capabilities with Holding</i>

Pangsa Pasar

Berdasarkan data OJK, pada bulan Desember 2020 tercatat sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yang bergerak di bidang industri penjaminan yang terdiri dari 1 (satu) Perusahaan BUMN yaitu PT Jamkrindo, 18 (delapan belas) Perusahaan Penjaminan Daerah, dan 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Swasta.

Berikut adalah gambaran total aset, liabilitas, dan ekuitas industri penjaminan konvensional serta posisi Jamkrindo di industri.

Market Share

Based on data from OJK, in December 2020 there were 20 (twenty) companies engaged in the guarantee industry consisting of 1 (one) state-owned company, namely PT Jamkrindo, 18 (eighteen) Local Guarantee Companies, and 1 (one) Private Guarantee Company.

The following are total assets, liabilities, and equity of the conventional guarantee industry as well as Jamkrindo's position in the industry.

Keterangan Description	Jumlah Industri (Unit) Number of Industries (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (IDR billion)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (IDR billion)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (IDR billion)
Perusahaan BUMN <i>State-Owned Enterprises</i>	1	18.442	8.010	10.432
Perusahaan Penjaminan Daerah <i>Local Guarantee Company</i>	18	3.068	1.175	1.893

Keterangan Description	Jumlah Industri (Unit) Number of Industries (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (IDR billion)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (IDR billion)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (IDR billion)
Perusahaan Penjaminan Swasta Private Guarantee Company	1	604	430	174
Jumlah Total	20	22.114	9.615	12.499

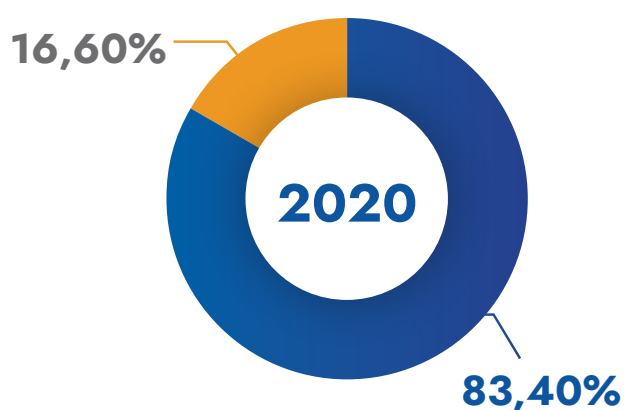
Sumber : OJK (diolah) | Source : OJK

Dari data sebagaimana tersebut di atas, Jamkrindo merupakan pemain dengan penguasaan aset, liabilitas dan ekuitas terbesar di industri penjaminan di Indonesia.

From the data above, Jamkrindo is the player with the largest assets, liabilities, and equity in the guarantee industry in Indonesia.

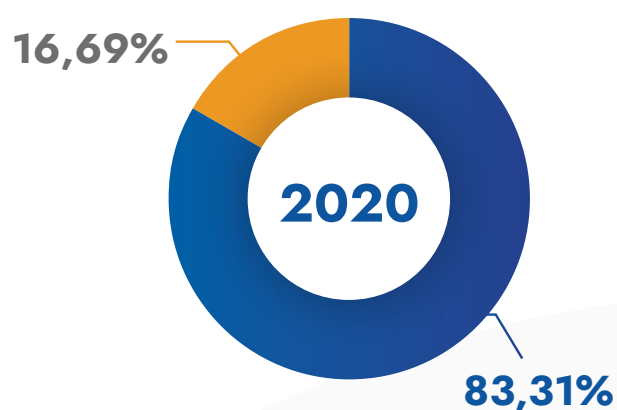
Aset

Asset



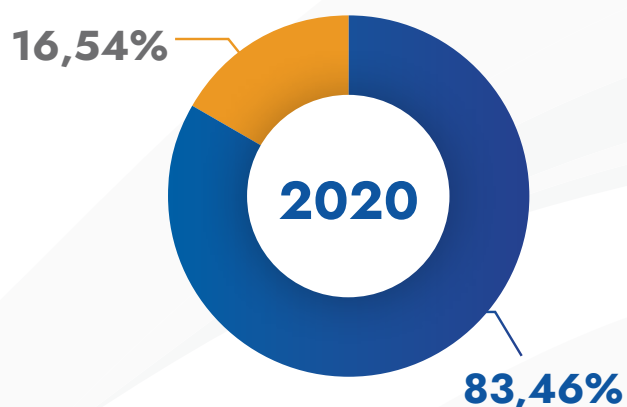
Liabilitas

Liabilities



Ekuitas

Equity



Jamkrindo



Pemain Lain

Other Companies

TINJAUAN PER SEGMENT USAHA

Review by Business Segment

Hingga akhir tahun 2020, di dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Perusahaan belum menerapkan PSAK No.5 tentang Segmen, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Perusahaan memiliki segmen operasi tunggal. Pembahasan segmen usaha dalam laporan ini dipisahkan berdasarkan sumber pendapatan Perusahaan yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan imbal jasa penjaminan, pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain.

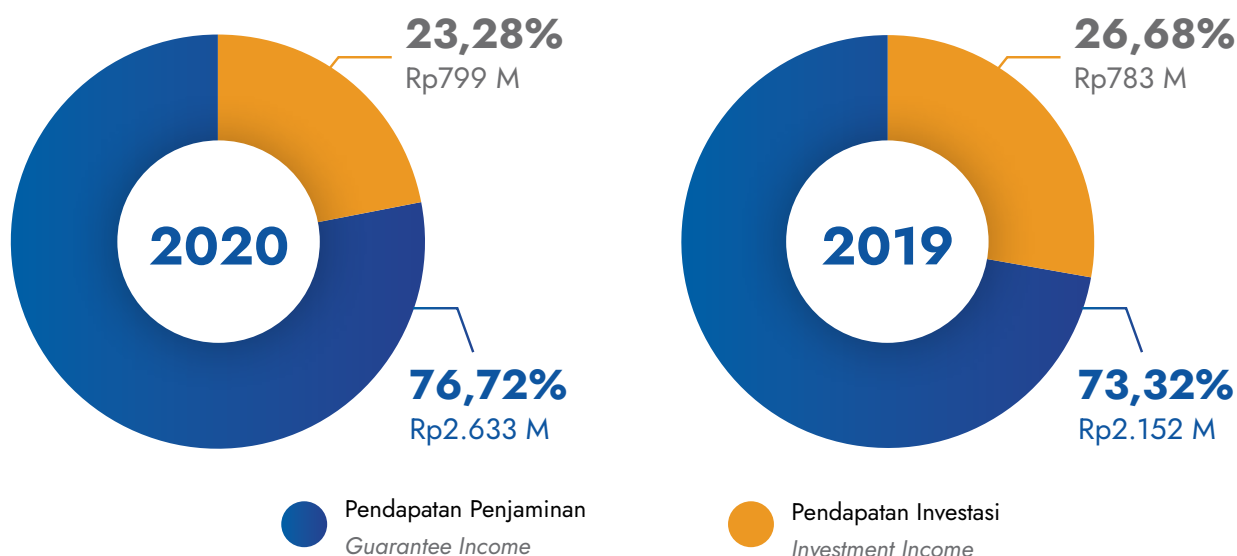
Komposisi pendapatan tahun 2020 dan 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

By the end of 2020, the Company's Financial Statements that have been audited by Hertanto Public Accounting Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner have not implemented PSAK No.5 on Segments, therefore it can be said that the Company has a single operating segment. The discussion of business segments in this report is separated based on the Company's revenue sources divided into 3 (three) large groups, namely guarantee fee, investment income and other income.

The composition of incomes in 2020 and 2019 can be described as follows:

Grafik Komposisi Pendapatan Jamkrindo 2019-2020

Jamkrindo Income Composition Chart 2019-2020



Komposisi pendapatan Perusahaan tahun 2020 masih didominasi oleh pendapatan penjaminan dengan pendapatan sebesar Rp2.633 miliar atau dengan kontribusi mencapai 76,72%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp2.152 miliar. Sedangkan kontribusi dari pendapatan investasi adalah sebesar 23,28% atau setara dengan Rp799 miliar. Kontribusi pendapatan investasi tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

The composition of the Company's income in 2020 is still dominated by guarantee income of IDR2,633 billion or with a contribution of 76.72%, increasing compared to the previous year of IDR2,152 billion. While the contribution of investment income is 23.28% or equivalent to IDR799 billion. The contribution of investment income in 2020 increased compared to the previous year.



PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Guarantee Fee

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Jamkrindo memberikan layanan penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

In accordance with Law Number 1 of 2016 on Guarantees, Jamkrindo provides credit or financing guarantee services provided by financial institutions to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.

Jamkrindo telah menjalankan kegiatan penjaminan kredit baik berupa KUR maupun non KUR, yang disalurkan oleh perbankan (penjaminan bank), baik bank konvensional maupun bank syariah dan lembaga non bank (penjaminan *non bank*) yang diproses secara *case by case* maupun *conditional automatic cover*. Atas layanan tersebut, Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang tarifnya ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit:

Jamkrindo has been carrying out credit guarantee activities in the form of KUR and non KUR, which are channeled by banks (bank guarantees), both conventional banks and sharia banks and non-bank institutions (non-bank guarantees) that are processed on a case by case basis or conditional automatic cover. For these services, the Company obtains Guarantee Services (IJP) whose rates are determined with the least consideration:

1. Risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
 - a. Rasio Klaim;
 - b. Jenis Kredit atau Pembiayaan;
 - c. Cakupan penjaminan; dan
 - d. Jangka waktu penjaminan;
2. Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran
3. Keuntungan.

1. *Guaranteed risk, the least calculated based on:*
 - a. *Claim Ratio;*
 - b. *Type of Credit or Financing;*
 - c. *Coverage of guarantee; and*
 - d. *Guarantee period;*
2. *General administration, operational, and marketing costs*
3. *Advantages.*

Berikut adalah gambaran jumlah kredit yang dijamin oleh Jamkrindo pada tahun 2019 serta RKAP dan realisasi tahun 2020:

The following amounts of credit are guaranteed by Jamkrindo in 2019 as well as RKAP and realization in 2020:

Tabel Jumlah Kredit yang Dijamin Tahun 2019 - 2020

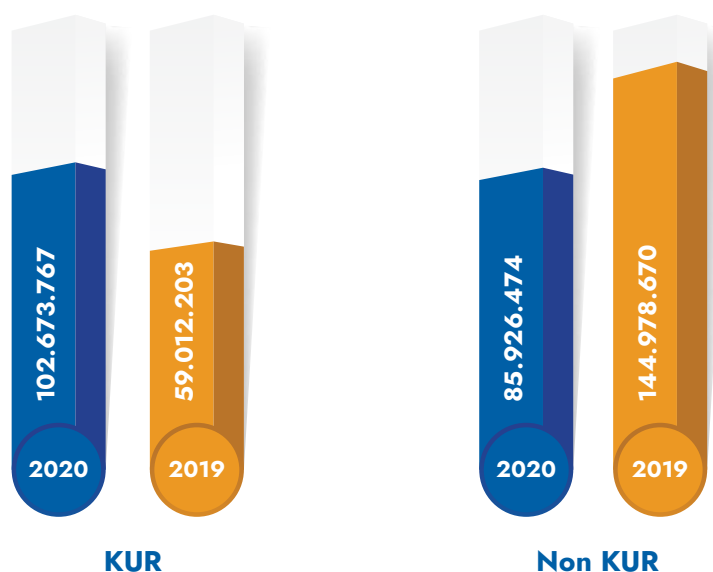
Table of Guaranteed Credits for 2019 - 2020

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2020	Persentase Percentage	
	2020	2019		Capaian RKAP 2020 Achievements of RKAP 2020	Pertumbuhan/ Penurunan Increase/ Decrease
KUR KUR	102.673.767	59.012.203	95.000.000	108,08%	73,99%
Non KUR Non KUR	85.926.474	144.978.670	90.515.411	94,93%	(40,73%)
Total Kredit Total Credits	188.600.240	203.990.873	170.515.411	110,61%	(7,54%)

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Jumlah Kredit yang Dijamin Tahun 2019 - 2020 (Rp-juta)

Number of Guaranteed Credits for 2019 - 2020 (IDR-million)



Total kredit yang dijamin Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp188.600 miliar, turun 7,54% dari tahun sebelumnya Rp203.991 miliar. Namun demikian, pencapaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada RKAP 2020 sebesar Rp170.515 miliar atau dengan pencapaian sebesar 110,61%.

Total loans guaranteed by the Company in 2020 reached IDR188,600 billion, decreased 7.54% from the previous year of IDR203,991 billion. However, this achievement exceeded the target set in RKAP 2020 of IDR170,515 billion or reached 110.61%.

Penurunan penjaminan kredit tersebut utamanya disebabkan turunnya penjaminan untuk produk Non KUR dari Rp144.979 miliar di tahun 2019 menjadi Rp59.012 miliar di tahun 2020.

The decrease in credit guarantee was mainly due to the decrease in guarantees for Non KUR products from IDR144.979 billion in 2019 to IDR59.012 billion in 2020.

Dari kredit yang dijamin di tahun 2020 Perusahaan memperoleh IJP sebesar Rp3.200 miliar. jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,51% dibandingkan tahun sebelumnya Rp2.529 miliar. Pencapaian tersebut setara dengan 116,91% dari target RKAP yang ditetapkan sebesar Rp2.737 miliar.

From the credit guaranteed in 2020 the Company obtained IJP of IDR3,200 billion. This amount increased by 26.51% compared to the previous year of IDR2,529 billion. The achievement is equivalent to 116.91% of the RKAP target set at IDR2,737 billion.

Tabel Imbal Jasa Penjaminan Tahun 2019 - 2020

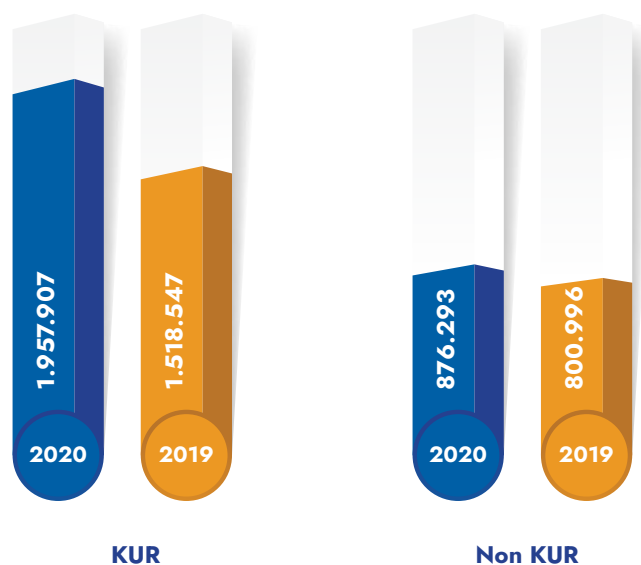
Table of Guarantee Fee for Years 2019 - 2020

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2020	Persentase Percentage	
	2020	2019		Capaian RKAP 2020 Achievements of RKAP 2020	Pertumbuhan/ Penurunan Increase/ Decrease
KUR	1.957.907	1.518.547	1.679.551	116,57%	28,93%
Non KUR	868.617	795.064	1.057.551	82,13%	9,25%
Total Imbalan Jasa Penjaminan Total Guarantee Fee	2.826.524	2.313.611	2.737.025	103,27%	22,17%

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Grafik Imbal Jasa Penjaminan Bruto 2019 - 2020 (Rp-juta)

Gross Guarantee Fee Chart 2019 - 2020 (IDR-million)



Penjaminan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Karena perannya yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional, pemerintah terus mendorong penyaluran KUR. Hal ini dapat dilihat dari plafond KUR yang terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Tahun 2020 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp102.670 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp59.012 miliar yang diberikan kepada 3.426.288 debitur.

KUR Guarantee

Kredit Usaha Rakyat (KUR) is the government's priority program in supporting MSMEs in the form of policies to provide working capital loan/financing and/or investment to individual debtors, business entities, and/or business groups that are productive and viable, but do not yet have additional collateral or additional collateral is not enough. The objectives of KUR program include improving and expanding to financing access to productive businesses, improving the competitiveness capacity of micro, small and medium enterprises (MSMEs) and encouraging economic growth and absorption of labor.

The government continues to encourage the distribution of KUR because of its very important role in supporting the national economy. This can be seen from the allocation of KUR funds that continues to be improved by the government.

In 2020 the realization of KUR distribution reached IDR102,670 billion, increasing compared to the previous year of IDR59,012 billion given to 3,426,288 debtor.

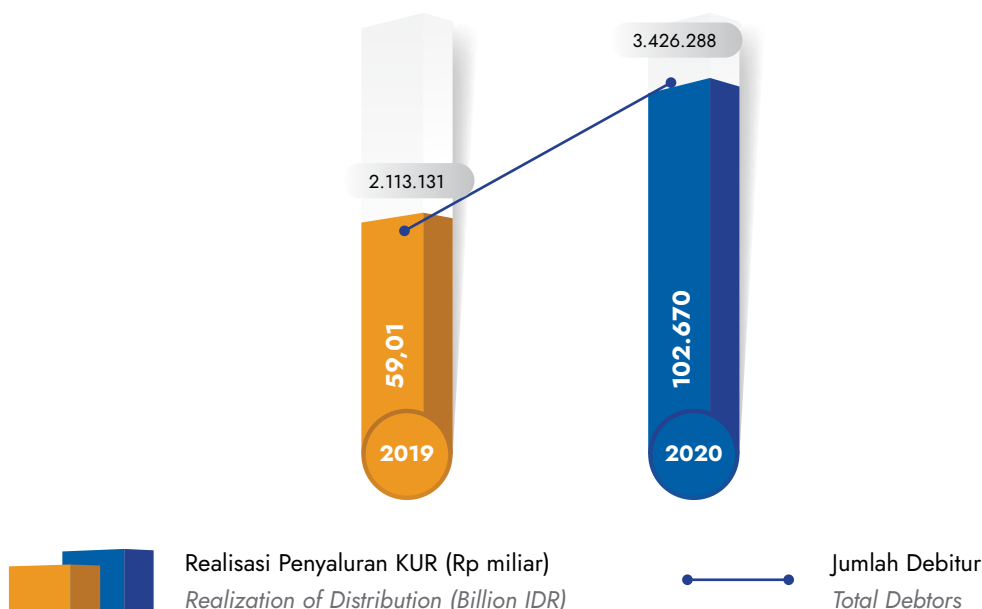
Tabel Realisasi Penyaluran KUR 2019 – 2020

KUR Distribution Realization Table 2019 – 2020

Uraian Description	2020	2019	dalam jutaan Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Realisasi Penyaluran (miliar Rupiah / plafond) Realization of Distribution (Billion Rupiah/ Allocation of Funds)	102.670	59.012	43.658	73,98%
Jumlah Debitur Total Debtors	3.426.288	2.113.131	1.380.124	29,18%

Grafik Realisasi Penyaluran KUR 2019 - 2020

Graph of KUR Distribution Realization 2019 - 2020



Jamkrindo memberikan layanan penjaminan KUR dengan dana PMN yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Program Penjaminan KUR tersebut bekerja sama dengan beberapa bank pelaksana yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN serta Bank BPD, Multifinance dan Koperasi yang mendapat penugasan untuk penyaluran KUR.

Penjaminan KUR diperuntukkan bagi UMKM untuk jenis KUR Mikro (maksimal Rp25 juta), KUR Kecil/Khusus (maksimal sebesar Rp500 juta), KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ("TKI") ditetapkan maksimal sebesar Rp25 juta dengan sistem penjaminan secara *conditional automatic cover* (CAC), dengan Imbal Jasa Penjaminan ("IJP") yang ditanggung oleh pemerintah.

Jamkrindo provides KUR guarantee services with PMN funds implemented since 2007 in accordance with Presidential Decree No.6 of 2007 and Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number: 170 of 2015 concerning the Executing Bank and the KUR Guarantor Company. The KUR Guarantee Program cooperates with several bank operators, namely Bank Mandiri, BRI, BNI, and BTN as well as Bank BPD, Multifinance and Cooperatives who are assigned to kur distribution.

KUR guarantee is intended for MSMEs with various types of KUR, among others KUR Micro (maximum IDR25 million), KUR Small/Special (maximum of IDR500 million), KUR Placement of Indonesian Workers ("TKI") is set a maximum of IDR25 million with a conditional automatic cover guarantee system (CAC), with guarantee fees ("IJP") borne by the government.

Pendapatan IJP atas penjaminan KUR dicatat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 135/OMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR, tarif IJP disesuaikan menjadi 3,25% X plafond kredit/pembiayaan X 70% atau sebesar 2,275%.

Tantangan Penjaminan KUR

Pandemi COVID-19 telah membuat kondisi perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Hal tersebut juga berdampak pada bisnis di sektor UMKM yang juga mengalami penurunan, Dampaknya, pelaku UMKM tidak dapat membayarkan angsuran kepada bank penyalur KUR dikarenakan usahanya tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan meningkatnya nilai kredit bermasalah (NPL) karena krisis ekonomi akibat *pandemic* COVID-19.

Dengan naiknya tingkat NPL pada bank penyalur KUR, maka angka permohonan klaim kepada perusahaan penjamin KUR juga mengalami kenaikan.

Strategi Penjaminan KUR

Menghadapi tantangan di tahun 2020, strategi yang dijalankan Perusahaan di segmen Penjaminan KUR antara lain:

1. Tetap melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan regulator yang menaungi Program KUR
2. Mendukung program pemerintah terkait program penyelamatan debitur KUR
3. Melakukan pembaharuan kerjasama sesuai dengan Permenko yang diterbitkan oleh regulator KUR guna menyelamatkan debitur KUR yang terdampak *pandemic* COVID-19
4. Bersama dengan bank penyalur KUR melakukan sosialisasi kebijakan KUR baik secara online maupun offline tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan yang berlaku

Sesuai anjuran Pemerintah, tahun 2020 Perusahaan tidak melakukan penyesuaian tarif IJP, kecuali untuk jenis KUR baru yaitu KUR Super Mikro yang dirancang untuk masyarakat dengan tarif Imbal Jasa Penjaminan sebesar 2%.

IJP's revenue on KUR guarantee is recorded in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning KUR Guarantee Facilities and Number 22/PMK.05/2010 dated February 12, 2010 concerning the second amendment to PMK No. 135/OMK.05/2008 concerning KUR guarantee facilities, IJP rate adjusted to 3.25% X loan/financing limit X 70% or 2.275%.

KUR Guarantee Challenges

The COVID-19 pandemic has caused economic conditions in Indonesia to deteriorate. It also has an impact on businesses in the MSME sector which is also experiencing a decline. MSME actors cannot pay installments to KUR channel banks because their businesses are not running well, resulting in an increase in the value of non-performing loans (NPLs) due to the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic.

With the increase in NPL rate at KUR channel banks, the number of claims requests to KUR guarantor companies also increased.

KUR Guarantee Strategies

Facing challenges in 2020, the Company's strategy in the KUR Guarantee segment includes:

1. *Continue to coordinate with stakeholders and regulators who oversee the KUR Program*
2. *Support government programs related to saving KUR debtors*
3. *Renew cooperation in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives as a KUR regulator to save KUR debtors affected by the COVID-19 pandemic*
4. *Socialize KUR policy together with bank whose channeling KUR both online and offline but still prioritize the prevailing health protocol*

As advised by the Government, in 2020 the Company does not make adjustments to IJP tariffs, except for the new type of KUR, KUR Super Micro designed for public with a guarantee service rate of 2%.

Kinerja Penjaminan KUR

Jamkrindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pada tahun 2020 berhasil mencapai volume penjaminan sebesar Rp102.674 miliar atau 47% dari total *outstanding* penjaminan di industri.

KUR Guarantee Performance

Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (SOE) that has the task and authority to conduct business activities in the field of development of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs). In 2020, the Company managed to achieve a guarantee volume of IDR102.674 billion or 47% of the total outstanding guarantee in the industry.

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP KUR Tahun 2019 - 2020

Table of Guarantee Value and IJP KUR for 2019 - 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2020	Persentase Percentage	
	2020	2019		Capaian RKAP 2020 Achievements of RKAP 2020	Pertumbuhan/ Penurunan Increase/ Decrease
Penjaminan KUR KUR Guarantee	102.673.767	59.012.203	95.000.000	128,34%	73,99%
IJP KUR IJP KUR	3.096.491	1.696.651	1.617.375	191,45%	82,51%

Realisasi penjaminan KUR tahun 2020 adalah sebesar Rp102.674 miliar atau mencapai 128,34% dari anggaran dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp95.000 miliar. Dibandingkan tahun 2019, realisasi penjaminan KUR meningkat 73,99% dimana tahun 2019 penjaminan KUR adalah sebesar Rp59.012 miliar. Sedangkan pendapatan IJP KUR adalah sebesar Rp3.096 miliar atau 191,45% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp1.617 miliar. Pendapatan IJP KUR tahun 2020 juga meningkat 82,51% dari tahun sebelumnya Rp1.697 miliar.

The realization of KUR guarantee in 2020 amounted to IDR102,674 billion or reached 128.34% of the budget in RKAP 2020 amounting to IDR95,000 billion. Compared to 2019, the realization of KUR guarantee increased by 73.99% where in 2019 KUR guarantee was IDR59,012 billion. Meanwhile, IJP KUR's income was IDR3,096 billion or 191.45% of the target set in RKAP 2020 of IDR1,617 billion. IJP KUR's income in 2020 also increased 82.51% from the previous year of IDR1,697 billion.

Tabel Laba Rugi Penjaminan KUR 2019 - 2020

Profit and Loss Table of KUR Guarantee in 2019 - 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net-Guarantee Fee	1.904.725	1.502.802	330.119	22,05%
Beban Klaim Claim Expenses	(1.038.708)	(966.453)	538.167	49,13%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	866.016	536.349	(208.048)	(51,78%)
Pendapatan Investasi - Bersih Investment Income - Net	601.001	608.932	78.899	13,75%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Beban Usaha Operating Expenses	(565.558)	(608.868)	(57.316)	(8,49%)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(458.208)	(2.203)	136.912	101,58%
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	443.252	534.210	65.078	39,25%
Pajak Kini Current Income Tax	(125.915)	(120.254)	(92.904)	(537,86%)
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	317.337	413.955	(27.826)	(15,20%)

Tahun 2020, dari penjaminan KUR Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan Bersih sebesar Rp1.827 miliar, meningkat Rp303 miliar atau 22,05% dari tahun 2019 sebesar Rp1.497 miliar. Beban klaim yang dibukukan Perusahaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp1.634 miliar atau meningkat 49,13% dari tahun sebelumnya Rp1.095 miliar, sehingga Perusahaan membukukan penjaminan bersih sebesar Rp194 miliar, turun 51,78% dari tahun 2019 sebesar Rp402 miliar.

In 2020, the Company's KUR guarantee obtained a Net Guarantee Fee of IDR1,827 billion, an increase of IDR303 billion or 22.05% from 2019 of IDR1,497 billion. The company's claim expenses also increased to IDR1,634 billion or increased 49.13% from the previous year of IDR1,095 billion, resulting in the Company posting a net guarantee of IDR194 billion, an decrease of 51.78% from 2019 of IDR536 billion.

Di tahun 2020, Perusahaan mampu menekan beban usaha menjadi Rp618 miliar atau turun 8,49% dari tahun sebelumnya Rp675 miliar. Namun demikian, tahun 2020 Perusahaan membukukan pendapatan lain-lain sebesar Rp2 miliar, melonjak signifikan dimana tahun sebelumnya Perusahaan membukukan beban lain-lain sebesar Rp135 miliar, sehingga laba sebelum pajak yang dibukukan Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp231 miliar, naik 101,58% dari tahun sebelumnya Rp534 miliar.

In 2020, the Company was able to reduce operating expenses to IDR618 billion or decreased 8.49% from the previous year of IDR675 billion. However, in 2020 the Company recorded other income of Rp2 billion, a significant increase where the previous year the Company recorded other expenses of Rp135 billion, resulting in the Company's income before tax in 2020 reaching IDR231 billion, increased 101.58% from the previous year of IDR534 billion.

Setelah membukukan pajak kini sebesar Rp76 miliar, pada tahun 2020 Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan dari penjaminan KUR sebesar Rp155 miliar, turun 15,20% dari tahun sebelumnya Rp183 miliar.

After posting a tax of IDR76 billion, in 2020 the Company managed to book a current year income from KUR guarantee of IDR155 billion, decreased 15.20% from the previous year of IDR183 billion.

Penjaminan Non KUR

Selain produk penjaminan KUR, Perum Jamkrindo juga memiliki beragam produk lainnya diluar KUR seperti penjaminan distribusi barang, FLPP, keagenan kargo, konstruksi, kontra bank garansi, KPR, kredit mikro, kredit otomotif, kredit umum, *surety bond*, *payment bond*, pembiayaan *invoice*, kredit super mikro, keagenan kargo, Resi Gudang, *Capital management Guarantee* (CMG) dan lain-lain.

Non KUR Guarantee

In addition to KUR guarantee products, Jamkrindo also has a variety of other products outside KUR such as goods distribution guarantees, FLPP, cargo agency, construction, counter-bank guarantees, mortgages, microcredit, automotive credit, general credit, surety bonds, payment bonds, invoice financing, super micro credit, Warehouse Receipt, Capital management Guarantee (CMG) and others.

Beberapa produk yang berkontribusi besar bagi kinerja produksi penjaminan Non-KUR antara lain penjaminan FLPP, Kredit Multiguna, kredit mikro dan *surety bond*.

Some products that contribute greatly to the performance of Non-KUR guarantee production include the FLPP guarantee, Multipurpose Credit, Micro-credit, and surety bonds.

Tantangan Penjaminan Non KUR

Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di tahun 2020, bisnis Penjaminan Non-KUR menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Pencapaian Produksi sesuai target yang di tetapkan
2. Kompetitor yang semakin bertambah
3. Peningkatan Penjaminan dalam rangka sinergi BUMN
4. Peningkatan Kerjasama dengan mitra eksisting
5. Semakin tingginya NPL mitra kerja

Strategi Penjaminan Non KUR

Untuk menghadapi tantangan usaha di tahun 2020, Perusahaan menerapkan strategi berikut di segmen Penjaminan Non KUR, yaitu:

1. Melakukan pendekatan ke mitra dan gali potensi bisnis
2. Memperluas pangsa pasar produk *Suretyship*
3. Memperluas kerjasama penjaminan dalam rangka sinergi BUMN
4. Melakukan *cross selling* dengan mitra eksisting
5. Melakukan penjajakan kerjasama baru dgn mitra kerja non bank dan *fintech*

Kinerja Penjaminan Non KUR

Non KUR Guarantee Challenges

In the midst of the COVID-19 pandemic in 2020, the Non-KUR Guarantee business faces a number of challenges, including:

1. *Production achievement in accordance with the target set*
2. *Competition is getting tighter*
3. *Improvement of Guarantee in the framework of synergy of SOEs*
4. *Improved Cooperation with existing partners*
5. *NPL partners are getting higher*

Non KUR Guarantee Strategies

To face business challenges in 2020, the Company implemented the following strategies in the Non KUR Guarantee segment, namely:

1. *Approach partners and explore business potential*
2. *Expand market share for Suretyship products*
3. *Expanding guarantee cooperation in order to Synergy of SOEs*
4. *Cross selling with existing partners*
5. *Exploring new cooperation with non-bank and fintech partners*

Non KUR Guarantee Performance

Tabel Penjaminan Kredit Non KUR Tahun 2019 - 2020

Table of Non KUR Credit Guarantee 2019 - 2020

Uraian Description	RKAP Tahun 2020 RKAP Year 2020	Realisasi Realization		Ach %	YoY
		2020	2019		
Distribusi Barang Distribution of Goods	105.274	84.000	193.500	79,79%	56,59%
Kredit Mikro Micro Credit	4.949.005	5.596.027	6.442.258	113,07%	(13,14%)
Kredit Multiguna Multipurpose Credit	672.095	634.717	518.041	94,44%	22,52%
Kredit OTO OTO Credit	9.500	9.500	593.259	100,00%	(98,40%)
Kredit Super Mikro Super Micro Credit	5.070.308	11.426.158	10.610.166	225,35%	7,69%
Kredit Umum General Credit	-	1.379	11.159	0,00%	87,64%
Pembiayaan Invoice Invoice Financing	34.961	34.427	77.168	98,47%	(55,39%)
TOTAL NONBANK TOTAL NONBANK	10.841.143	17.786.207	18.445.551	164,06%	(3,57%)

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	RKAP Tahun 2020 RKAP Year 2020	Realisasi Realization		Ach %	YoY
		2020	2019		
Customs Bond Customs Bond	21.071	25.396	249.020	120,53%	(89,80%)
Keagenan Kargo Cargo Agency	-	-	53.485	0,00%	(100,00%)
Kontra Bank Garansi Counter Bank Guarantee	3.240.821	4.353.021	5.090.899	134,32%	(14,49%)
Payment Bond Payment Bond	42.368	134.051	386.620	316,40%	(65,33%)
Surety Bond Surety Bond	2.902.344	3.452.670	6.272.645	118,96%	(44,96%)
TOTAL SURETY TOTAL SURETY	6.206.604	7.965.138	12.052.669	128,33%	(31,91%)
GRAND TOTAL GRAND TOTAL	17.047.747	25.751.345	30.498.219	151,05%	(15,56%)

Pada tahun 2020, Divisi Bisnis 3 mencatat nilai penjaminan Non KUR adalah sebesar Rp17.048 miliar, turun 15,56% dari tahun sebelumnya Rp30.498 miliar namun dari RKAP 2020 realisasi tersebut melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 151,1%. Komponen penjaminan terbesar tahun 2020 berasal dari penjaminan kredit super mikro yaitu sebesar Rp5.070 miliar atau setara dengan 29,74% dari total penjaminan Divisi Bisnis 3 Tahun 2020.

In 2020, Business Division 3 recorded the non-KUR guarantee value was IDR17,048 billion, decreased by 15.56% from the previous year of IDR30,498 billion but from RKAP 2020 the realization exceeded the target set at 151.1%. The largest guarantee component in 2020 comes from super micro credit guarantee of IDR5,070 billion or equivalent to 29.74% of the total guarantee of Business Division 3 in 2020.

Tabel Laba Rugi Penjaminan Non KUR Tahun 2019 - 2020

Profit and Loss Table of Non KUR Guarantee in 2019 - 2020

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp	%
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net-Guarantee Fee	806.034	654.832	151.202	23,09%
Beban Klaim Claim Expenses	196.784	642.510	(445.726)	(69,37%)
Penjaminan Bersih Net Guarantee	609.250	12.323	596.927	4.844,01%
Pendapatan Investasi Bersih Investment Income - Net	146.415	208.913	(62.498)	(29,92%)
Beban Usaha Operating Expenses	(285.861)	(148.198)	137.663	92,89%
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	48.997	(9.045)	58.042	641,70%
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	491.606	15.853	475.753	3001,03%

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp	%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(190.705)	(0)	190.705	100,00%
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	300.906	15.853	285.053	1.798,10%

Di tengah kondisi industri perbankan yang mengalami tekanan, kinerja penjaminan KUR justru mengalami peningkatan. Perusahaan membukukan Imbal Jasa Penjaminan Bersih sebesar Rp806 miliar, meningkat 23,09% dari tahun sebelumnya Rp654 miliar. Hal tersebut membuat laba bersih segmen Non-KUR meningkat signifikan menjadi Rp301 miliar dari tahun sebelumnya Rp16 miliar.

In the midst of the banking industry that was under pressure, the performance of the KUR guarantee actually increased. The company posted a Net Guarantee Fee of IDR806 billion, an increase of 23.09% from the previous year of IDR654 billion. This made the Non-KUR segment's net profit increase significantly to IDR301 billion from IDR16 billion in the previous year.

Penjaminan PEN

PEN Guarantee

PEN adalah Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

PEN is a guarantee given in order to implement the Government Regulation on Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State's financial policy for handling the Corona Virus Disease pandemic 2019 (COVID-19) and/or face threats that endanger the national economy and/or financial system stability as well as national economic rescue.

Tahun 2020 realisasi penyaluran PEN mencapai Rp8.622 miliar, yang diberikan kepada 553.469 debitur.

In 2020 the realization of PEN distribution reached IDR8,622 billion, which was given to 553,469 debtors.

Tabel Realisasi Penyaluran PEN 2020

Table for Realization of PEN Distribution in 2020

Uraian Description	2020
Realisasi Penyaluran (miliar Rupiah / plafond) (konvensional+syariah) Realization of Distribution (billion Rupiah/limit) (conventional+sharia)	Rp8,621,674,159,368
Jumlah Debitur Total Debtors	553.469

Jamkrindo memberikan layanan penjaminan PEN berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Milik Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.08/2020 Tentang Penugasan Kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) Untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Penjaminan PEN diperuntukkan kepada Para Pelaku Usaha UMKM dalam menjalankan usahanya

Pendapatan IJP atas penjaminan PEN dicatat sesuai dasar surat:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-582/MK.08/2020 Tanggal 08 Juli 2020 Perihal Penetapan Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 7,65% (tujuh koma enam puluh lima perseratus) per tahun.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.08/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Penyesuaian Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 6,11% (enam koma sebelas perseratus) per tahun.

Tantangan Penjaminan PEN

1. Masih rendahnya partisipasi kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dikarenakan masih proses persiapan internal (kesiapan kebijakan, system, SDM dan sosialisasi)
2. Bank mengaitkan sumber dana penyaluran kredit UKM program penjaminan PEN dengan program penempatan dana pemerintah
3. Masih relatif rendahnya usulan pagu/plafon dari Bank pelaksana program PEN

Strategi Penjaminan PEN

1. Campur tangan pemerintah (Kementerian Keuangan) dalam penunjukan bank penyalur pen serta penetapan plafond/pagu sehingga maksimal penyerapan program penjaminan pen
2. Percepatan Pengembangan system EJAMKU agar dapat mengakomodir penjaminan Suplesi, Perpanjangan dan Resrukturisasi (SPR)

Jamkrindo provides PEN guarantee services based on:

1. *Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 71/PMK.08/2020 concerning Procedures for Government Guarantee through Designated Guarantee-Owned Enterprises in order to the implementation of the National Economic Recovery Program*
2. *Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 304/KMK.08/2020 concerning Assignment to PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) to Implement Government Guarantees in order to the implementation of the National Economic Recovery Program*

PEN Guarantee is intended for MSME BusinessEs in conducting their business

IJP's revenue on PEN guarantee is recorded by letter:

1. *Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-582/MK.08/2020 dated July 08, 2020 concerning Determination of Guarantee Service Rates for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, IJP tariff of 7.65% (seven point sixty-five hundredths) per year.*
2. *Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-80/MK.08/2021 dated 04 February 2021 concerning Tariff Adjustment of Guaranteed Services for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, IJP tariff of 6.11% (six point eleven hundredths) per year.*

PEN Guarantee Challenge

1. *Participation of the National Private Public Bank (BUSN) group are still low, due to the process of internal preparation (policy readiness, system, human resources and socialization)*
2. *The Bank associates the fund source of SME credit disbursement for PEN guarantee program with government fund placement program*
3. *Proposed funding limit from Bank as PEN distributors is still relatively low*

PEN Guarantee Strategies

1. *Government intervention (Ministry of Finance) in the appointment of Bank as PEN distributors well as the determination of funding limit so can maximize the absorption of PEN guarantee program*
2. *Acceleration of EJAMKU system development in order to accommodate the Supplement, Extension and Restructuring (SPR) Guarantee*

3. Percepatan pengembangan syatem EJAMKU untuk mengakomodir koreksi penjaminan setelah penagihan IJP kepada pemerintah
4. Penjaminan kepada debitur yang sama oleh 2 penjamin atas fasilitas penjaminan yang bwrbeda karena kebutuhan perbankan untuk berbagi risiko kepada 2 penjamin

3. Acceleration of EJAMKU system development to accommodate guarantee correction after IJP billing to the government
4. Guarantee to the same debtor by 2 guarantors for the different guarantee facility because of the needs of banking to share risk to 2 guarantors

Tahun 2020, terjadi perubahan premi berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.08/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Penyesuaian Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 6,11% (enam koma sebelas perseratus) per tahun. Besaran Tarif IJP berlaku untuk Sertifikat Penjaminan yang diterbitkan sejak tanggal 1 Februari 2021.

In 2020, premium changes occurred based on the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-80/MK.08/2021 dated February 04, 2021 concerning Tariff Adjustment of Guaranteed Services for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, IJP tariff of 6.11% (six point eleven hundredths) per year. The amount of IJP Tariff will apply to Guarantee Certificates issued since February 1, 2021.

Kinerja Penjaminan PEN

PEN Guarantee Performances

Jamkrindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pada tahun 2020 berhasil mencapai volume penjaminan sebesar Rp8,622 miliar.

Jamkrindo which is a State-Owned Enterprise (SOE) that has duties and authorities to conduct business activities in the development of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs). In 2020, the guarantee volume reached IDR8,622 billion.

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP PEN Tahun 2020

Table of Guarantee Value and PEN Guaranteed Service Credit in 2020

Uraian Description	Realisasi Realization	RKAP Tahun 2020 RKAP Year 2020	Persentase Capaian RKAP 2020 Percentage of RKAP Achievements 2020
	2020		
Penjaminan PEN (konvensional+syariah) PEN Guarantee (conventional+sharia)	Rp8,621,674	Rp8,000,000	108%
IJP PEN (Cash Basis) PEN Guaranteed Service Credit	Rp1,182,986	Rp700,000	169%

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Realisasi penjaminan PEN tahun 2020 adalah sebesar Rp8.622 miliar atau mencapai 108% dari anggaran dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp8 miliar. Sedangkan pendapatan IJP PEN adalah sebesar Rp1,183 miliar atau 169% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp700 miliar.

The realization of PEN guarantee in 2020 is IDR8,622 billion or reaches 108% of the budget in RKAP 2020 which is IDR8 billion. Meanwhile, IJP PEN's revenue is IDR1.183 billion or 169% of the target set in RKAP 2020 which is IDR700 billion.

Kontribusi Imbalan Jasa Penjaminan Terhadap Laba (Rugi) Konsolidasi 2020

Contribution of Guarantee Fee to Consolidated Profit (Loss) in 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Konsolidasi Consolidation	Eksisting Existing	KUR	Persentase Kontribusi Percentage Contribution	
				Eksisting Existing	KUR
Imbal Jasa Penjaminan Bersih <i>Net - Guarantee Fee</i>	2.633.393	806.034	1.827.359	30,61%	69,39%
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	1.830.400	196.784	1.633.616	10,75%	89,25%
Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee</i>	802.993	609.250	193.743	75,87%	24,13%
Pendapatan Investasi Bersih <i>Investment Income - Net</i>	799.211	146.415	652.796	18,32%	81,68%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(903.670)	(285.861)	(617.809)	31,63%	68,37%
Pendapatan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i>	51.130	48.997	2.133	95,83%	4,17%
Laba Sebelum Pajak <i>Income Before Tax</i>	722.469	491.606	230.863	68,05%	31,95%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Tax Expenses</i>	(266.366)	(190.705)	(75.631)	71,60%	28,39%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Income</i>	456.133	300.901	155.232	65,97%	34,03%

Hingga akhir tahun 2020, Penjaminan KUR memberikan kontribusi yang besar terhadap imbal jasa penjaminan Perusahaan. Namun demikian, penjaminan non KUR menjadi kontributor utama terhadap laba Perusahaan yaitu sebesar Rp301 miliar, sedangkan laba yang diperoleh dari penjaminan KUR adalah sebesar Rp155 miliar.

Until the end of 2020, the KUR Guarantee has made a large contribution to the Company's guarantee fees. However, non-KUR guarantees were the main contributor to the Company's profit, amounting to IDR301 billion, while the profit from KUR guarantees was IDR155 billion.

PENDAPATAN INVESTASI *Investment Income*

Perusahaan melakukan investasi pada instrumen-instrumen keuangan yang tersedia di pasar, baik pasar modal maupun perbankan. Investasi yang dilakukan dalam bentuk surat berharga terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang dimiliki hingga jatuh tempo dan yang tersedia di jual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Tantangan yang Dihadapi

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan karena hampir sepanjang tahun terdampak oleh *pandemic* COVID-19. Banyaknya perusahaan yang terdampak COVID masih bisa diimbangi dengan kebijakan dan insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama BI dan OJK untuk menghindari dampak buruk COVID terhadap risiko likuiditas dan risiko solvabilitas perusahaan. Pandemi berdampak juga terhadap penurunan suku bunga acuan (7DDR) dari level 5.00% pada awal tahun 2020 hingga turun signifikan menjadi 3.75% pada akhir tahun 2020. Kinerja IHSG pun demikian bila dibandingkan dengan akhir 2019 di posisi 6.299,54, IHSG pada akhir 2020 terkoreksi 5,09%.

Strategi Investasi

Untuk mengoptimalkan pendapatan investasi, tahun 2020 Jamkrindo menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pemenuhan alokasi portofolio investasi sesuai ketentuan POJK, sampai dengan saat ini sudah dilakukan rutin setiap bulannya, terutama difokuskan pada pemenuhan SBN/Obligasi Negara/Obligasi Infrastruktur sesuai POJK yang berlaku;
2. Memilih produk investasi yang sesuai dengan ketentuan target RKAP tahun berjalan;
3. Menindaklanjuti proses *maintenance* dengan pihak *counterpart software* (SIM);

The Company invests in financial instruments available in the market, both capital and banking markets. Investments made in the form of securities are divided into 2 (two) categories, namely those owned until maturity and available for sale.

Investments held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or predetermined payments and maturities have been determined where the Company has a positive intention and ability to own such financial assets until maturity, and is not determined at fair value through profit or loss statements or available for sale.

Financial assets available for sale are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or that are not classified into any of the other financial asset categories.

Challenges Faced

2020 is a challenging year because most of the year is affected by the COVID 19 pandemic. The number of companies affected by COVID can still be balanced with policies and incentives issued by the Government together with BI and OJK to avoid the adverse impact of COVID on the Company's liquidity risk and solvency risk. The pandemic also impacted the reduction of 7 Days Reverse Repo Rate (7DDR) from 5.00% at the beginning of 2020 to 3.75% by the end of 2020. The performance of JCI was similar when compared to the end of 2019 at 6,299.54, JCI at the end of 2020 corrected 5.09%.

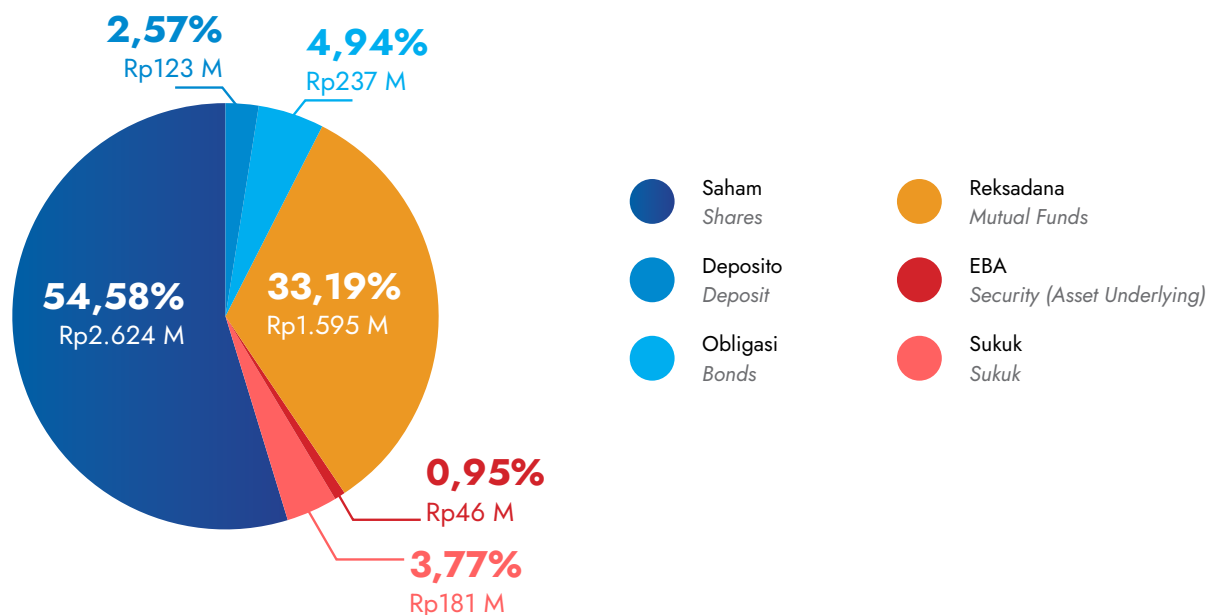
Investment Strategies

To optimize investment income, in 2020 Jamkrindo implemented the following strategies:

1. *Preparation and fulfillment of investment portfolio allocation in accordance with the POJK provisions, that has been conducted routinely in every month, mainly focused on the fulfillment of SBN/Government Bonds/Infrastructure Bonds in accordance with the applicable POJK;*
2. *Choosing investment products in accordance with the provisions of the current year's RKAP target;*
3. *Follow up the maintenance process with the counterpart software (SIM);*

4. Melakukan penyederhanaan (penggabungan) bilyet deposito;
 5. Berkoordinasi dengan Divisi Bisnis untuk dilakukan analisa optimalisasi resiprokal deposito baik secara *on desk* atau *on the spot*.
4. *Simplifying (merging) bilyet deposits;*
 5. *Coordinate with the Business Division to analyze the optimization of deposit receipts either on desk or on the spot.*

Kinerja Investasi



Perusahaan melakukan investasi pada surat berharga dengan jenis yang cukup beragam. Hal tersebut merupakan bagian dari penyebaran risiko yang dijalankan Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan juga fokus untuk memperoleh hasil investasi yang optimal.

Tahun 2020, investasi dalam surat berharga yang dilakukan Perusahaan utamanya masih berupa produk Obligasi, yaitu mencapai 54,58% dari total surat berharga yang dimiliki Perusahaan atau setara dengan Rp2.624 miliar. Selain itu, Jamkrindo juga memiliki portofolio dalam bentuk Reksadana dalam jumlah yang cukup besar, yaitu Rp1.595 miliar atau setara dengan 33,19% dari surat berharga Perusahaan.

The Company invests in securities of various types. This is part of the company's spread of risk. Nevertheless, the Company is also focused on obtaining optimal investment returns.

In 2020, the Company invested in bonds, reaching 54.58% of the Company's securities or equivalent to IDR2,624 billion. In addition, Jamkrindo also has a portfolio in the form of mutual funds in large amounts, namely IDR1,595 billion or equivalent to 33.19% of the Company's securities.

Pendapatan Investasi - Bersih

Investment Income - Net

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp	%
Bunga Deposito Time Deposit Interest	382.815	486.672	(103.857)	-21,34%
Bunga Obligasi Bond Interest	199.733	170.800	28.933	16,94%
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	180.236	87.419	92.470	105,78%
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	15.704	10.958	4.746	43,31%
Pendapatan Capital Gain Saham Capital Gain Share Interest	6.067	8.360	(2.293)	-27,43%
Dividen Dividend	6.067	8.360	(23.550)	-62,59%
Efek Beragunan Aset (EBA) Security (Assets Underlying)	4.929	4.715	561	11,90%
Jumlah Pendapatan Investasi Total Investment Incomes	803.562	806.552	(2.990)	-0,37%
Beban Investasi Investment Expenses	(4.351)	(23.742)	19.391	-81,67%
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih Total Investment Incomes-Net	799.211	782.810	16.401	2,10%

Pendapatan investasi yang dibukukan Jamkrindo tahun 2020 mencapai Rp799 miliar, naik 2,10% dari tahun sebelumnya Rp783 miliar. Penurunan pendapatan investasi tersebut utamanya disebabkan penurunan pendapatan dari bunga deposito yang mengalami penurunan 21,34% menjadi Rp383 miliar dari Rp487 miliar di tahun 2019.

Namun demikian, tahun 2020 Perusahaan dapat menekan beban investasi menjadi Rp4 miliar dari tahun sebelumnya Rp24 miliar atau turun 81,67%, sehingga pendapatan investasi bersih yang dibukukan Perusahaan di tahun 2020 mencapai Rp799 miliar, naik 2,10% dari tahun sebelumnya Rp783 miliar.

Jamkrindo's investment income in 2020 reached IDR799 billion, increased 2.10% from the previous year of IDR783 billion. The decrease in investment income was mainly due to a decrease in income from deposit interest which decreased by 21.34% to IDR383 billion from IDR487 billion in 2019.

However, in 2020 the Company can reduce its investment expenses to IDR4 billion from the previous year of IDR24 billion or decreased 81.67%, so that the Company recorded net investment income in 2020 reaches IDR799 billion, increased 2.10% from the previous year of IDR783 billion.



KINERJA PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (ENTITAS ANAK)

Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Subsidiaries)

Sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamkrindo Syariah) terus menunjukkan pertumbuhan kinerja yang baik. Tahun 2020, di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat menantang, Jamkrindo Syariah masih dapat membukukan pertumbuhan kinerja yang baik.

In line with the growth of sharia financial industry in Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamkrindo Syariah) continues to show good performance growth. In 2020, in the midst of challenging economic and business conditions, Jamkrindo Syariah can still record good performance growth.

Laporan Posisi Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Financial Position Statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Aset

Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Aset Asset				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	443.899	502.748	(58.849)	(11,71%)
Surat Berharga Marketable Securities	171.320	163.652	7.668	4,69%
Piutang Penjaminan Ulang Reguarantee Receivables	36.684	41.329	(4.645)	(11,24%)
Piutang Lain-Lain Other Receivables	41.151	7.130	34.021	477,15%
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	77.669	69.029	8.640	12,52%
Aset tetap Fixed assets	59.552	3.020	56.532	1.871,92%
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	215	146	69	47,26%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	15.499	15.041	458	3,05%
Aset Lain-lain Other Assets	419.433	143.932	275.501	191,41%
Jumlah Aset Total Assets	1.573.879	1.184.644	389.235	32,86%

Aset Jamkrindo Syariah pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 32,86% atau Rp389 miliar, yaitu dari Rp1.185 miliar di tahun 2019 menjadi Rp1.574 miliar di tahun 2020. Pertumbuhan aset tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah aset lain-lain Jamkrindo Syariah sebesar 191,41% menjadi Rp419 miliar dari

Jamkrindo Syariah's assets in 2020 increased by 32.86% or IDR389 billion, from IDR1,185 billion in 2019 to IDR1,574 billion in 2020. The growth of these assets was mainly due to the increase in the number of other assets of Jamkrindo Syariah by 191.41% to IDR419 billion from IDR144 billion in 2019. In addition, the increase in the

Rp144 miliar di tahun 2019. Selain itu, peningkatan aset Jamkrindo Syariah juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah beban dibayar di muka menjadi Rp77,7 miliar dari Rp69 miliar di tahun 2019.

number of Jamkrindo Syariah assets was also influenced by the increase in the amount of prepaid expenses to IDR77.7 billion from IDR69 billion in 2019.

Liabilitas

Liabilities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Liabilitas <i>Liabilities</i>				
Utang Klaim <i>Claim Payable</i>	963	1.329	(366)	(27,54%)
Utang Pajak <i>Tax Payable</i>	5.595	641	4.954	772,85%
Utang Penjaminan Ulang <i>Co-Guarantee Payable</i>	43.899	11.290	32.609	288,83%
Pendapatan Ditangguhkan <i>Deferred Income</i>	710.670	448.827	261.843	58,34%
Cadangan Klaim <i>Claims Reserve</i>	32.978	15.397	17.581	114,18%
Utang Lain-Lain <i>Other Payable</i>	33.676	23.941	9.735	40,66%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja <i>Employee Benefits Liabilities</i>	1.716	465	1.251	269,03%
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	829.496	501.889	327.607	65,27%

Jumlah liabilitas Jamkrindo Syariah tahun 2020 tercatat sebesar Rp829 miliar, meningkat 65,27% lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu Rp502 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pendapatan ditangguhkan menjadi Rp711 miliar dari Rp449 miliar di tahun 2019.

In 2020, Jamkrindo Syariah's liabilities are recorded at IDR829 billion, an increase of 65.27% greater than the previous year of IDR502 billion. The increase is due to the increase in the amount of deferred income to IDR711 billion from IDR449 billion in 2019.

Ekuitas

Equity

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Ekuitas <i>Equity</i>				
Penyertaan Modal <i>Investment</i>	550.000	475.000	75.000	15,79%
Cadangan — Cadangan <i>Reserves</i>	81.401	44.825	36.576	81,60%
Komponen Ekuitas Lainnya <i>Other Equity Component</i>	7.409	1.338	6.071	453,74%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Saldo Laba Tahun Lalu Retained Earnings at the Previous Year	8.192	0	8.192	100%
Saldo Laba Retained Earnings	40.572	36.563	4.009	10,96%
Total Ekuitas Total Equity	687.574	557.725	129.849	23,28%

Pada tahun 2020, ekuitas Jamkrindo Syariah mengalami peningkatan sebesar 23,28% atau Rp130 miliar, menjadi Rp688 miliar dari Rp558 miliar di tahun 2019. Pertumbuhan jumlah ekuitas tersebut disebabkan oleh meningkatnya penyertaan modal PT Jamkrindo di Jamkrindo Syariah yaitu dari Rp475 miliar di tahun 2019 menjadi Rp550 miliar di tahun 2020.

In 2020, Jamkrindo Syariah Equity increased by 23.28% or IDR130 billion, becoming IDR688 billion of IDR558 billion in 2019. The increase in equity is more due to the increasing capital investment of PT Jamkrindo in Jamkrindo Syariah, namely from IDR475 billion in 2019 to IDR550 billion in 2020.

Laporan Laba (Rugi)

Statements of Profit (Loss)

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Labarugi Profit (Loss)				
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net z- Guarantee Fee	172.509	110.679	61.830	55,86%
Beban Klaim Claim Expenses	(101.995)	(57.821)	44.174	76,40%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	70.514	52.859	17.655	33,40%
Pendapatan Investasi Bruto Gross Investment Income	56.850	44.872	11.978	26,69%
Beban Usaha Operating Expenses	(65.788)	(55.384)	10.404	18,79%
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(1.861)	1.691	(3.552)	(210,05%)
Labasebelum Pajak Income Before Tax	59.715	44.037	15.678	35,60%
Pajak Kini Current Income Tax	(15.514)	(8.414)	7.100	84,38%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Tax Benefit (Deferred) Income Tax	4.564	954	3.610	378,41%
Jumlah Beban Pajak Penhasilan Total Income Tax Expenses	(10.951)	(7.461)	3.490	46,78%
Labatahun Berjalan Current Year Income	48.765	36.576	12.189	33,33%

Tahun 2020 Jamkrindo Syariah berhasil membukukan imbal jasa penjaminan bersih sebesar Rp173 miliar, naik 55,86% dari tahun sebelumnya Rp111 miliar. Namun demikian, beban klaim yang dibukukan Jamkrindo Syariah juga meningkat 76,40% menjadi Rp102 miliar dari Rp58 miliar di tahun 2019. Demikian juga halnya dengan beban usaha Jamkrindo Syariah yang naik 18,79% menjadi Rp66 miliar.

Dengan kinerja tersebut, tahun 2020, Jamkrindo Syariah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp49 miliar, meningkat 33,33% dari tahun sebelumnya Rp37 miliar. Realisasi laba tahun berjalan tahun 2020 mencapai 110,66% dari target dalam RKAP 2020.

In 2020 Jamkrindo Syariah managed to record a net guarantee fee of IDR173 billion, up 55.86% from the previous year of IDR111 billion. Nevertheless, the claim expenses recorded by Jamkrindo Syariah also increased by 76.40% to IDR102 billion from IDR58 billion in 2019. Similarly, Jamkrindo Syariah's operating expenses increased 18.79% to IDR66 billion.

With this performance, in 2020, Jamkrindo Syariah posted a current year income of IDR49 billion, an increase of 33.33% from the previous year of IDR37 billion. The realization of current year income in 2020 reached 110.66% of the RKAP target in 2020.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review



Pembahasan tinjauan keuangan berikut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian dan telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020.

The following financial review discussions are based on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020 and have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners with a fair opinion without exception and has been adjusted to the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia and revisions issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants which are considered relevant to its operations and affect the financial statements dated December 31, 2020.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statements of Financial Position

Aset

Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Aset				
<i>Assets</i>				
Kas dan kas di bank <i>Cash and cash in the bank</i>	101.105	88.614	12.491	14,10%
Deposito wajib dan berjangka <i>Mandatory and time deposits</i>	6.496.349	6.178.594	317.755	5,14%
Efek-efek <i>Marketable securities</i>	4.632.456	4.503.996	128.460	2,85%
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih <i>Guarantee fee receivable - net</i>	2.584.461	1.480.972	1.103.489	74,51%
Piutang penjaminan ulang - bersih <i>Re-guarantee receivables - net</i>	492.611	354.845	137.766	38,82%
Piutang hasil investasi <i>Receivables on investment</i>	39.211	66.050	(26.839)	(40,63%)
Biaya dibayar dimuka <i>Prepaid expenses</i>	16.578	32.807	(16.229)	(49,47%)
Aset tetap - bersih <i>Fixed assets - net</i>	320.934	206.586	114.348	55,35%
Aset tak berwujud - bersih <i>Intangible assets - net</i>	38.633	40.141	(1.508)	(3,76%)
Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted bank deposits</i>	1.192.039	716.072	475.967	66,47%
Penjaminan ulang dibayar dimuka <i>Re-guarantee paid in advance</i>	967.283	983.254	(15.971)	(1,62%)
Aset pengembalian <i>Return assets</i>	456.203	331.036	125.167	37,81%
Biaya akuisisi tangguhan <i>Deferred acquisition cost</i>	314.721	348.962	(34.241)	(9,81%)
Aset penjaminan ulang <i>Asset re-guarantee</i>	308.457	238.616	69.841	29,27%
Aset pajak tangguhan <i>Deferred tax assets</i>	1.151.643	1.174.212	(22.569)	(1,92%)
Aset lain-lain <i>Other Asset</i>	10.145	25.513	(15.368)	(60,24%)
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	19.122.829	16.770.270	2.352.559	14,03%

Jumlah aset Perusahaan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp19.123 miliar, meningkat 14,03% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.770 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah piutang IJP sebesar Rp1.103 miliar dan deposito di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp476 miliar.

Total the Company's assets at the end of 2020 stood at IDR19,123 billion, an increase of 14.03% compared to the previous year of IDR16,770 billion. The increase was mainly due to the increase in the amount of Guarantee Receivables amounting to IDR1,103 billion and Restricted deposit in Banks IDR476 billion.

Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalents

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kas Cash	1.575	1.337	238	17,80%
Giro Current Account				
Pihak Berelasi Related Parties	69.300	57.655	11.645	20,20%
Pihak Ketiga Third Parties	30.263	29.622	641	2,16%
Jumlah Giro Total Current Accounts	101.105	88.614	12.286	14,08%

Pada 31 Desember 2020, jumlah kas dan setara kas Jamkrindo tercatat sebesar Rp101 miliar, jumlah tersebut meningkat 14,08% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp89 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah giro sebesar Rp12 miliar, khususnya giro pada pihak berelasi.

As of December 31, 2020, Jamkrindo's cash and cash equivalents amounted to IDR101 billion, the amount increased 14.08% compared to the previous year of IDR89 billion. The increase is caused by an increase in the amount of current account amounting to IDR12 billion, especially current account on related parties.

Deposito Wajib dan Berjangka

Statutory and time deposits

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Deposito Time Deposits				
Pihak Berelasi Related Parties	5.436.008	4.836.870	599.138	12,39%
Pihak Ketiga Third Parties	1.061.448	1.341.724	(280.276)	(20,89%)
Jumlah Deposito Total Time Deposits	6.496.349	6.178.594	318.862	5,16%

Jumlah deposito wajib dan berjangka Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp6.496 miliar, jumlah tersebut meningkat 5,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.179 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari deposito pihak berelasi yang di tahun 2020 meningkat 12,39% menjadi Rp5.436 miliar.

Total Jamkrindo's statutory and time deposits in 2020 recorded to IDR6,496 billion, this amount was increased by 5.16% compared the previous year of IDR6,179 billion. This increase is mainly come from Deposit in related parties in 2020 that increase 12.39% to IDR5,436 billion.

Efek-Efek

Marketable Securities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Nilai wajar melalui laba rugi: Fair value through profit or loss:				
Reksadana Mutual Funds	1.594.897	-	1.594.897	100,00%
Efek beragun aset Asset backed securities	45.820	-	45.820	100,00%
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Fair value through other comprehensive income				
Obligasi Bonds	1.768.379	1.478.073	290.306	19,64%
Saham Shares	237.291	266.523	(29.232)	(10,97%)
Reksadana Mutual funds	-	684.577	(684.577)	(100,00%)
Efek beragun aset Asset backed securities	-	29.570	(29.570)	(100,00%)
Biaya perolehan diamortisasi: Measured as amortised cost:				
Obligasi Bonds	1.021.355	953.008	68.347	7,17%
Reksadana Mutual funds	-	1.054.851	(1.054.851)	(100,00%)
Efek beragun aset Asset backed securities	-	37.394	(37.394)	(100,00%)
Jumlah Efek-efek Total marketable securities	4.632.456	4.503.996	128.460	2,85%

Jumlah efek-efek yang dimiliki Perusahaan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp4.632 miliar, meningkat 2,85% dari tahun sebelumnya Rp4.504 miliar. Surat berharga yang dimiliki Perusahaan terdiri dari berbagai instrumen, yaitu reksadana, obligasi, sukuk, EBA, saham dan deposito. Tahun 2020, portofolio surat berharga Perusahaan utamanya berupa obligasi dan reksadana.

The amount of securities owned by the Company at the end of 2020 amounted to IDR4,632 billion, an increase of 2.85% from the previous year of IDR4,504 billion. The Company's securities consist of various instruments, namely mutual funds, bonds, sukuk, Asset backed securities, shares and deposits. In 2020, the Company's securities portfolio will primarily be in the form of bonds and mutual funds.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan

Guarantee Receivables

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Berdasarkan pihak By parties				
· Pihak Berelasi Related Parties	3.574.629	2.478.758	1.095.871	44,21%
· Pihak Ketiga Third Parties	117.210	58.644	58.566	99,87%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(1.107.378)	(1.056.430)	50.948	4,82%
Jumlah Piutang Imbal Jasa Penjaminan – Bersih Total Guarantee Receivables	2.584.461	1.480.972	1.103.489	74,51%

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah piutang imbal jasa penjaminan Jamkrindo tercatat sebesar Rp2.584 miliar, meningkat 74,51% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.481 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya piutang IJP pihak berelasi.

As of December 31, 2020, Jamkrindo's Guarantee Receivables stood at IDR2,584 billion, an increase of 74.51% compared to IDR1,481 billion at December 31, 2019. The increase was mainly due to the increase in KUR Guarantee Receivables-Net.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan tagihan Perusahaan atas jasa kegiatan penjaminan produk KUR dan PEN. Dimana terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Piutang Subsidi IJP dan Piutang IJP Subsidi Bunga.

Guaranteed Service Credit Receivables (IJP) People's Business Credit (KUR) and the National Economic Recovery Program (PEN) are the Company's bills for services guarantee activities of KUR products and PEN, where divided into 2 (two) categories, namely IJP Receivables Subsidies and IJP Receivables Interest Subsidies.

Piutang Subsidi IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah atas jasa kegiatan penjaminan KUR yang telah diberikan kepada terjamin sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. IJP KUR dibayar oleh Pemerintah IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan April dan Oktober.

KUR IJP Receivables Subsidies is the Company's bill to the Government for services guarantee activities of KUR that have been provided to the guaranteed in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008. KUR IJP is paid by the Government annually with billing periods in April and October.

Piutang IJP KUR Subsidi Bunga merupakan tagihan Perusahaan kepada Penerima Jaminan atas jasa kegiatan penjaminan KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015. Imbal Jasa Penjaminan termasuk dalam Subsidi Bunga yang dibayarkan Pemerintah yang nilainya hasil dari kesepakatan antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

KUR IJP Receivables Interest Subsidies represent the Company's bill to Guarantee Recipients for the services of KUR guarantee activities in accordance with the Regulation of the Coordinating Minister for the Economy Number 8 of 2015 dated October 19, 2015. Guaranteed Service Fees are included in Interest Subsidies paid by the Government, the value of which results from agreement between the Guarantor and the Recipient of the Guarantee.

Piutang IJP PEN Subsidi IJP merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah atas jasa kegiatan penjaminan PEN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Imbal Jasa Penjaminan dibayarkan Pemerintah per tahun secara bulanan.

PEN IJP Receivables Subsidies is the Company's bill to the Government for services guarantee activities of PEN in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 71/PMK.08/2020 concerning Government Guarantee Procedures through Guarantee Business Entities appointed in order to the National Economic Recovery Program. Guaranteed Service Payments are paid by the Government annually with a monthly basis.

Piutang Penjaminan Ulang

Reguarantee Receivables

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	dalam juta Rupiah in million Rupiah			
	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Berdasarkan Pihak: By parties:				
PT Igna Asia Reinsurance Brokers	541.360	397.585	143.775	36,16%
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72.705	72.705	-	0,00%
PT Reasuransi Nasional Indonesia	32.394	7.650	24.744	323,45%
PT Heksa Eka Life	30.490	44.620	(14.130)	(31,67%)
PT Freed Dinamika Indonesia	2.652	1.472	1.180	80,16%
PT BRI Insurance	6.992	12.554	(5.562)	(44,30%)
PT Asuransi Jiwasraya	2.226	1.107	1.119	101,08%
PT Central Asia Raya	-	25	(25)	(100,00%)
Jumlah Piutang Penjaminan Ulang Total Reauarantee Receivables	492.611	354.845	137.766	38,82%

Jumlah piutang penjaminan ulang Jamkrindo pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp493 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp138 miliar atau 38,82% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp355 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari piutang reasuransi PT Igna Asia Reinsurance Brokers yang meningkat 36,16% menjadi Rp541 miliar.

Jamkrindo's reguarantee receivables as of December 31, 2020 amounted to IDR493 billion, a increase of IDR138 billion or 38.82% compared to the position on December 31, 2019 of IDR355 billion. The largest increase came from reinsurance receivables of PT Igna Asia Reinsurance Brokers was increased 36.16% to IDR541 billion.

Perusahaan bekerjasama dengan mitra *Co-Guarantee* untuk kredit multiguna dan mikro untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggalnya terjamin. Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari mitra *Co-Guarantee*, sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama dengan mitra *Co-Guarantee* yaitu perusahaan akan memotong pembayaran premi *Co-Guarantee* maksimal sebesar 55% dari premi *Co-Guarantee* sebesar 45% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra *Co-Guarantee* apabila saldo Piutang *Co-Guarantee* di atas kewajaran, yang dihitung 3 kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra *Co-Guarantee*.

The company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and micro credit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured. To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since 2011 has been added a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cutoff the premium Co-Guarantee a maximum of 50% of the premium Co-Guarantee for 60% of the IJP/IJK the Guarantee Co-partner right when the balance in the Accounts Receivable Co-Guarantee fairness, which is calculated 3 times of the average filing claims payments in the last 1 year or with other calculations agreed by the company and partner Co-Guarantee.

Pada 31 Desember 2019 perusahaan mencadangkan kerugian penurunan nilai Piutang sebesar Rp196 miliar.

As of December 31, 2019, the company provided an impairment loss of Receivables amounting to IDR196 billion.

Piutang Re-Asuransi kepada Perusahaan Re-asuransi adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re-Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerja sama dengan mitra Re-asuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Re-Insurance Receivable to Company Indonesian National Re-insurance is reimbursement payments charged to the partners claim for payment of Re- Insurance claims paid by the Company. Re-insurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risk of claims.

Dalam kerja sama dengan re-asuransi digunakan metode *treaty*, merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Re-asuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi *treaty*.

In cooperation with the insurance partner treaty methods is being used. Treaty method is an annually automatic re-guarantee agreement and re-insurance partner with the condition agreed concerning treaty negotiation.

Piutang Hasil Investasi

Investment Income Receivables

Uraian Description	2020	2019	dalam juta Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Obligasi Bonds	27.333	15.705	11.628	74,04%
Deposito Berjangka Time Deposits	8.677	12.594	(3.917)	(31,10%)
Sukuk Sukuk	2.689	1.674	1.015	60,63%
Efek Beragun Aset Asset backed securities	512	508	4	0,79%
Reksadana Mutual funds	-	35.569	(35.569)	(100,00%)
Jumlah Piutang Hasil Investasi Total Investment Income Receivables	39.211	66.050	(26.839)	(40,63%)

Jumlah piutang hasil investasi Jamkrindo tahun 2020 adalah sebesar Rp39 miliar, turun 40,63% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66 miliar. Penurunan tersebut utamanya berasal dari piutang hasil investasi reksadana yang turun dari Rp36 miliar menjadi nol.

Total Jamkrindo's Investment Income Receivables in 2020 amounted to IDR39 billion, a decrease of 40.63% compared to the previous year of IDR66 billion. This decrease is mainly

Aset Tetap

Fixed Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Biaya Perolehan <i>Acquisition Cost</i>				
Kepemilikan langsung <i>Direct ownership</i>				
· Tanah <i>Land</i>	88.706	53.213	35.493	66,70%
· Bangunan Kantor <i>Buildings</i>	143.491	78.458	65.033	82,89%
· Perumahan Dinas <i>Houses</i>	8.500	6.778	1.722	25,41%
· Inventaris Kantor <i>Office Equipment</i>	140.145	114.976	25.169	21,89%
· Inventaris Rumah Dinas <i>Houses Equipment</i>	4.291	3.556	735	20,67%
· Kendaraan Bermotor <i>Vehicles</i>	43.891	43.751	140	0,32%
· Aset dalam penyelesaian <i>Asset in Progress</i>	4.425	20.467	(16.042)	(78,38%)
Aset Hak Guna <i>Right of Use Assets</i>				
· Bangunan Kantor <i>Office Buildings</i>	51.693	-	51.693	100,00%
· Kendaraan Bermotor <i>Vehicles</i>	32.497	-	32.497	100,00%
· Peralatan Kantor <i>Office Equipment</i>	159	-	159	100,00%
Jumlah Biaya Perolehan <i>Total Cost of Acquisition</i>	517.798	-	517.798	100,00%
Akumulasi Penyusutan <i>Accumulated Depreciation</i>				
· Bangunan Kantor <i>Office Buildings</i>	(35.154)	(32.009)	(3.145)	9,83%
· Perumahan Dinas <i>Houses</i>	(2.487)	(2.148)	(339)	15,78%
· Inventaris Kantor <i>Office Equipment</i>	(90.833)	(73.105)	(17.728)	24,25%
· Inventaris Rumah Dinas <i>Houses Equipment</i>	(2.785)	(2.280)	(505)	22,15%
· Kendaraan Bermotor <i>Vehicles</i>	(39.249)	(35.071)	(4.178)	11,91%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Aset Hak Guna <i>Right of Use Assets</i>				
· Bangunan Kantor <i>Office Buildings</i>	(13.219)	-	(13.219)	100,00%
· Kendaraan Bermotor <i>Vehicles</i>	(13.107)	-	(13.107)	100,00%
· Peralatan Kantor <i>Office Equipment</i>	(30)	-	(30)	100,00%
Jumlah Akumulasi Penyusutan <i>Amount of Accumulated Depreciation</i>	(196.864)	(144.613)	(52.251)	36,13%
Jumlah Aset Tetap — Bersih <i>Total Fixed Assets — Net</i>	320.934	206.586	114.348	55,35%

Jumlah aset tetap Perusahaan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp321 miliar, meningkat 55,35% dari tahun sebelumnya Rp207 miliar. Peningkatan jumlah aset tetap tersebut disebabkan investasi yang dilakukan Perusahaan dalam bentuk tanah, bangunan kantor, perumahan dinas, inventaris kantor, inventaris rumah dinas dan kendaraan bermotor, sebesar Rp517 miliar di tahun 2020.

Total the Company's fixed assets at the end of 2020 stood at IDR321 billion, an increase of 55,35% from the previous year of IDR207 billion. The increase in the number of fixed assets is due to investments made by the Company in the form of land, buildings, houses, office equipment, houses equipment and vehicles, amounting to IDR517 billion in 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai buku aset tak berwujud yang merupakan perangkat lunak sebesar Rp39 miliar, turun sebesar Rp1 miliar atau 3,76% dibandingkan tahun sebelumnya Rp40 miliar.

As of December 31, 2020, the book value of intangible assets, which are software, amounted to IDR39 billion, a decrease of IDR1 billion or 3.76% compared to the previous year of IDR40 billion.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat aset tak berwujud yang dijaminkan.

As of December 31, 2020 and 2019 there were no intangible assets pledged as collateral.

Aset Tak Berwujud

Intangible Assets

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai buku aset tak berwujud yang merupakan perangkat lunak sebesar Rp39 miliar, turun sebesar Rp1 miliar atau 3,76% dibandingkan tahun sebelumnya Rp40 miliar.

As of December 31, 2020, the book value of intangible assets, which are software, amounted to IDR39 billion, a decrease of IDR1 billion or 3.76% compared to the previous year of IDR40 billion.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat aset tak berwujud yang dijaminkan.

As of December 31, 2020 and 2019 there were no intangible assets pledged as collateral.

Deposito di Bank Yang Dibatasi Penggunaannya

Restricted deposit in Banks

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000	300.000	200.000	66,67%
PT Bank Syariah Mandiri	167.639	67.639	100.000	147,84%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	159.000	158.500	500	0,32%
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	100.000	-	100.000	100,00%
Berbagai Bank Pembangunan Daerah Various regional development banks	85.200	65.850	19.350	29,38%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75.140	75.140	-	0,00%
PT Bank Tabungan Negara Syariah	73.094	46.943	26.151	55,71%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	30.000	-	30.000	100,00%
PT Bank Negara Indonesia Syariah	2.000	2.000	-	0,00%
Jumlah Deposito di Bank Yang Dibatasi Penggunaannya Total Restricted deposit in Banks	1.192.039	716.072	475.967	66,47%

Jumlah Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.192 miliar, meningkat 66,47% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp716 miliar.

Total Restricted deposit in Banks in 2020 recorded by IDR1,192 billion, an increase of 66.47% compared to the previous year of IDR716 billion.

Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka

Prepaid Re-Guarantee

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat	105.517	33.680	71.837	213,29%
Konsumtif Consumptive	750.314	867.367	(117.053)	(13,50%)
Produktif Productive	65.098	77.150	(12.052)	(15,62%)
PEN	42.471	-	42.471	100,00%
Suretyship	3.883	5.057	(1.174)	(23,22%)
Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka Prepaid Re-Guarantee	967.283	983.254	(15.971)	(1,62%)

Jumlah penjaminan ulang dibayar dimuka tahun 2020 tercatat sebesar Rp967 miliar, turun 1,62% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp983 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan turunnya jumlah penjaminan ulang dibayar dimuka untuk kredit konsumtif yang turun sebesar Rp117 miliar menjadi Rp750 miliar.

Total Prepaid Re-Guarantee in 2020 recorded by IDR967 billion, a decrease of 1.62% compared to the previous year of IDR983 billion. This decrease was mainly due to total prepaid re-guarantee for consumptive credit was decreased by IDR117 billion to IDR 750 billion.

Aset Lain-lain

Other Assets

Uraian Description	2020	2019	dalam juta Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Klaim dalam proses Claim in progress	59.682	67.148	(7.466)	(11,12%)
Pinjaman bagi hasil Loans	17.124	17.578	(454)	(2,58%)
Obligasi premium Premium Bonds	6.696	-	6.696	100,00%
Aset lainnya Other Assets	2.955	26.646	(23.691)	(88,91%)
Jumlah Aset Lain-lain Total Other Assets	10.145	25.513	(15.368)	(60,24%)

Pada akhir tahun 2020, jumlah aset lain-lain Jamkrindo tercatat sebesar Rp10 miliar, turun 60,24% dari tahun sebelumnya Rp26 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan turunnya jumlah aset lainnya dari Rp27 miliar di tahun 2019 menjadi Rp3 miliar di tahun 2020.

At the end of 2020, Jamkrindo's other assets stood at IDR10 billion, an decrease of 60.24% from the previous year of IDR26 billion. The decrease was mainly due to the decrease in the number of other assets from IDR27 billion in 2019 to IDR3 billion in 2020.

Liabilitas

Liabilities

Uraian Description	dalam juta Rupiah in million Rupiah			
	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
LIABILITAS LIABILITY				
Utang Klaim Claim Payable	4.247	14.125	(9.878)	(69,93%)
Utang Penjaminan Ulang Co-Guarantee Payable	246.645	125.596	121.049	96,38%
Akrual dan utang lain-lain Accruals and Other Payables	1.034.001	510.739	523.262	102,45%
Utang Pajak Tax Payable	143.075	29.942	113.133	377,84%
Liabilitas kontrak jaminan keuangan Liabilities for Financial Guarantee Contracts	7.826.367	6.666.285	1.160.082	17,40%
Pendapatan komisi ditangguhkan Deferred Commission Income	142.930	130.528	12.402	9,50%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Estimasi liabilitas klaim <i>Estimated Claim Liabilities</i>	151.957	138.776	13.181	9,50%
Imbal jasa kafalah ditangguhkan <i>Unearned Kafalah Fees</i>	632.799	423.100	209.699	49,56%
Liabilitas imbalan kerja <i>Employee Benefits Liabilities</i>	84.929	53.104	31.825	59,93%
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	10.266.950	8.092.195	2.174.755	26,87%

Jumlah liabilitas Jamkrindo pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.267 miliar, meningkat 26,87% atau Rp2.175 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp8.092 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut utamanya disebabkan peningkatan jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan sebesar Rp1.160 miliar, yaitu dari Rp6.666 miliar di tahun 2019 menjadi Rp7.826 miliar di tahun 2020.

Total Jamkrindo's liabilities as of December 31, 2020 amounted to IDR10,267 billion, an increase of 26.87% or IDR2,175 billion compared to the previous year of IDR8,092 billion. The increase in the number of liabilities was primarily due to an increase in the amount of Liabilities for Financial Guarantee Contracts of IDR1,160 billion, namely from IDR6,666 billion in 2019 to IDR7,826 billion in 2020.

Utang Klaim

Jumlah utang klaim Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp4 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp10 miliar atau 69,93% dibandingkan tahun sebelumnya Rp14 miliar.

Claim Payable

Total the company's claim payable in 2020 was recorded at IDR4 billion, decreasing by IDR10 billion or 69.93% compared to the previous year of IDR14 billion.

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah Utang yang telah disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar persentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang disetujui.

Claims payable is payable to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claims payable are debts that have been approved but not yet paid. Claims payable are stated at the percentage of underwriting the loans approved discharge tray.

Utang Penjaminan Ulang

Reguarantee Payable

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	206.687	51.556	155.131	300,90%
Pihak Ketiga <i>Third Parties</i>	39.958	74.040	(34.082)	(46,03%)
Jumlah Utang Penjaminan Ulang Total <i>Total Reguarantee Payable</i>	246.645	125.596	121.049	96,38%

Utang penjaminan ulang Perusahaan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp247 miliar, naik 96,38% dari tahun sebelumnya Rp126 miliar. Kenaikan tersebut utamanya disebabkan peningkatnya utang pihak berelasi yaitu sebesar Rp155 miliar menjadi Rp207 miliar.

The Company's Re-guarantee Payable at December 31, 2020 stood at IDR247 billion, an increase of 96.38% from the previous year of IDR126 billion. The increase was mainly due to the increase in Payable with related parties by IDR155 billion to IDR207 billion.

Utang co-guarantee dan re-asuransi merupakan utang premi yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

Re-guarantee and re-insurance payables are an insurance premium payable that must be paid by the company to transfer the risk of claim.

Akrual dan Utang Lain-lain

Accruals and Other Payables

Uraian Description	2020	2019	dalam juta Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
IJP Belum Teridentifikasi Unidentified IJP	595.123	69.680	525.443	754,08%
Beban Pegawai Employee expenses	181.787	177.830	3.957	2,23%
IJP Belum Terbit Sertifikat Unpublished IJP certificate	70.808	97.038	(26.230)	(27,03%)
Beban Operasional Operational expenses	44.997	18.515	26.482	143,03%
Liabilitas Sewa Lease liabilities	39.778	-	39.778	100,00%
Beban Administrasi dan Umum General and administrative expenses	24.322	59.192	(34.870)	(58,91%)
Fee Bank Bank fees	23.357	19.770	3.587	18,14%
Lainnya Others	53.829	68.714	(14.885)	(21,66%)
Jumlah Akrual dan Utang Lain-lain Total Accruals and Other Payables	1.034.001	510.739	523.262	102,45%

Jumlah akrual dan utang lain-lain Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.034 miliar, meningkat 102,45% dari tahun sebelumnya sebesar Rp511 miliar. Peningkatan jumlah akrual dan utang lain-lain tersebut utamanya disebabkan meningkatkan jumlah IJP belum teridentifikasi dari Rp70 miliar di tahun 2019 menjadi Rp595 miliar di tahun 2020.

Jamkrindo's total accruals and other payables in 2020 was recorded at Rp1,034 billion, an increase of 102.45% from the previous year of Rp511 billion. The increase in accruals and other payables was mainly due to an increase in the number of unidentified IJP from Rp70 billion in 2019 to Rp595 billion in 2020.

Utang Pajak

Tax Payable

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Entitas Induk Parent Company	143.702	(152.333)	296.035	194,33%
Entitas Anak Subsidiary	4.327	(4.087)	8.414	205,87%
Jumlah Utang Pajak Total Tax Payable	148.029	(156.420)	304.449	194,64%

Jumlah utang pajak Perusahaan tahun 2020 meningkat signifikan menjadi Rp148 miliar, dimana pada tahun 2019 Perusahaan mencatat kelebihan pajak sebesar Rp152 miliar. Peningkatan utang pajak tersebut disebabkan meningkatnya utang pajak entitas induk yaitu sebesar Rp296 miliar menjadi Rp144 miliar di tahun 2020, sedangkan utang pajak entitas anak meningkat Rp8 miliar di tahun 2020.

Total the Company's tax payable in 2020 increased significantly to IDR148 billion, where in 2019, the Company recorded a tax overpayment of IDR152 billion. The increase in tax payable was due to the increase in the tax payable of parent entity by IDR296 billion to IDR144 billion in 2020, while the tax payable of subsidiaries increased IDR8 billion in 2020.

Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan

Liabilities for Financial Guarantee Contracts

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat	4.907.747	3.509.642	1.398.105	39,84%
Konsumsi Consumptive	2.309.634	2.537.665	(228.031)	(8,99%)
Produktif Productive	488.112	535.408	(47.296)	(8,83%)
PEN	38.047	-	38.047	100,00%
Suretyship	82.827	83.570	(743)	(0,89%)
Jumlah Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan Prepaid re-guarantee	7.827.367	6.666.285	1.161.082	17,42%

Jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp7.827 miliar, meningkat 17,42% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.666 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan KUR sebesar Rp1.398 miliar menjadi Rp4.908 miliar.

Total Liabilities for Financial Guarantee Contracts in 2020 recorded of IDR7,827 billion, an increase of 17.42% compared to the previous year of IDR6,666 billion. This increase was mainly due to total liabilities for KUR financial guarantee contracts of IDR1,398 billion to IDR4,908 billion.

Liabilitas Imbalan Kerja

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp85 miliar, meningkat sebesar Rp32 miliar atau 59,93% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp27 miliar. Peningkatan tersebut terutama dari komponen liabilitas imbalan kerja dalam bentuk program pensiun manfaat pasti.

Perusahaan telah menyelenggarakan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan tetapnya. Aset program manfaat pasti dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI. Program tersebut memberikan manfaat JHT dan THT yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau berhenti, sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

Post Employed Benefits Liabilities

The amount of employment benefit liabilities as of December 31, 2020 amounted to IDR85 billion, an increase of IDR32 billion or 59,93% compared to the position of 31 December 2019 of IDR27 billion. The increase is mainly from the component of employment benefit liabilities in the form of defined benefit plans.

The company have carried out defined benefit plan (JHT) and THT and also defined contribution program (DPLK) for all permanent employees. This defined benefit asset program managed by PT Asuransi Jiwasraya which the founding have got endorsement from The Finance Minister RI. The program give JHT and THT benefit which will be paid to employees at the time of employees pension or desist, as according to regulation of the pension fund.

Ekuitas

Equity

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity attributable to equity holders of the parent entity				
Modal Saham: Share capital:				
· Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp 1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham Series A Dwiwarna - nominal value IDR1,365,160 (full amount) par value per share				
· Seri B - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham Series B - nominal value IDR1,000,000 (full amount) par value per share				
Modal dasar: Authorised capital:				
· Seri A Dwiwarna - 1 saham Series A Dwiwarna - 1 share				
· Seri B - 30.000.000 saham Series B - 30,000,000 shares				
Modal ditempatkan dan disetor penuh: Issued and fully paid:				
· Seri A Dwiwarna - 1 saham Series A Dwiwarna - 1 share				
· Seri B - 7.638.732 saham Series B - 7,638,732 shares				
	7.638.733	-	7.638.733	0,00%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Penyertaan modal negara <i>The Government's share capital</i>	-	7.638.733	(7.638.733)	-100,00%
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja <i>Remeasurement of post-employment benefits</i>	(27.494)	(13.928)	(13.566)	97,40%
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak <i>Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax</i>	(73.352)	(230.860)	157.508	-68,23%
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya <i>Appropriated retained earnings</i>	861.844	1.085.206	(223.362)	-20,58%
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya <i>Unappropriated retained earnings</i>	456.133	198.910	257.223	129,32%
	8.855.864	8.678.061	177.803	2,05%
Kepentingan non-pengendali <i>Non-controlling interest</i>	15	14	1	7,14%
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	8.855.879	8.678.075	177.804	2,05%

Jumlah ekuitas Jamkrindo tahun 2020 meningkat 2,05% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp8.678 miliar di tahun 2019 menjadi Rp8.855 miliar di tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp178 miliar menjadi Rp8.856 miliar di tahun 2020.

Total Jamkrindo's equity in 2020 increased by 2.05% compared to the previous year, from IDRR8,678 billion in 2019 to IDR8,855 billion in 2020. The increase was due to an increase in Unappropriated retained earnings of IDR178 billion to IDR8,856 billion in 2020.



LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
PENDAPATAN PENJAMINAN <i>GUARANTEE INCOME</i>				
Imbal Jasa Penjaminan <i>Gross guarantee fees</i>	2.826.524	2.313.611	512.913	22,17%
Imbal jasa kafalah <i>Gross kafalah fees</i>	500.292	331.501	168.791	50,92%
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan <i>Increase in unearned kafalah fees</i>	(140.126)	(88.315)	(51.811)	58,67%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Premi penjaminan ulang Re-guarantee premiums	(553.297)	(404.725)	(148.572)	36,71%
Imbal jasa penjaminan bersih Net guarantee income	2.633.393	2.152.072	481.321	22,37%
BEBAN PENJAMINAN GUARANTEE EXPENSES				
Beban klaim Claim expenses				
Beban klaim Claim expenses	2.180.243	2.204.814	(24.571)	(1,11%)
Klaim penjaminan ulang Re-guarantee claims	(372.871)	(408.432)	35.561	(8,71%)
Beban ujah Ujah expenses	32.224	25.427	6.797	26,73%
Biaya kafalah lainnya Other kafalah expenses	216	0	216	100,00%
Kenaikan cadangan klaim Increase in claim reserves	527.290	435.083	92.207	21,19%
Pendapatan Subrogasi Bersih Subrogation income - net	(518.767)	(504.806)	(13.961)	2,77%
Pendapatan ujah penjaminan ulang Re-guarantee ujah income	(17.935)	(14.127)	(3.808)	26,96%
Jumlah beban klaim Total Claim expenses	1.830.400	1.737.959	92.441	5,32%
Penjaminan bersih Net guarantee	802.993	414.113	388.880	93,91%
Komisi - bersih Commission - net	(27.195)	(48.138)	20.943	(43,51%)
Pendapatan investasi - bersih Investment income - net	799.211	782.810	16.401	2,10%
Beban usaha Operating expenses	(903.670)	(991.759)	88.089	(8,88%)
Pendapatan lain-lain Others income	51.130	24.612	26.518	107,74%
LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE TAX	722.469	181.638	540.831	297,75%
Beban pajak final Final tax expense	(118.307)	(139.147)	20.840	(14,98%)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PROFIT BEFORE INCOME TAX	604.162	42.491	561.671	1321,86%
(Beban)/manfaat pajak penghasilan Income tax (expense)/benefit	(148.029)	156.420	(304.449)	(194,64%)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN NET PROFIT FOR THE YEAR	456.133	198.911	257.222	129,32%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali imbalan kerja Items that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of post employment benefit	(20.251)	3.184	(23.435)	(736,02%)
Efek pajak terkait Related tax effect	6.685	(796)	7.481	(939,82%)
	(13.566)	2.388	(15.954)	(668,09%)
Kerugian yang belum terealisasi aset keuangan yang tersedia untuk dijual Unrealised losses on financial assets available for sale	(12.737)	(31.022)	18.285	(58,94%)
Efek pajak terkait Related tax effect	0	0	-	0,00%
	(12.737)	(31.022)	18.285	(58,94%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan yang belum terealisasi aset keuangan yang tersedia untuk dijual Items that will be Reclassified to profit or loss: Unrealised gains financial assets available for sale	133.520	128.483	5.037	3,92%
Efek pajak terkait Related tax effect	(17.737)	2.485	(20.222)	(813,76%)
	115.783	130.968	(15.185)	(11,59%)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak Other comprehensive income for the year, net of tax	89.480	102.334	(12.854)	(12,56%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR	545.613	301.245	244.368	81,12%
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	456.312	198.913	257.399	129,40%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	1	(2)	3	(150,00%)
	456.313	198.911	257.402	129,41%
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA: COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	545.612	301.247	244.365	81,12%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interest	1	(2)	3	(150,00%)
	545.613	301.245	244.368	81,12%

Imbal Jasa (Pendapatan) Penjaminan ("IJP") Bersih

Net Guarantee Fee ("IJP")

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Imbal jasa penjaminan Gross guarantee fees	2.826.524	2.313.611	512.913	22,17%
Imbal jasa kafalah Gross kafalah fees	500.292	331.501	168.791	50,92%
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan Increase in unearned kafalah fees	(140.126)	(88.315)	(51.811)	58,67%
Premi penjaminan ulang Re-guarantee premiums	(553.297)	(404.725)	(148.572)	36,71%
Imbal jasa penjaminan bersih Net guarantee income	2.633.393	2.152.072	481.321	22,37%

Tahun 2020 Jamkrindo membukukan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bersih sebesar Rp2.633 miliar, naik 22,37% dibandingkan IJP Bersih tahun sebelumnya sebesar Rp2.152 miliar. Peningkatan IJP Bersih tersebut sejalan dengan peningkatan IJP Perusahaan, khususnya IJP KUR yang meningkat 28,93%. Tahun 2020 Perusahaan juga mencatat IJP dari Program PEN sebesar Rp124 miliar.

In 2020 Jamkrindo booked net guarantee income amounted to IDR2,633 billion, an increase 22.37% compared to net guarantee income in the previous year of IDR2,152 billion. The increase in net guarantee income was according to the Company's guarantee income, especially in KUR guarantee income was increased by 28.93%. In 2020, the Company recorded also guarantee income from PEN Program amounted to IDR124 billion.

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat	1.957.907	1.518.547	439.360	28,93%
Kredit Konsumtif Consumptive credit	380.628	401.352	(20.724)	(5,16%)
Kredit Produktif Productive Credit	303.335	301.709	1.626	0,54%
PEN	123.965	0	123.965	100,00%
Suretyship	68.365	97.935	(29.570)	(30,19%)
Restitusi IJP Guarantee restitution	(7.676)	(5.932)	1.744	29,40%
Jumlah Imbal Jasa Penjaminan Total Guarantee Fee	2.826.524	2.313.611	512.913	22,17%

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka waktu kredit. Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan,

Guarantee Fee (IJP) is the premium received by the company in order to secure credit activities. The amount of IJP is measure from IJP rate, credit limit, and credit period. For existing credits, the amount of IJP rate is determined by considering such as: product of guarantee, guarantee risk, and guarantee period. IJP is paid in advance. Meanwhile Rates of KUR Guarantee Fee is regulated

IJP dibayar sekaligus di muka. Sedangkan Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014 tanggal 1 Oktober 2014 mengatur IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan April dan Oktober.

in Minister of Finance Regulation Number 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning KUR Guarantee facility and Ministry of Finance Regulation No.190/PMK.05/2014 dated October 1, 2014 regulated IJP KUR paid once a year by the government with billing period in April and October.

Beban Klaim

Claim Expenses

Uraian Description	2020	2019	dalam juta Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat	1.203.536	1.229.433	(25.897)	(2,11%)
Konsumtif Consumptive	485.183	587.463	(102.280)	(17,41%)
Produktif Productive	362.865	311.007	51.858	16,67%
Suretyship	128.659	76.911	51.748	67,28%
Jumlah Beban Klaim Total Claim Expenses	2.180.243	2.204.814	(24.571)	(1,11%)

Jumlah beban Klaim Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.180 miliar, turun 1,11% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.205 miliar. Penurunan beban klaim tersebut utamanya disebabkan meningkatnya beban klaim kredit konsumtif sebesar Rp102 miliar. dan kredit usaha rakyat sebesar Rp26 miliar.

Total the Company's Claim Expenses in 2020 was recorded at IDR2,180 billion, an decrease of 1.11% compared to 2019 of IDR2,205 billion. The decrease in claim expenses was mainly due to the increasing Claim Expense - in consumptive credit amounting to IDR102 billion. and kredit usaha rakyat of IDR26 billion.

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Claim expenses are expenses incurred as a result of credit loss due to the risks covered by the company. The number of claims that can be paid by the company to the Recipient of Guarantee include of principal payable, interest payable and penalties that can not be met by the Guaranteed at the time of loan maturity and the credit can not be extended again or before the due credit according to existing agreements.

Pendapatan Investasi - Bersih

Investment Income - Net

Uraian Description	2020	2019	dalam juta Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Bunga Deposito Time Deposit Interest	382.815	486.672	(103.857)	(21,34%)
Bunga Obligasi Bond Interest	199.733	170.800	28.933	16,94%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Pendapatan Reksadana <i>Mutual Fund Income</i>	180.236	87.419	92.817	106,17%
Pendapatan Sukuk <i>Sukuk Income</i>	15.704	10.958	4.746	43,31%
Dividen <i>Dividend</i>	6.067	8.360	(2.293)	(27,43%)
Pendapatan Capital Gain Saham <i>Capital Gain Share Interest</i>	14.078	37.628	(23.550)	(62,59%)
Efek Beragunan Aset <i>Security (Assets Underlying)</i>	4.929	4.715	214	4,54%
	803.562	806.552	(2.990)	(0,37%)
Beban Investasi <i>Investment Expense</i>	(4.351)	(23.742)	19.391	(81,67%)
	799.211	782.810	16.401	2,10%

Tahun 2020 Perusahaan membukukan pendapatan investasi bersih sebesar Rp799 miliar, meningkat 2,10% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp783 miliar. Peningkatan tersebut utamanya diperoleh dari peningkatan bunga obligasi dan pendapatan reksadana yang masing-masing meningkat 16,94% dan 106,17%. Namun demikian, pendapatan *capital gain* saham tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp38 miliar di tahun 2019 menjadi Rp14 miliar di tahun 2020.

In 2020 the Company posted a net investment income of IDR799 billion, increased by 2.10% compared to the previous year of IDR783 billion. The increase was mainly derived from the increase in bond interest and mutual fund income which increased by 16.94% and 106.17%, respectively. In addition, Capital Gain Share Interest income also decreased significantly, namely from IDR38 billion in 2019 to IDR14 billion in 2020.

Beban Usaha

Operating Expenses

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Beban Operasional <i>Operating Expenses</i>	181.062	188.919	(7.857)	(4,16%)
Beban Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Expenses</i>	450.652	438.636	12.016	2,74%
Beban Administrasi Kantor dan Umum <i>General and Administrative Expenses</i>	161.348	141.205	20.143	14,27%
Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha <i>Technology, System and Development Expenses</i>	26.222	41.054	(14.832)	(36,13%)
Jumlah Beban Usaha <i>Total Operating Expenses</i>	819.283	809.813	9.470	1,17%

Jumlah beban usaha Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp819 miliar, meningkat 1,17% dari tahun sebelumnya Rp810 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan meningkatnya beban sumber daya manusia dan beban administrasi dan umum masing-masing sebesar Rp12 miliar dan Rp20 miliar. Di tahun 2020, Perusahaan berhasil melakukan efisiensi operasional yang ditunjukkan dengan penurunan beban operasional sebesar 4,16% menjadi Rp181 miliar dari Rp189 miliar di tahun 2019.

Total Jamkrindo's operating expenses in 2020 amounted to IDR819 billion, an increase of 1.17% from the previous year of IDR810 billion. The increase in operating expenses was due to increased Human Resources Expenses and General and Administrative Expenses of IDR12 billion and IDR 20 billion, respectively. In 2020, the Company managed to perform operational efficiency indicated by a decrease in operating expenses by 4.16% IDR181 billion from IDR189 billion in 2019.

Pendapatan (Beban) Lain - Bersih

Other Income (Expenses) - Net

Uraian Description	2020	2019	dalam juta Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Pendapatan non-operasional Non-operational Income	44.334	14.566	29.768	204,37%
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	4.550	5.117	(567)	(11,08%)
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan Administration guarantee income	2.178	4.925	(2.747)	(55,78%)
Pendapatan Gedung Building income	57	0	57	0,00%
Pendapatan Administrasi BUM Administration expenses BUM	11	4	7	175,00%
	51.130	24.612	29.768	204,37%

Tahun 2020, Jamkrindo membukukan pendapatan lain-lain sebesar Rp51 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp30 miliar atau 204,37% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar Rp25 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan peningkatan pendapatan non-operasional menjadi Rp44 miliar dari Rp15 miliar di tahun 2019.

In 2020, Jamkrindo posted other incomes of IDR51 billion, an increase of IDR30 billion or 204.37% compared to the same period in 2019 of IDR25 billion. The increase was mainly due to the increase in non-operational income to IDR44 billion from IDR15 billion in 2019.

Laba Sebelum Pajak

Income Before Tax

Pada tahun 2020, Perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp722 miliar, naik signifikan dibandingkan laba sebelum pajak tahun sebelumnya sebesar Rp182 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjaminan bersih Perusahaan tahun 2020.

In 2020, the Company posted an income before tax of IDR722 billion, significantly increase compared to income before tax in the previous year of IDR182 billion. The decrease was primarily due to the Increase in the Company's net guarantee in 2020.

Beban Pajak Penghasilan Bersih

Income Tax Expenses-Net

Beban pajak penghasilan bersih Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp118 miliar dari tahun sebelumnya Rp139 miliar.

The Company's net income tax expense in 2020 was recorded at IDR118 billion from the previous year of IDR139 billion.

Laba Tahun Berjalan

Tahun 2020, Perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp456 miliar, meningkat 129,32% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp199 miliar.

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain

Tahun 2020, Perusahaan membukukan pendapatan komprehensif sebesar Rp89 miliar, turun 12,56% dari tahun sebelumnya Rp102 miliar.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp546 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp301 miliar.

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2020 adalah sebesar Rp456 miliar, naik sebesar Rp257 miliar atau 129,40% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp199 miliar. Sedangkan laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp1 juta, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar -Rp2 juta..

Current Year Income

In 2020, the Company posted a current year income of IDR456 billion, a increase 129,32% compared to 2019 of IDR199 billion.

Other Comprehensive Income (Expense)

In 2020, the Company posted comprehensive income of IDR89 billion, an decrease of 12,56% from the previous year of IDR102 billion.

Comprehensive Income The Year

The Company's comprehensive income the year 2020 was recorded at IDR546 billion, increased from IDR301 billion in the previous year.

Comprehensive income the year attributable to Equity Holders of The Parent Entity in 2020 amounted to IDR456 billion, increased by IDR257 billion or 129.40% compared to 2019 of IDR199 billion. Meanwhile, comprehensive income the year attributable to Non-controlling Interest amounted to IDR1 million, an increase compared to -IDR2 million in 2019.

LAPORAN ARUS KAS

Statements of Cash Flows

Uraian Description	2020	2019	dalam juta Rupiah in million Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi <i>Cash Flow From Operating Activities</i>	299.192	(220.746)	519.938	(235,54%)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi <i>Cash Flow From Investment Activities</i>	113.299	(280.031)	393.330	(140,46%)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flow From Financing Activities</i>	(400.000)	(39.754)	360.246	906,19%
Kenaikan/Penurunan (Bersih) Kas Dan Setara Kas <i>Increase /Decreased (Net) In Cash and Cash Equivalents</i>	12.491	(479.091)	491.582	102,61%
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash and Equivalents at The Beginning of Year</i>	88.614	567.705	(479.091)	(84,39%)
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash and Equivalents at The End of Year</i>	101.105	88.614	12.491	14,10%

Jumlah kas dan setara kas Perusahaan pada akhir tahun tercatat sebesar Rp101 miliar, meningkat 14,10% atau sebesar Rp12 miliar dibandingkan posisi pada awal tahun sebesar Rp89 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan arus kas dari aktivitas operasi.

The Company's cash and cash equivalents at the end of year stood at IDR101 billion, an increase of 14.10% or IDR12 billion compared to the position at the beginning of year of IDR89 billion. The increase was primarily attributable to increased in cash flow from operating activities.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Cash Flow From Operating Activities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan <i>Receipt from Guarantee Fee</i>	2.803.781	2.811.560	(7.779)	(0,28%)
Pembayaran klaim dari mitra penjaminan ulang <i>Payment to Co-Guarantee Partners</i>	504.954	597.229	(92.275)	(15,45%)
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya <i>Receipt from Other Operating Activities</i>	601.528	137.055	464.473	338,90%
Pembayaran IJP Co-guarantee <i>Payment of Fee</i>	(485.850)	(550.507)	(64.657)	(11,74%)
Pembayaran Klaim <i>Payment of Claims</i>	(1.982.871)	(1.980.739)	(2.132)	0,11%
Pembayaran Biaya <i>Payment of Expenses</i>	(448.844)	(671.060)	222.216	(33,11%)
Pembayaran kepada karyawan <i>Payment to employee</i>	(437.366)	(433.870)	(3.496)	0,81%
Pembayaran pajak penghasilan <i>Payment of income tax</i>	(256.140)	(130.414)	(125.726)	96,41%
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi <i>Net cash provided from operating activities</i>	299.192	(220.746)	519.938	(235,54%)

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat pendapatan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp299 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp520 miliar dibandingkan tahun 2019, yang mencatat penggunaan kas bersih sebesar Rp221 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena peningkatan penerimaan aktivitas operasi lainnya yang meningkat menjadi Rp602 miliar dari Rp137 miliar di tahun 2019.

In 2020, the Company recorded net cash income for operating activities of IDR299 billion, an increase of IDR520 billion compared to 2019, which recorded a net cash use of IDR221 billion. The increase was mainly due to the increase in Receipt from Other Operating Activities amounted to IDR602 billion from IDR137 billion in 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investment Activities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Penerimaan Hasil Investasi <i>Receipt from Return of Investment</i>	911.311	863.116	48.195	5,58%
Penempatan Investasi yang Diperkenankan <i>Placement of Allowed Investment</i>	(912.436)	(1.196.913)	(284.477)	(23,77%)
Pembelian Aset Tetap <i>Acquisition of Fixed Assets</i>	114.424	115.206	(782)	(0,68%)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi <i>Net cash provided from investing activities</i>	113.299	(280.031)	393.330	140,46%

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat penerimaan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp113 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp393 miliar dibandingkan tahun 2019, yang mencatat pengeluaran bersih sebesar Rp280 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena adanya peningkatan penerimaan investasi sebesar Rp48 miliar atau 5,58%.

In 2020, the Company recorded net cash receipts from investment activities amounting to IDR113 billion, an increase of IDR393 billion compared to 2019, which recorded net cash receipts of IDR280 billion. The increase was mainly due to the increase in investment activity of IDR48 billion or 5.58%.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Dividen Penerimaan (Pembayaran) Dividen Dividend	(400.000)	(39.754)	(360.246)	906,19%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net cash provided from financing activities	(400.000)	(39.754)	(360.246)	906,19%

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp400 miliar yang digunakan untuk pembayaran dividen, meningkat sebesar Rp360 miliar dari tahun sebelumnya Rp40 miliar.

In 2020, the Company recorded net cash used for funding activities amounting to IDR400 billion used for dividend payments, an increase of IDR360 billion from the previous year of IDR40 billion.

RASIO KEUANGAN UTAMA

Key Financial Ratios

	2020	2019
Margin Keuntungan Profit Margin	21,05%	6,19%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	24,80%	67,74%
Rasio Laba terhadap Ekuitas Return on Equity (ROE)	5,20%	2,33%
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	186,26%	207,24%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Net Profit Margin	16,14%	8,60%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset Return on Asset (ROA)	4,03%	1,14%
Rasio Lancar Current Ratio	219,19%	205,18%



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

The Company's Ability to Pay Debts and Collectibility of Receivables

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Perusahaan.

The Company's ability to pay debts is reflected in the Company's liquidity and solvency.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Sesuai dengan POJK No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Lembaga Usaha Penjamin Pasal 43 ayat (2), rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).

Ability to Pay Short-Term Debt

Based on POJK No. 2 / POJK.05 / 2017, dated January 11, 2017, concerning the Execution of Guarantor Business Institutions, the guarantor's liquidity ratio is set at a minimum of 120% (one hundred twenty per hundred).

Rasio lancar menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Sekalipun mengalami penurunan, terlihat bahwa pada posisi 31 Desember 2020 Perusahaan masih dalam kondisi likuid dengan tingkat likuiditas yang masih berada jauh di atas ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Peraturan OJK sebagaimana tersebut di atas.

The current ratio illustrates the Company's ability to pay current liabilities or debt that are due immediately when billed as a whole. Even though it has decreased, it could be seen that as of December 31, 2020, the Company was still in a liquid condition with a liquidity level that was still far above the minimum threshold stipulated in the OJK Regulations as mentioned above.

Selain menggunakan rasio lancar, Perusahaan menggunakan rasio cash flow to debt untuk mengukur tingkat risiko likuiditasnya yaitu dengan membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas dikurangi dengan pendapatan ditangguhkan. Risiko likuiditas perusahaan pada posisi 31 Desember 2020 sejumlah 219,19% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 205,18%.

In addition to using the current ratio, the Company uses cash flow to debt ratio to measure the level of liquidity risk by comparing the amount of cash and cash equivalents with the number of liabilities minus deferred income. The Company's liquidity risk as of December 31, 2020, was 219.19% increased compared to 2019, which amounted to 205.18%.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Dalam mengukur tingkat solvabilitas Perusahaan digunakan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*) yang menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa penjaminan, rasio tersebut dapat dilihat dari tingkat kesehatan Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

Ability to Pay Long-Term Debt

In measuring the Company's solvency level, the debt to equity ratio is used that shows the ability of the Company to pay all of its obligations both short and long term. As a SOEs engaged in guarantee services, the ratio can be seen from the Company's soundness level as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, concerning Indicators of Soundness Level Assessment of Financial Services State-Owned Enterprises in the Field of Insurance and Guarantee Services Business.

Pada tanggal 31 Desember 2020 rasio DER PT Jamkrindo adalah sebesar 186,26%, menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan memenuhi kewajibannya cukup baik, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, angka DER Perusahaan mencapai 207,24%.

As of December 31, 2020, the DER ratio of PT Jamkrindo was 186.26%, indicating that the Company's ability to meet its obligations was quite good, decrease compared to 2019, the Company's DER reached 207.24%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam industri penjaminan istilah kolektibilitas piutang diartikan sebagai aging piutang yaitu umur piutang yang belum dilakukan pembayaran. Berikut data umur dan saldo piutang Kredit Program Pemerintah (KUR dan PEN) per Desember 2020 beserta pembayaran piutang selama tahun 2020:

Collectibility of Receivables

In the guarantee industry, the term collectibility of receivables is interpreted as the aging of trade receivables namely the age of receivables that have not been paid. The following data on the aging of trade receivables and balance of Government Program Credit Receivables (KUR and PEN) as of December 2020 along with receivables payments during 2020:

Umur Piutang Aging of Trade Receivables	Outstanding Piutang Outstanding Receivables			Pembayaran Piutang Receivable Payment		
	KUR Gen 1 KUR Gen 1	KUR Gen 2 KUR Gen 2	PEN PEN	KUR Gen 1 KUR Gen 1	KUR Gen 2 KUR Gen 2	PEN PEN
>120	99,060,267,764					
>108	119,009,582,145					
>96	244,770,412,230					
>84	1,066,126,537,652					
>60		16,869,406,569				
>48		73,324,232,527				
>36		127,958,929,542				
>24		198,190,516,448				
>12		556,057,584,967				
0 - 12		1,994,125,043,609	935,798,302			
Total	1,528,966,799,791	2,916,525,713,661	935,798,302	8,941,509,896	1,453,494,235,315	386,848,045,208

Adapun data umur dan saldo piutang Mitra Mitigasi Risiko per Desember 2020 beserta pembayaran piutang selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Data on the aging of trade receivables and balance of Risk Mitigation Partners Receivables as of December 2020 along with receivables payments during 2020 are as follows:

1. Umur Piutang

1. Aging of Trade Receivables

Kriteria Umur Piutang Aging of Trade Receivables	PT Heksa Solution Insurance	PT Asuransi Jiwasraya	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT BRI Insurance	PT Reasuransi Nasional Indonesia	PT Reasuransi Indonesia Utama
>120 Bulan >120 Months	4,350,000.00					
>96 Bulan >96 Months	371,494,640.50					
>84 Bulan >84 Months	1,422,479,125.00					
>72 Bulan >72 Months	6,186,652,473.90					
>60 Bulan >60 Months	10,351,836,452.62					
>48 Bulan >48 Months	14,350,779,218.59			336,164,556.12		
>36 Bulan >36 Months	10,261,284,137.68	52,903,385.00		741,613,915.05		
>24 Bulan >24 Months	2,103,890,045.28	121,905,298.40		389,945,863.41		44,715,918,878.58
>12 Bulan >12 Months	344,807,243.96	682,689,517.32		124,791,860.76	103,165,141,721.32	27,151,523,956.86
	1,720,763,582.01	2,035,892,894.14	6,579,997,471.46	12,442,591,218.99	183,999,371,579.03	41,060,474,879.58
Total	47,118,336,919.53	2,893,391,094.86	6,579,997,471.46	14,035,107,414.33	287,164,513,300.34	112,927,917,715.01

2. Pembayaran Piutang Selama Tahun 2020

2. Receivables Payment in 2020

No.	Mitra Mitigasi Risiko Risk Mitigation Partner	Penggantian Pembayaran Klaim Claim Reimbursement
1	PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH	21,122,420,691
2	PT HEKSA SOLUTION INSURANCE	14,538,284,116
3	PT ASURANSI JIWasRAYA	433,309,034
4	PT ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA	463,006,447
5	PT BRI INSURANCE	9,541,860,161
6	PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA	84,106,972,305
7	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA	35,125,694,158
	Jumlah Total	165,331,546,911



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Capital Structure Policies

Rincian Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Capital Structure Details

The Company's capital structure as of December 31, 2020 can be described in the following table:

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020		2019		Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
	Rp IDR	%	Rp IDR	%	Rp IDR	%
Liabilitas Liabilities	10.266.950	53,69%	8.092.195	48,25%	2.174.755	26,87%
Ekuitas Equity	8.855.879	46,31%	8.678.075	51,75%	177.804	2,05%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas Total Liabilities, Temporal Syirkah Fund and Equity	19.122.829	100%	16.770.270	100%	2.352.559	14,03%
Rasio DER DER Ratio	-	186,26%	-	207,18%	-	(10,12%)

Komposisi struktur modal Perusahaan tahun 2020 adalah 45,53% berasal dari liabilitas dan 53,69% berupa ekuitas, komposisi ini relatif sama dengan tahun sebelumnya.

The Company's capital structure composition in 2020 is 45.53% derived from liabilities and 53.69% in the form of equity, this composition is relatively the same as the previous year.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Perusahaan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan dalam mengelola sumber pembiayaan. Penggunaan ekuitas harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna menjaga kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya. Oleh sebab itu, Perusahaan juga membentuk cadangan-cadangan yang bersumber dari laba ditahan. Sampai dengan tahun 2020, struktur modal Jamkrindo masih didominasi oleh ekuitas.

Management Policy on Capital Structure

The Company has a policy to emphasize the use of equity owned by the Company in managing financing sources. The use of equity must be implemented effectively and efficiently in order to maintain the company's ability to carry out its business operations. Therefore, the Company also establishes reserves derived from retained earnings. Until 2020, Jamkrindo's capital structure is still dominated by equity.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebutuhan permodalan Perusahaan senantiasa direncanakan, dibahas dan dipantau secara rutin pada rapat Komite Permodalan dengan didukung oleh analisis data yang lengkap dan memadai. Dasar penetapan kebijakan atas struktur modal Perusahaan senantiasa berlandaskan pada beberapa pertimbangan, di antaranya estimasi ekonomi, potensi pertumbuhan bisnis, risk appetite, dan target rasio permodalan.

Basic Management Policy on Capital Structure

The Company's capital needs are always planned, discussed and monitored regularly at meetings of the Capital Committee supported by a complete and adequate data analysis. The policy basis for establishing the Company's capital structure is always based on several considerations, including economic estimation, business growth potential, risk appetite, and capital ratio targets.

Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Management policy on capital structure is based on protecting the Company's ability to maintain business continuity so that it can still provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

Perusahaan mematuhi peraturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015, dimana rasio maksimum untuk Debt to Equity (DER) yang diperbolehkan untuk tujuan pajak adalah 4:1. Pada tahun 2020, DER yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 1,86. Dengan kondisi tersebut, rasio hutang terhadap modal Perusahaan masih berada pada kategori yang baik.

The Company complies with the prevailing tax regulation, namely Regulation of the Minister of Finance No.169/PMK.010/2015, where the maximum ratio for Debt to Equity (DER) allowed for tax purposes is 4:1. By 2020, der owned by the Company is 1.86. With these conditions, the Company's debt-to-capital ratio is still in the good category.



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitments for Capital Expenditures

Sepanjang tahun 2020, Jamkrindo tidak melakukan ikatan dengan pihak manapun terkait investasi barang modal.

Throughout 2020, Jamkrindo does not have commitment with any party related to capital expenditures.



INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Investment In Capital Expenditures Realized in the Financial Year

Jenis Investasi <i>Types of Investment</i>	Tujuan Investasi <i>Objective</i>	Nilai Investasi <i>Value</i>
Tanah <i>Land</i>		35.493
Bangunan Kantor <i>Buildings</i>		12.143
Perumahan Dinas <i>Perumahan Dinas</i>		231
Inventaris Kantor <i>Office Inventory</i>		25.169
Inventaris Rumah Dinas <i>Inventaris Rumah Dinas</i>		735
Kendaraan Bermotor <i>Vehicles</i>		140
Aset dalam penyelesaian <i>Aset dalam penyelesaian</i>		8.339
Jumlah Investasi <i>Jumlah Investasi</i>		82.250

Jumlah investasi barang modal yang dikeluarkan Perusahaan di tahun 2020 mencapai Rp82 miliar, yang digunakan untuk pembelian aset tetap dalam bentuk tanah, bangunan kantor, inventaris kantor, kendaraan bermotor, inventaris rumah dinas dan aset TI. Investasi barang modal tersebut utamanya ditujukan untuk penunjang operasional Perusahaan dan sekaligus sebagai investasi Perusahaan.

Total the Company's capital expenditures in 2020 reached IDR82 billion, which is used for the purchase of fixed assets in the form of land, buildings, office inventory, vehicles, houses equipment and IT assets. The investment of capital expenditures is primarily intended to support the Company's operations and at the same time as the Company's investment.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts that Occur after The Date of The Accountant's Report

Terdapat beberapa informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan yang dilaporkan sebagai berikut:

There is some material information and facts in subsequent events which is reported as follows:

1. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan menilai pada umumnya, peraturan pelaksana tersebut tidak akan memiliki dampak buruk terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.

1. Omnibus Law

In February 2021, the Government officially enacted 49 implementing regulations of the Omnibus Law. The Company assessed that generally there is no potential adverse impact of the Law to the Company's business and operation.

Pada saat laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

As at the authorisation date of this consolidated financial statement, the Company is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Omnibus Law, as well as the impact on the Company's consolidated financial statements.

2. Perubahan anggaran dasar

Pada 10 Februari 2021, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Notaris Hadijah, S.H No. 13 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2021 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0175918. Berikut adalah perubahan atas modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham:

2. The amendment of articles of association

On 10 Februari 2021, there was an amendment to the Company's Articles of Association, notarized by Notarial Deed No. 13 by Hadijah, S.H. regarding the change in authorised capital, issued and fully paid capital, and share ownership. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-AH.01.03-0175918 dated 19 March 2021. Below are the changes of authorised capital, issued and fully paid capital and shareholder ownership:

	2021	2020	
Modal Ditempatkan dan Disetor (Rp juta) <i>Issued and fully paid capital (IDR million)</i>	10,638,733	7,638,733	
10 Februari 2021 <i>February 10, 2021</i>			
Pemegang saham <i>Shareholders</i>	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (Rp juta) <i>Total issued and fully paid shares (IDR million)</i>	Persentase kepemilikan (%) <i>Percentage of ownership</i>	Jumlah <i>Total</i>
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	10,638,732	99,99%	10.638.732
Pemerintah Republik Indonesia <i>The Government of the Republic of Indonesia</i>	1	0,01%	1
	10,638,733	100,00%	10,638,733

3. Perubahan susunan dewan direksi Pada tanggal 22 Maret 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. SK-93/MBU/03/2021 – No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jamkrindo. Dan telah memenuhi uji kelayakan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S-3020/NB.111/2021.

3. Changes of board of directors

On March 22, 2021, there are changes in the composition of the Company's Board of Directors based on Decree of the Ministry of State Owned Enterprises No. 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the PT Jamkrindo. And has met the fit and proper test by the Financial Services Authority with No. S-3020/NB.111/2021.

	22 Maret 2021 <i>March 22, 2021</i>	31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i>
Dewan Direksi <i>Board of Directors</i>		
Direktur Utama <i>President Director</i>	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan <i>Business Guarantee Director</i>	Suwarsito	Amin Mas'udi
Direktur Operasional dan Jaringan <i>Operational and Network Director</i>	Kadar Wisnuwarman	Kadar Wisnuwarman
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Umum dan Kepatuhan <i>Director of Human Resources Management, General affair and Compliance</i>	Sulis Usdoko	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Finance, Investment and Risk Management Director</i>	I. Rusdonobanu	I. Rusdonobanu

Pada tanggal 18 Januari 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. SK-19/MBU/01/2021 - No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrindo.

On January 18, 2021, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners based on the Decree of the Ministry of SOEs No. SK 19/MBU/01/2021 - No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo.

Berdasarkan salinan keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Based on the copy of the decision above, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

	18 Januari 2021 January 18, 2021	18 Januari 2021 January 18, 2021
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Komisaris Utama President Commissioner	Sri Mulyanto	Sri Mulyanto
Komisaris Commissioner	Hernita Alius	Diah Natalisa
Komisaris Commissioner	Noor Ida Khomsiyati	Noor Ida Khomsiyati
Komisaris Commissioner	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni
Komisaris Commissioner	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi



PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI, SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Comparison of Targets And Realizations, as Well as Projections for the Next Year

Perbandingan Target dan Realisasi

Comparison of Targets and Realizations

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Target RKAP 2020 Target RKAP 2020	Realisasi 2020 Realization 2020	Pencapaian RKAP Achievements of RKAP
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Revenues	2.177.498	2.633.393	120,94%
Beban Klaim Claim Expenses	(1.182.858)	(2.180.243)	184,32%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	994.641	802.993	80,73%
Pendapatan Investasi Investment Income	524.272	799.211	152,44%
Beban Usaha Operating Expenses	(821.201)	(903.670)	110,04%
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(259.349)	51.130	119,71%
Laba Sebelum Pajak Income before Tax	438.364	722.469	164,81%
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	327.881	456.133	139,12%

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan bisnis tahun 2020 yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Perusahaan melakukan revisi terhadap RKAP tahun 2020. Secara umum, Perusahaan dapat mencapai target-target yang ditetapkan dalam RKAP Revisi 2020 tersebut.

Taking into account the economic and business conditions in 2020 affected by the COVID-19 pandemic, the Company revised the RKAP in 2020. In general, the Company can achieve the targets set in the Revised RKAP 2020.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Bersih yang dibukukan Perusahaan tahun 2020 mencapai 120,94% dari target yang ditetapkan. Pendapatan investasi mencapai 152,44% dari target dan laba tahun berjalan mencapai 164,81% dari target RKAP Revisi 2020.

Net Guarantee Revenues recorded by the Company in 2020 reached 120.94% of the target set. Investment income reached 152.44% of the target and current year income reached 164.81% of the revised RKAP target in 2020.

Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Projections for the Next Year

Memasuki tahun 2021, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2021 yang telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Adapun beberapa target utama Perusahaan antara lain:

Entering 2021, the Company has set a number of targets set out in the 2021 RKAP that have been approved by Shareholders. The Company's main targets include:

Uraian Description	Target RKAP 2021 RKAP Target 2021
Pendapatan Penjaminan <i>Guarantee Income</i>	3.685.142
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	2.074.698
Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee</i>	1.410.766
Pendapatan Investasi <i>Investment Income</i>	752.793
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	1.045.937
Pendapatan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i>	(291.248)
Laba Sebelum Pajak <i>Income before Tax</i>	826.374
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Income</i>	575.029

dalam juta Rupiah | in million Rupiah



KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Policies and Dividend Distribution

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Dasar kebijakan pembagian dividen Perusahaan berlandaskan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pembagian dividen dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan.

The policy basis for the Company's dividend distributions is based on Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where dividend distribution is carried out in accordance with the Annual GMS resolutions.

Perusahaan berusaha untuk memperhatikan hak para pemegang saham tanpa mengabaikan kondisi keuangan Perusahaan. Keputusan pembagian dividen Perusahaan dikaitkan dengan, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun fiskal dan kewajiban Perusahaan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi keuangan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ke depan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian dividen.

The Company strives to consider the rights of its shareholders without neglecting the Company's financial condition. The decision to distribute dividends of the Company is related to, among others, net profit obtained in the fiscal year and the Company's obligation to allocate reserve funds in accordance with applicable rules and financial conditions of the Company. In addition, the Company also considers the future growth rate and expansion plans in dividend distribution decisions.

Kronologis Pembagian Dividen

Berikut ini adalah ringkasan pembayaran dividen untuk periode tahun buku 2019 dan 2018:

Chronological Dividend Distribution

The following is a summary of dividend payments for the period of financial year 2019 and 2018:

Uraian Description	Tahun Buku 2019 Financial Year of 2019	Tahun Buku 2018 Financial Year of 2018
Laba Bersih (Rp penuh) Net Income (full IDR)	625.778.145.622	397.543.371.999
Jumlah Dividen (Rp penuh) Total Dividend (full IDR)	400.000.000.000	39.754.000.000
Payout Ratio (%) Payout Ratio (%)	64%	10%
Tanggal Pengumuman Date of Announcement	30 Juni 2020	29 Mei 2019
Tanggal Pembayaran Date of Payment		27 Juni 2019

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA Contribution to the Country

Selain memberikan dividen, Jamkrindo juga memberikan kontribusi kepada Negara dalam bentuk pajak. Tahun 2020, Jamkrindo telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dengan rincian sebagai berikut:

In addition to providing dividends, Jamkrindo also contributes to the State in the form of taxes. In 2020, Jamkrindo has fulfilled all of its tax obligations with the following details:

Jenis Pajak Types of Tax	2020	2019
PPh Pasal 29 Corporate income tax Article 29	132.345	19.896
PPh Pasal 21 Corporate income tax Article 21	8.589	7.164
PPh Pasal 23 Corporate income tax Article 23	334	453
PPh Pasal 4 ayat 2 Corporate income tax Article 4 (2)	146	541

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Jenis Pajak Types of Tax	2020	2019
PPH Pasal 22 Corporate income tax Article 22	23	41
PPH Pasal 26 Corporate income tax Article 26	-	36
Total Total	143.075	29.942

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Share Ownership Program by Employees and/or Management

Hingga akhir tahun 2020, Jamkrindo tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP). Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait *stock option* yang dimiliki pekerja dan manajemen, baik jumlah saham dan harga *exercise*, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

By the end of 2020, Jamkrindo does not implement a share ownership program by management and/or employees (ESOP/MSOP). As such, this Annual Report does not present information regarding stock options owned by employees and management, either the number of shares and exercise price, term, employee requirements and/or entitled management.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of the Use of Funds Resulting from the Public Offering

Jamkrindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Sampai dengan akhir tahun 2020, Perum Jamkrindo belum melaksanakan Penawaran Saham Umum di bursa efek manapun. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari kegiatan Penawaran Saham Umum Perusahaan

Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (SOE) whose 100% shares are owned by the State. Until the end of 2020, Jamkrindo has not conducted a Public Offering at any stock exchange. As such, this Annual Report does not present information related to the total acquisition of funds, the plan of use of funds, details of the use of funds, the balance of funds and the approval date of the General Meeting of Shareholders of the Company's Public Offering activities

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTUKRISASI UTANG/MODAL

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation of Business, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Tidak terdapat informasi dan fakta material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2020.

There is no material information and facts regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring conducted by the Company in 2020.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Information Regarding Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, Jamkrindo tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transactions Containing Conflicts of Interest

During 2020, Jamkrindo does not conduct material transactions containing conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transactions with Affiliated Parties

The Business Group conducts transactions with related parties as defined in PSAK 7 (Revised 2010), "Disclosure of Related Parties".

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Names and Nature of Related Relationships

Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relationships</i>	Sifat Transaksi <i>Nature of Transactions</i>
Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan <i>The Government of Republic Indonesia through the Ministry of Finance</i>	Pemegang Saham <i>Controlling Shareholder</i>	Piutang IJP KUR ; Pendapatan IJP KUR <i>IJP KUR Receivables; IJP KUR Revenue</i>
Dewan Pengawas dan Direksi <i>Supervisory Council Members and Directors</i>	Manajemen Kunci <i>Key Management</i>	Gaji dan Tunjangan Dewas <i>Salaries and Allowances</i>

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

Prinsip Umum

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan sebagai upaya mengatur hubungan antar organ dalam entitas usaha; baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada perundang-undangan dan etika berusaha. Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik dari prinsip GCG secara konsisten dan menyeluruh, yang tentunya berlandaskan pada hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bagi Jamkrindo, GCG menjadi salah satu pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa mendatang.

Di Indonesia GCG didasarkan pada prinsip metode pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel, yang kemudian berelasi langsung terhadap pengelolaan organisasi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang sehat.

General Principle

Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism created as an effort to regulate relations between organs in business entities; both internal and external relations based on legislation and business ethics. The Company always strives to implement the best practices of GCG principles consistently and comprehensively, based on relationships with all stakeholders.

For Jamkrindo, GCG is one of the main pillars of the concept of sustainability development, which is expected to form the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing the company's sustainable performance in the future.

In Indonesia, GCG is based on the principles of accountable decision-making methods and management of business entity activities, which are related to sustainable organizational management and a healthy investment climate.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Approach

Kepatuhan/Compliance

Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
To the prevailing laws and regulations

Etika Berusaha/Business Ethics

Sebagai cermin perilaku dunia usaha yang sehat
As a reflection of healthy business behavior



Iklim Investasi yang Baik dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan

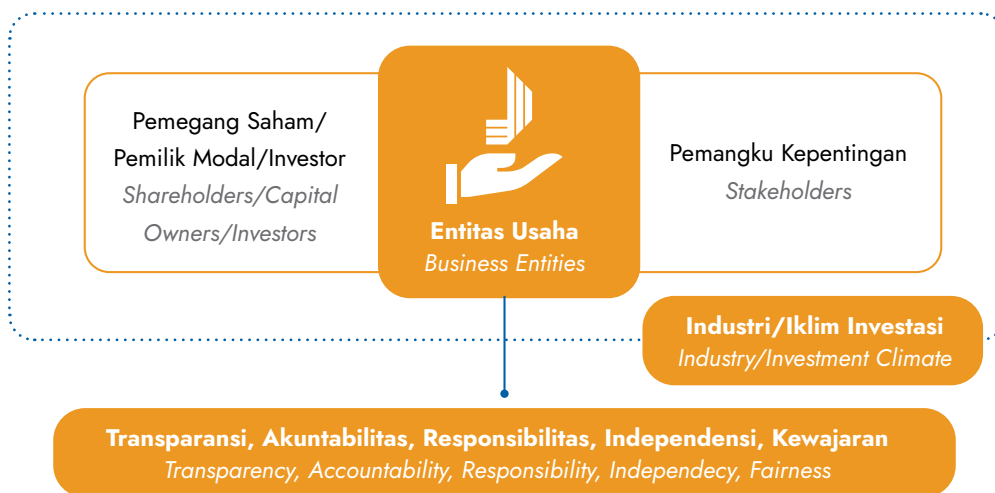
Good Investment Climate and Sustainable Growth

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkungan Perusahaan, evaluasi secara berkala dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

In line with the development of the business world, the principles of GCG have also developed which include a supervisory and control system that supports work ethics and responsible decision making, supports integrity in financial reporting, proper risk management, and ethically based stakeholder and company relationships. Within the Company, periodic evaluations are conducted on the implementation of GCG to ensure the implementation of the GCG principles in a comprehensive manner.

Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Harmonization of Business Entities with Shareholders and Stakeholders



Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada budaya Perusahaan yang berorientasi pada kepuasan konsumen, proaktif terhadap perubahan lingkungan usaha, bersikap jujur, berpikir positif dan berdedikasi tinggi, bekerja tekun dan disiplin dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi Perusahaan. Nilai-nilai budaya Jamkrindo ini telah diimplementasikan di seluruh jajaran Jamkrindo yang juga merupakan kode etik Jamkrindo sehingga manajemen dan karyawan memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam berfikir dan bertindak sehingga membawa Jamkrindo mencapai tujuan.

The Company is committed to implementing GCG principles based on a corporate culture that is oriented towards customer satisfaction, proactive in changing the business environment, being honest, positive thinking and highly dedicated, working diligently and disciplined by prioritizing the interests of the Company, always improving professionalism to achieve value-added for the Company. Jamkrindo's cultural values have been implemented in all levels of Jamkrindo which are also Jamkrindo's code of ethics so that management and employees have clear and measurable references in thinking and acting to bring Jamkrindo to achieve its goals.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Praktik GCG dikembangkan Jamkrindo sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implemetasi GCG di lingkup keorganisasian di lingkungan Jamkrindo, di mana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif. Dalam mengimplementasikan GCG, Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No.47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Basis of Good Corporate Governance Implementation

GCG practices were developed by Jamkrindo as a commitment to continue to innovate to improve the implementation of GCG in the organizational sphere within Jamkrindo, where this gives the Company the confidence to face every challenge ahead and become a business entity with competitive competence. In implementing GCG, Jamkrindo refers to several laws and regulations, especially Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and Law No.47 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This law provides a comprehensive foundation for the management aspects of the organization; starting from the rights and obligations of shareholders, duties, and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the Company's relationship with internal and external stakeholders.

Sebagai entitas usaha dimana Pemerintah Indonesia menjadi Pemegang Saham, penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN adalah:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

As a business entity in which the Government of Indonesia is the shareholder, the implementation of GCG in the scope of the Company also refers to the Regulation of the Minister of SOEs No.PER-01/MBU/2011 concerning Stipulation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012, which states that GCG is the principles that underlie a process and mechanism for managing a company based on legislation and business ethics. The implementation of GCG principles which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness is a solid foundation for the sustainability of the Company's business activities. In addition, the implementation of GCG that refers to best practices will increase the trust of Shareholders and stakeholders which will lead the Company to significant and sustainable progress.

Based on the SOE Ministerial Regulation, the goals of implementing GCG principles in SOE business entities are:

1. *Optimizing the value of SOEs so that companies have strong competitiveness, both nationally and internationally.*
2. *Encouraging the management of SOEs in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering functions and increasing the independence of company organs.*
3. *Encouraging company organs in making decisions and conducting actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of BUMN's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around SOEs.*
4. *Increase the contribution of SOEs to the national economy.*
5. *Improving a conducive climate for the development of the national investment.*

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Principles of Implementing Good Corporate Governance*

Transparansi
Transparency

Independensi
Independence

Akuntabilitas
Accountability

Kewajaran
Fairness

Pertanggungjawaban
Responsibility

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi

The principle of GCG implementation used by the Company refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 and the General Guidelines for GCG from the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the principles of GCG commonly known as TARIF, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in all Company Organs, including Shareholders, Board of Commissioners and Directors as stated in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of

dan Dewan Komisaris Jamkrindo No.88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Jamkrindo No.88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 dated December 3, 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance for Indonesian Public Companies (Perum) Credit Guarantees, with the following details:

Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Principles of Good Corporate Governance</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independence</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	1. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain <i>merger</i>, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansional <i>Clear disclosure of planned extraordinary transactions, including mergers, acquisitions, sales of Company assets in substantial amounts.</i> 2. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris <i>Disclosure in figuring out the income of the Board of Directors and the Board of Commissioners</i>	Pemegang Saham mempunyai tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan <i>Shareholders have the responsibility to watch the implementation of GCG principles in the Company's management process and ensure that all Company management follows the laws and regulations</i>	Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku <i>Shareholders are not allowed to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the board of directors following the applicable laws and regulations</i>	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan <i>Conduct the usual procedures in deciding the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners so that objectively the right person is obtained according to the qualifications required by the Company</i>	Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris <i>Shareholders are entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Board of Directors and or the Board of Commissioners</i>
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	1. Dibuat risalah rapat Dewan Komisaris yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan <i>Minutes of the Board of Commissioners' meeting is made showing the dynamics of the meeting in the decision-making process</i>	1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif <i>The Board of Commissioners is responsible for supervising the implementation of the Company's strategy and requires the implementation of accountability and providing advice to the Board of Directors to manage the Company effectively</i>	1. Dewan Komisaris harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya <i>The Board of Commissioners must commit to follow the laws and regulations related to the duties of their position.</i> 2. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham <i>The Board of Commissioners is responsible for performing its duties to the Shareholders</i>	1. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan <i>Provide objective considerations in solving problems faced by the Company that may have potential conflicts of interest</i>	Dewan Komisaris dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan stakeholders <i>The Board of Commissioners in conducting their positions will always apply the Company's business ethics to fulfil the interests of stakeholders</i>

Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Pertanggungjawaban Responsibility	Kemandirian Independence	Kewajaran Fairness
	2. Kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan <i>The attendance of each member of the Board of Commissioners and the implementation of the meeting of the Board of Commissioners are reported in the Company's Annual Report</i> 3. Remunerasi Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan <i>The remuneration of the Board of Commissioners is reported in the Company's Annual Report</i>	2. Pemberdayaan fungsi Dewan Komisaris <i>Empowerment of the functions of the Board of Commissioners</i>	3. Dewan Komisaris turut bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan direksi kepada Pemegang Saham <i>The Board of Commissioners is also responsible for the correctness of the financial statements given by the Board of Directors to the Shareholders</i>	2. Dewan Komisaris tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerja sama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin <i>The Board of Commissioners is not authorized to make management decisions on the day-to-day management of the Company, such as decisions about the appointment and dismissal of employees or the signing of routine collaborations or contracts.</i>	
Direksi Directors	1. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada stakeholder secara transparan <i>Providing Company Activity and Financial Reports as a tool to disclose financial transactions and Company performance to stakeholders in a transparent manner</i> 2. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan diantaranya disajikan melalui website Perusahaan <i>Disclosing information and the Company's Financial Statements, including those presented through the Company's website.</i>	1. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan stakeholder <i>The Board of Directors must be able to place a priority order to fulfil the interests of stakeholders.</i> 2. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan <i>The Board of Directors builds and sets up an effective Internal Control System to secure the Company's assets.</i>	1. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan <i>The Board of Directors must commit to follow the laws and regulations related to the Company's operations</i> 2. Direksi bertanggung jawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan <i>The Board of Directors is responsible for the material presented in the Financial Statements.</i>	Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya <i>The composition of the Board of Directors must enable the Board of Directors to act independently in the sense that they do not have interests that can interfere with their ability to perform their duties independently and critically concerning one another</i>	1. Penerapan sistem reward dan punishment yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja <i>The application of an adequate reward and punishment system so that every employee gets a sense of justice is associated with success in achieving performance</i> 2. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan stakeholder <i>Implementing the Company's business ethics to fulfil stakeholder interests</i>

Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Principles of Good Corporate Governance</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independence</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
	1. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan <i>Disclosing salaries and other income of directors in the Annual Report</i>	3. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen. <i>The Board of Directors empowers the role and function of SPI as a strategic management partner</i> 4. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya <i>The Board of Directors must ensure that SPI has access to information on the Company that is necessary to be able to perform its duties</i>	3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh stakeholder <i>The Board of Directors is responsible for disclosing Financial Report information in national publication media so that stakeholders can access it</i>		

Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2003.
 - Undang Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - Undang Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Legal Foundation

The implementation of GCG within the Company refers to several regulations/laws that apply in Indonesia, including:

- Law of the Republic of Indonesia
 - Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN).
 - Law of the Republic of Indonesia No.47 of 2007 concerning Limited Liability Companies
 - Law of the Republic of Indonesia No.1 of 2016 concerning Guarantee.
 - Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No.31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
 - Law of the Republic of Indonesia No.28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
 - Law of the Republic of Indonesia No.15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by the Law of the Republic of Indonesia No.25 of 2003.
 - Law of the Republic of Indonesia No.14 of 2008 concerning Information Disclosure.
 - Law of the Republic of Indonesia No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
- Government Regulation
 - Government Regulation No.35 of 2018 concerning Indonesian Credit Guarantee Public Companies (Perum).

- b. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
 3. Peraturan Menteri BUMN
 - a. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara
 - d. Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
 - g. Peraturan Menteri BUMN No.PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara
 - h. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05 MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
 4. Keputusan Menteri BUMN
 - a. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
 5. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- b. *Government Regulation No.38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation No.6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property.*
 - c. *Government Regulation No.45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of BUMN.*
 3. *Regulation of the Minister of SOEs*
 - a. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, and amendment No.PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.*
 - b. *SOE Minister Regulation No.PER-01/MBU/06/2017 concerning the Second Amendment to the SOE Ministerial Regulation No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*
 - c. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises*
 - d. *SOE Minister Regulation No.PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises*
 - e. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*
 - f. *SOE Minister Regulation No.PER-02/MBU/2013 dated February 18, 2013, on Guidelines for Compilation of Information Technology Management for SOEs.*
 - g. *SOE Minister Regulation No.PER-10/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervision Board of State-Owned Enterprises*
 - h. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-05 MBU/2006 concerning the Audit Committee for SOEs.*
 4. *Decree of the Minister of SOEs*
 - a. *Decree of the Secretary of the State Minister for SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN.*
 5. *General Guidelines for Indonesian GCG by the National Committee for Governance Policy (KNKG).*

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Jamkrindo

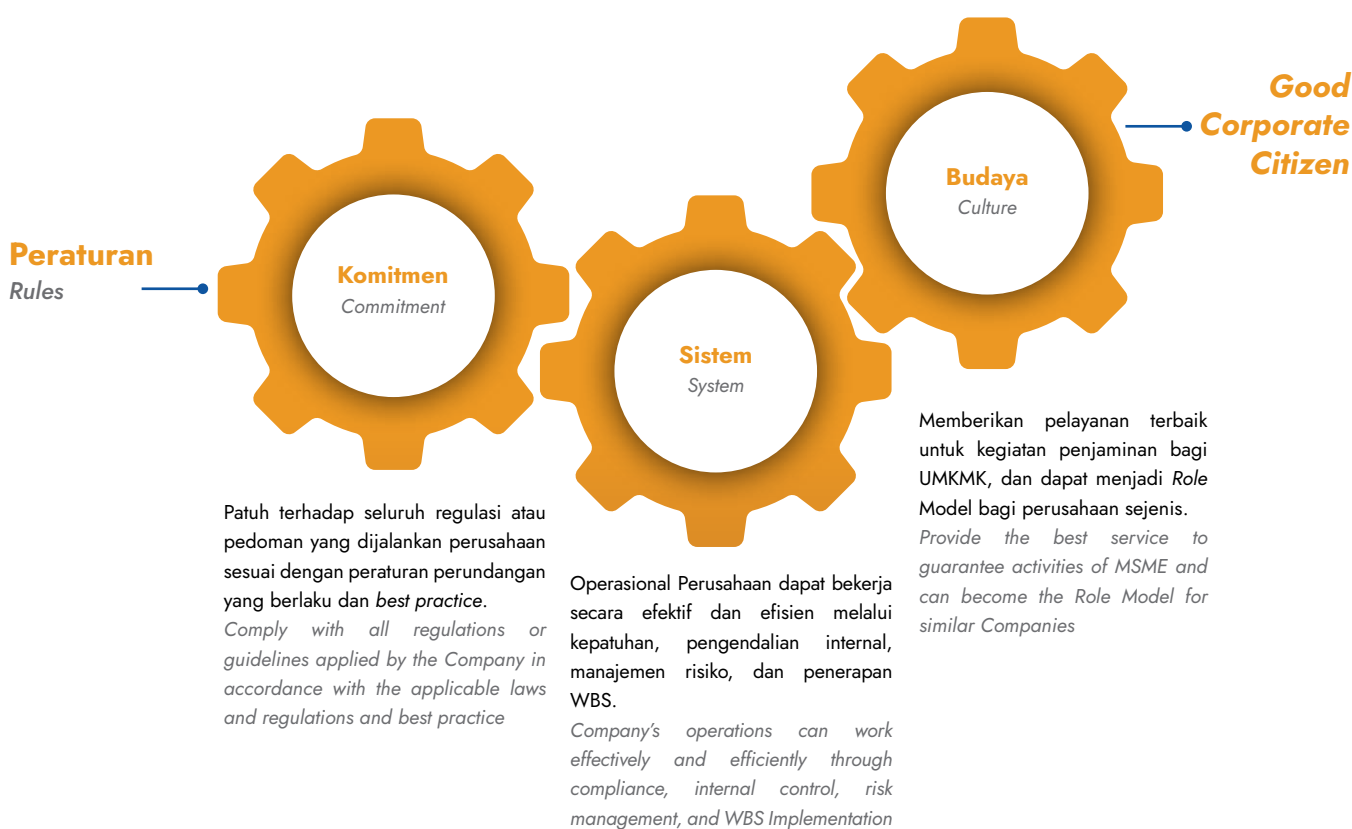
Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

Improving the Quality of Jamkrindo's GCG Implementation

The GCG process is a method or mechanism carried out by the company and management in implementing GCG principles to carry out their functions and duties following the applicable laws and regulations. The commitments, GCG structure, systems, and procedures that have been prepared by the Company aim to create added value for stakeholders through effective and efficient professional management of the company.

Jamkrindo has a Roadmap in implementing GCG principles to achieve Good Corporate Citizen with the following mechanism:



Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

Commitment

In implementing these GCG principles, all Jamkrindo personnel is committed to following all applicable laws and regulations, as well as those applicable. Support from management plays a key role in deciding the direction and goals of GCG implementation at Jamkrindo. In practice, the Management of Jamkrindo is an example for employees to continue to be committed to the implementation of sustainable GCG. Jamkrindo will apply GCG principles in every business process and improve GCG supporting tools.

Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Budaya

Nilai-nilai budaya Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Jamkrindo, maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta benchmark bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

System

In supporting the commitment of sustainable GCG at Jamkrindo, a company operational system is needed that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, an adequate internal control system, and good risk management as well as the implementation of an effective violation reporting system.

Culture

Jamkrindo's cultural values are the basis for the Company's personnel to work more clearly and structured. In the context of implementing Jamkrindo's GCG, all Jamkrindo personnel is committed to implementing corporate cultural values that are in line with GCG principles.

The purpose of Jamkrindo's GCG implementation is to become a Guarantee Company that provides value to stakeholders through effective and efficient management of the Company by creating cultural values to increase the level of trust, build the Company's image (brand image), and good corporate reputation and benchmarks for other similar companies as described below:

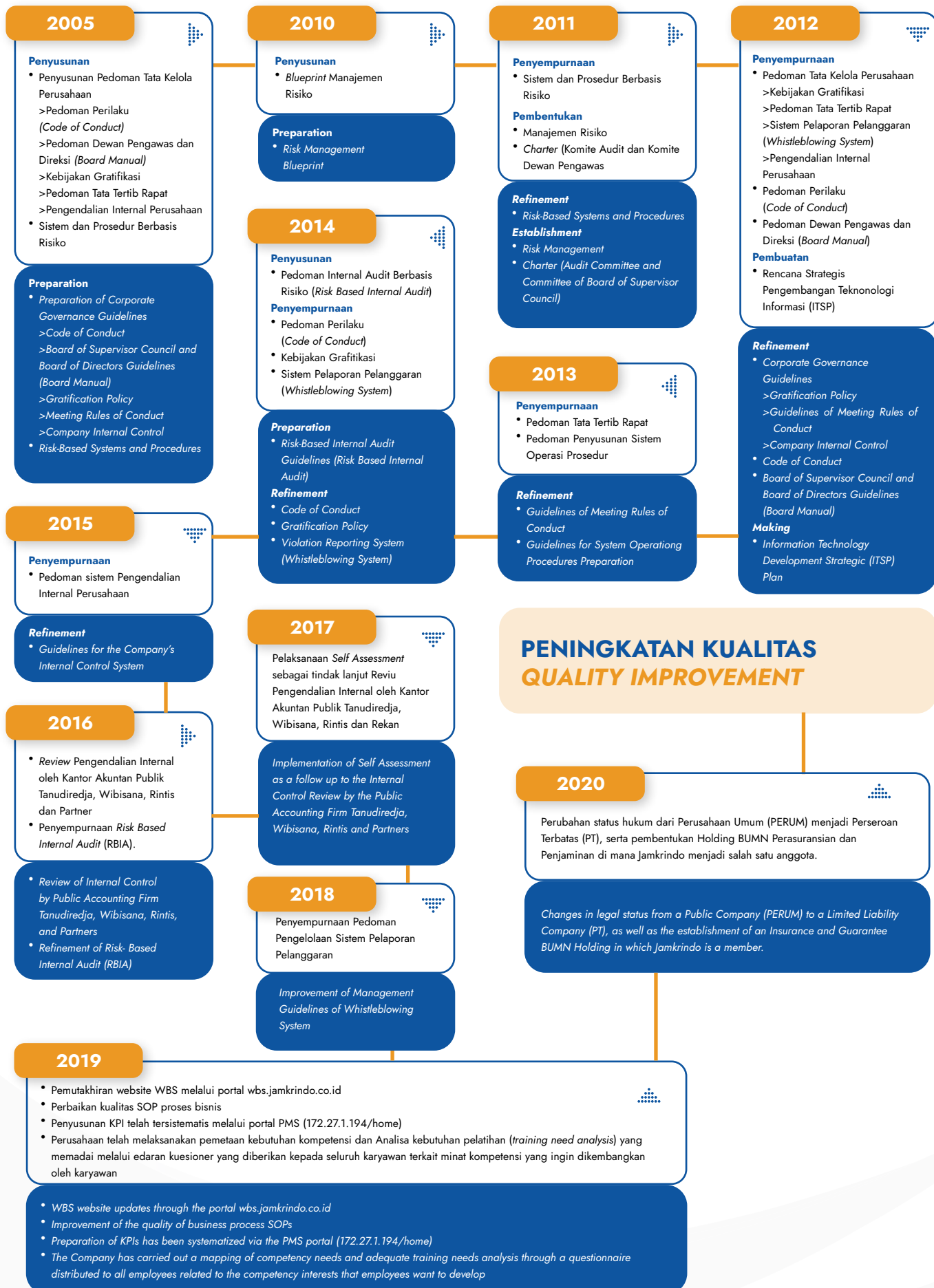
Menuju Tata Kelola Perusahaan yang Lebih Baik dan Penciptaan Nilai-Nilai Budaya

Towards Better Corporate Governance and the Creation of Cultural Values



Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Track Record of Development of Good Corporate Governance Implementation





HASIL TATA KELOLA: EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Governance Results: Evaluation and Monitoring of Corporate Governance Implementation

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuan pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas penerapan GCG pada Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

As a form of commitment to implementing GCG principles, Jamkrindo assesses the implementation of GCG within the Company. The assessment is conducted using 2 (two) models, namely through a self-assessment or evaluation conducted by the Company's internal team, and an assessment conducted by an independent party. The purpose of the assessment on the implementation of GCG at Jamkrindo refers to the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, are:

- 1. Measuring the quality of the company's GCG implementation through evaluating the level of fulfilment of the GCG criteria with the real conditions applied to Jamkrindo, by giving a score/ value for the implementation of GCG and the category of the quality of its implementation.*
- 2. Find the strengths and weaknesses of the company's GCG implementation and propose recommendations for improvement to reduce the gap between the GCG criteria and the implementation of Jamkrindo.*
- 3. Monitor the consistency of GCG implementation at Jamkrindo and obtain input for the improvement and development of corporate governance policies within the company.*

The results of the assessment are expected to be the basis for improving and improving the implementation of GCG practices at Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practices is also expected to provide benefits to encourage the management of the Company in a transparent, professional, and efficient manner so that it can increase the value of the Company in the form of a trend of high Company performance, and a good corporate image, and the trust of stakeholders (service users, employees, and society as a whole) to Jamkrindo.

The basis for the implementation of the assessment/evaluation of the implementation of GCG at Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, and the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

6 (enam) Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012)

6 (six) Aspects of GCG Assessment
(Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012)



Hasil penilaian melalui metode ini menggunakan predikat dengan rentang skor sebagai berikut.

The results of the assessment through this method use predicates with a range of scores as follows.



Pengukuran dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2020

Measurement and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for Fiscal Year 2020

Penilaian juga dilakukan pada tahun buku 2020 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja No.04/SPK/UMU/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

An assessment was also conducted in the 2020 fiscal year to provide recommendations for continuous improvement of the Company's GCG implementation. The assessment process is conducted based on Work Order No.04/SPK/UMU/II/2021 dated February 15, 2021.

Jenis Penilaian Rating Type	:	Assessment
Penilai Assessor	:	PT Cita Negeri Amanah
Metode Penilaian Assessment Method	:	Indikator/Parameter Penilaian atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 Indicators/Parameters of Assessment on the Implementation of GCG SK16/S.MBU/2012
Tahun Buku Penerapan Fiscal Year of Application	:	1 Januari - 31 Desember 2020 January 1 - December 31, 2020
Periode Pengukuran Measurement Period	:	Februari - April 2021 February - April 2021
Waktu Terbit Laporan Publish Date	:	29 April 2021 April 29, 2021

Hasil penilaian penerapan GCG tahun 2020 mencapai total skor sebesar 96,810 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The results of the assessment of the implementation of GCG in 2020 reached a total score of 96.810 with the qualification "Very Good", which can be seen in the following table.

Aspek Aspect	Bobot Weight	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	
		1	2 (2/1 x 100)	3	(3/1 x 100)	
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,000	6,863	98,043	6,848	97,825	0,218
II Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and GMS</i>	9,000	8,926	99,175	8,944	99,374	(0,199)
III Dewan Pengawas/Dewan Komisaris <i>Supervisory Board/Board of Commissioners</i>	35,000	33,963	97,037	33,289	95,111	1,926
IV Direksi <i>Directors</i>	35,000	34,110	97,457	33,293	95,123	2,334
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,000	8,573	95,256	8,431	93,679	1,577
VI Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	4,375	87,500	5,00	100,00	(12,500)
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>	100,000	96,810	96,810	95,804	95,804	1,006
Peringkat Kualitas Penerapan GCG <i>GCG Implementation Quality Rating</i>		"SANGAT BAIK" "Very Good"		"SANGAT BAIK" "Very Good"		

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment

Assessment Implementation Quality Classification

Nilai di atas 85	Sangat Baik	Score above 85	Very Good
75 < Nilai ≤ 85	Baik	75 < Nilai ≤ 85	Good
60 < Nilai ≤ 75	Cukup Baik	60 < Nilai ≤ 75	Moderate
50 < Nilai ≤ 60	Kurang Baik	50 < Nilai ≤ 60	Poor
Nilai ≤ 50	Tidak Baik	Nilai ≤ 50	Bad

Hasil Area of Improvement (AOI) atau rekomendasi atas self assessment penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2020, serta ada atau tidak adanya kesamaan dengan hasil self assessment untuk tahun buku 2019 dan assessment untuk tahun buku 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The results of the Area of Improvement (AOI) or recommendations for the self-assessment of GCG implementation carried out for 2020, and whether or not there are similarities with the results of the self-assessment for the 2019 financial year and the assessment for the 2018 financial year can be seen in the table below.

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>			
1	Praktiknya, Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) yang disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.02/SKB/1/2020–KEP-09/DK-K/JAMKRINDO/XII/2020 tentang Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>). Namun, Pedoman Perilaku tersebut belum memuat Lembar Pernyataan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris. <i>In practice, the Company already has a Code of Conduct which is ratified based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No.02/SKB/1/2020–KEP-09/DK-K/JAMKRINDO/XII/2020 concerning the Code of Conduct (Code of Conduct). However, the Code of Conduct does not yet contain the Statement of Commitment Sheet for the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i>	x	x	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.4. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku,, dimana seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku. Direkomendasikan menambahkan Lembar Pernyataan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris ke dalam Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>). <i>To fulfil the suitability test of parameter No.4. The company creates a conducive situation to implement the Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Code) and the Code of Conduct, where all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners sign a commitment to follow the Code of Conduct.</i> <i>It is recommended to add the Statement of Commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Code of Conduct.</i>
2	Praktiknya, berdasarkan Silabus <i>Distance Learning</i> Pengangkatan Calon Karyawan PT Jamkrindo padan tahun 2020, belum terdapat materi terkait Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya yang masuk ke dalam Silabus <i>Distance Learning</i> tersebut. <i>In practice, based on the Distance Learning Syllabus for the Appointment of Prospective Employees of PT Jamkrindo in 2020, there is no material related to the Code of Conduct and technical regulations/implementation guidelines that are included in the Distance Learning Syllabus.</i>	x	x	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.4. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku, dimana Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses <i>introduction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru. Direkomendasikan menambahkan materi terkait Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya dalam proses <i>introduction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru. <i>To fulfil the suitability test of parameter No. 4. The Company creates a conducive situation to implement the Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Code) and the Code of Conduct, where the Code of Conduct and technical regulations/implementation guidelines are included in the induction process for new employees.</i> <i>It is recommended to add material related to the Code of Conduct and technical regulations/guidelines for its implementation in the induction process for new employees.</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>			
1	Dalam hal pengangkatan Suwarsito sebagai Direktur Bisnis dan Penjaminan menggantikan Amin Mas'udi meninggal pada 7 November 2020, diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-94/MBU/03/2021 dan Nomor 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia pada tanggal 22 Maret 2021. Dimana selama lebih dari 30 hari pengganti Direktur Bisnis dan Penjaminan dijabat oleh Pejabat Pelaksana Tugas. Pada masa itu Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi wewenang dan tugasnya melalui surat maupun telaah proses Talent BOD untuk mengajukan pejabat penggantinya. <i>If Suwarsito's appointment as Director of Business and Guarantee to replace Amin Mas'udi who passed away on November 7, 2020, the Decree of the Minister of SOEs Number SK-94/MBU/03/2021 and Number 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/ 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Guarantee Kredit Indonesia on March 22, 2021.</i> <i>Where for more than 30 days the replacement for the Director of Business and Guarantee is held by the Acting Officer. At that time the Board of Directors and the Board of Commissioners had fulfilled their authority and duties through letters as well as a review of the BOD Talent process to propose a replacement officer.</i>	x	x	Memenuhi uji kesesuaian parameter No.48 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi dimana perlu ditingkatkan tertib administrasi dalam dokumentasi terkait evidensi: 1. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu <i>Meets the parameter suitability test No.48 The Board of Commissioners/Supervisory Board approves the draft RKAP submitted by the Board of Directors where it is necessary to improve administrative order in the documentation related to evidence:</i> <i>1. Responses to the draft RKAP by the Board of Commissioners/Supervisory Board are given within a period</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i>			
1	Selain tidak ditentukan ada pedoman dalam <i>Board Manual</i> tahun 2012, terdapat kurang tertib administrasi dalam dokumentasi Dewan Komisaris terkait evidensi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal. <i>In addition to the absence of guidelines in the 2012 Board Manual, there is a lack of administrative order in the documentation of the Board of Commissioners regarding the evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board provides opinions and suggestions on the draft RKAP and is submitted to the GMS/Capital Owners for consideration of the decisions of the GMS/Capital Owners.</i>	x	✓	Memenuhi uji kesesuaian parameter No.48 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi dimana perlu ditingkatkan tertib administrasi dalam dokumentasi terkait evidensi: 1. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam <i>Board Manual</i>. 2. Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. 3. Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP. <i>Board Manual</i> telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Tentang Pedoman Kerja (<i>Board Manual</i>) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 03/ SKB/1/ XII/2020—KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan <i>Board Manual</i> tahun 2012. <i>Meets the parameter suitability test No.48 The Board of Commissioners/Supervisory Board approves the draft RKAP submitted by the Board of Directors where it is necessary to improve administrative order in the documentation related to evidence:</i> 1. Responses to the draft RKAP by the Board of Commissioners/Supervisory Board are given within the timeframe as stipulated in the Board Manual. 2. There is a conclusion that the draft RKAP is in line with and/or not in line with the RJPP. 3. Adequate quality of response from the Board of Commissioners/Supervisory Board to the draft RKAP. <i>The Board Manual has been updated through the Joint Decree on the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors Number 03/SKB/1/XII/2020—KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated 30 December 2020 replacing the 2012 Board Manual</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
2	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2020 dan RKAT tahun 2020 telah menjalankan kaidah <i>Board Manual</i> tahun 2020, karena masa berlaku <i>Board Manual</i> tahun 2020 adalah mulai 1 Januari 2021, maka asesmen tahun 2020 dinilai pedoman yang dipergunakan adalah <i>Board Manual</i> tahun 2012. <i>The 2020 Board of Commissioners Supervisory Task Report and 2020 RKAT have implemented the 2020 Board Manual rules, because the 2020 Board Manual is valid starting January 1, 2021, the 2020 assessment is considered the guideline used is the 2012 Board Manual.</i>	✕	✓	Memenuhi uji kesesuaian parameter No.52 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan dimana terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya namun tidak dituangkan dalam <i>Board Manual</i> 2012 . Tindak lanjut ini akan menjadi peningkatan skor pada asesmen tahun 2019. <i>Board Manual</i> telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Tentang Pedoman Kerja (<i>Board Manual</i>) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 03/ SKB/1/ XII/2020—KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan <i>Board Manual</i> tahun 2012. <i>Meets the parameter suitability test No. 52 The Board of Commissioners/Supervisory Board provides direction on the company's risk management where there is a policy of the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding supervision and providing advice on the company's risk management policy and its implementation but it is not stated in the 2012 Board Manual.</i> <i>This follow-up will be an increase in the score in the 2019 assessment.</i> <i>The Board Manual has been updated through the Joint Decree on the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors Number 03/ SKB/1/XII/2020 – KEP-07/DK-JAMKRINDO/ XII/2020 dated 30 December 2020 replacing the 2012 Board Manual.</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
3	Terdapat kekurangan tertib administrasi dalam dokumentasi Dewan Komisaris terkait evidensi: Penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. Meski tidak terdapat pedoman di <i>Board Manual</i> tahun 2012. <i>There is a lack of administrative order in the documentation of the Board of Commissioners regarding evidence:</i> <i>Assessment of the performance of the Board of Directors is based on a review of the criteria, targets, and key performance indicators included in the Board of Directors Management Contract individually with the realization of each achievement. Although there are no guidelines in the 2012 Board Manual.</i>	x	✓	Memenuhi uji kesesuaian parameter No.67. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal dimana perlu diperhatikan administrasi dokumen terkait penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. <i>Board Manual</i> telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Tentang Pedoman Kerja (<i>Board Manual</i>) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 03/ SKB/1/ XII/2020–KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan <i>Board Manual</i> tahun 2012. <i>Meets the parameter suitability test No.67. The Board of Commissioners/Supervisory Board assesses the Board of Directors and reports the results of the assessment to Shareholders/Capital Owners where it is necessary to pay attention to administrative documents related to the Board of Directors' performance assessment based on a review of the criteria, targets and key performance indicators included in the Board of Directors Management Contract individually with the realization of each achievement.</i> <i>The Board Manual has been updated through the Joint Decree on the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors Number 03/SKB/1/XII/2020–KEP-07/DK-JAMKRINDO XII/2020 dated 30 December 2020 replacing the 2012 Board Manual.</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
IV	Direksi <i>Directors</i>			
1	Praktiknya, berdasarkan konfirmasi, masih terdapat jabatan yang kosong dalam organisasi Perusahaan di tahun 2020. <i>In practice, based on confirmation, there are still vacant positions in the Company's organization in 2020.</i>	✓	✗	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.87. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (<i>core business</i>) perusahaan dimana terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan. Direkomendasikan melakukan tertib administrasi dalam dokumentasi terutama pada bagian SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan Perusahaan. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.87. The Board of Directors establishes operational policies and standard operating standards (SOP) for the company's core business processes in which there are SOPs for all core business processes of the company as a guide for carrying out company activities.</i> <i>It is recommended to carry out orderly administration in the documentation, especially in the SOP section for the Company's core business processes as a guide for carrying out Company activities.</i>
2	Praktiknya, berdasarkan konfirmasi, masih terdapat jabatan yang kosong dalam organisasi Perusahaan di tahun 2020. <i>In practice, based on the confirmation, there are still vacant positions in the Company's organization in 2020.</i>	✗	✓	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.91. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan, dimana terdapat penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Tidak terdapat jabatan yang kosong. Direkomendasikan mengisi lowongan jabatan pada setiap level jabatan dalam organisasi Perusahaan yang masih kosong. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.91. The Board of Directors places employees at all levels of office by job specifications and has a succession plan for all positions within the company, where there is the placement of employees at every level of position in the company's organization. There are no vacant positions.</i> <i>It is recommended to fill vacancies at every level in the Company's organization that are still vacant.</i>

No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Self Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Self Assessment</i> / <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
3	Praktiknya, Perusahaan belum memiliki kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>). Adapun isi dari kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) tersebut meliputi: <i>In practice, the Company does not yet have a regulatory policy for subsidiaries (subsidiary governance). The contents of the regulatory policy for subsidiaries (subsidiary governance) include:</i> 1. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya memuat: <i>Guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:</i> a. Penjaringan atau nominasi calon Direksi <i>Selection or nomination of candidates for the Board of Directors;</i> b. Penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris <i>Assessment/testing of the fit and proper test for candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners;</i> c. Proses penetapan calon Direksi dan Dewan Komisaris terpilih <i>The process of determining the selected candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i> 2. Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. <i>Performance appraisal system/guidelines for the Board of Directors (collegial and individual) and the Board of Commissioners (collegial), which contain at least the main performance indicators and success criteria.</i>	x	✓	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.104. Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan, di mana Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Direkomendasikan menyusun kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>). <i>To fulfill the suitability test of parameter No. 104. The Board of Directors implements regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance) and/or joint ventures, in which the Board of Directors establishes regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance) and joint ventures including the appointment of the Board of Commissioners/Supervisory Board and Directors, setting targets performance and performance appraisal as well as incentives for the Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors.</i> <i>It is recommended to develop regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance).</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
	3. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya memuat tentang: <i>Guidelines for salary/honorarium, allowances, and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners/ Supervisory Board include the following:</i> a. Formula perhitungan gaji/honorarium <i>Salary/honorarium calculation formula</i> b. Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (<i>benchmark</i>), kondisi persaingan usaha (<i>competitiveness</i>) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia. <i>The formula for calculating the salary/honorarium, allowances, and facilities takes into account income, assets, inflation rate, and considers the measured industrial sector (benchmark), conditions of business competition (competitiveness), or business complexity, and scarcity of Human Resources.</i>			
4	Praktiknya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Desk Subrogasi, dimana terdapat hasil pemeriksaan bahwa masih belum sesuai tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK. <i>In practice, based on the Subrogation Desk Examination Result Report, where there are examination results that there is still no appropriate follow-up on the recommendations of the BPK findings.</i>	✓	✗	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.108. Direksi menindak-lanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK), dimana terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK). Direkomendasikan menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.108. The Board of Directors follows up on the results of the SPI examination and external auditors (KAP and BPK), where there is the monitoring of follow-up on the results of the SPI examination and external auditors (KAP and BPK). It is recommended to complete the follow-up on the recommendations of BPK's findings.</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
5	Praktiknya, penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian kepada Pemegang Saham dengan cc Dewan Komisaris. <i>In practice, the submission of the Quarterly Management Report is submitted to the Board of Commissioners simultaneously with the submission to Shareholders with the cc of the Board of Commissioners.</i>	✓	✓	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.121. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, dimana Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. Direkomendasikan menyampaikan laporan manajemen triwulanan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang saham. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.121. The Board of Directors reports relevant information to the Shareholders and the Board of Commissioners/ Supervisory Board, where the Board of Directors submits quarterly and annual management reports as well as annual reports to the Board of Commissioners/ Supervisory Board before submission to Shareholders. It is recommended to submit quarterly management reports to the Board of Commissioners before submission to shareholders.</i>
6	Praktiknya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Desk Subrogasi, dimana terdapat hasil pemeriksaan bahwa masih belum sesuai tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK. <i>In practice, based on the Subrogation Desk Examination Result Report, where there are examination results that there is still no appropriate follow-up on the recommendations of the BPK findings.</i>	✓	✗	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.130 SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, dimana SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal, antara lain sebagai penanggung jawab Fungsi Audit Internal memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern (BPK, KAP, dll). Direkomendasikan menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK <i>To fulfill the suitability test of parameter No.130 SPI carries out internal supervision to provide added value and improve company operations, where SPI monitors the follow-up to recommendations from internal and external supervision, among others, as the person in charge of the Internal Audit Function, has guidelines for monitoring the follow-up to recommendations from internal and external supervision (BPK, KAP, etc.). It is recommended to complete the follow-up on the recommendations of BPK's findings</i>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
7	Praktiknya, penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian kepada Pemegang Saham dengan cc Dewan Komisaris. <i>In practice, the submission of the Quarterly Management Report is submitted to the Board of Commissioners simultaneously with the submission to Shareholders with the cc of the Board of Commissioners.</i>	✓	✓	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.132. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya, dimana Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu. Direkomendasikan menyampaikan laporan manajemen triwulanan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang saham. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.132. The Corporate Secretary carries out his functions, whereby the Quarterly and Annual Management Reports are submitted to the Board of Commissioners/ Supervisory Board on time.</i> <i>It is recommended to submit quarterly management reports to the Board of Commissioners before submission to shareholders.</i>
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>			
1	Perusahaan telah menyediakan laman perihal Tata Kelola perusahaan, antara lain: yang dapat diakses di: http://www.jamkrindo.co.id/gcg Namun informasi disampaikan sangat sederhana satu paragraf tidak memuat sesuai parameter No.139 Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan, salah satu uji kesesuaian terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan. <i>The company has provided a page regarding corporate governance, among others: which can be accessed at: http://www.jamkrindo.co.id/gcg. 139 The company's website publishes important company policies and information, one of the conformity tests includes published policies, including Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Code), Boards Manual, and Code of Conduct, and the Company's Gratification Control Program.</i>	✗	✓	Informasi terkait Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan tercantum pada situs https://www.jamkrindo.co.id/gcg. <i>Informasi terkait Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan tercantum pada situs https://www.jamkrindo.co.id/gcg.</i>

No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Self Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Self Assessment</i> / <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>			
1	Perusahaan selayaknya terdapat bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain. <i>Companies should have areas within the company, including products, processes, support functions, organizational performance, or strategies to become best practices or benchmark goals for other companies.</i>	x	✓	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.152 Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di Industrinya atau menjadi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses fungsi pendukung, kinerja organisasi dan strategi, dimana dengan pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya. Direkomendasikan meningkatkan kinerja bidang/area di Perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi, pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.152 Companies have fields/areas that become best practices in their industry or become benchmark goals for other companies (both BUMN and private companies). These fields/areas can consist of products, processes of supporting functions, organizational performance, and strategies, where the achievement of the best company performance in the BUMN business sector or the industry.</i> <i>It is recommended to improve the performance of areas/areas in the Company, including products, processes, functions, supports, organizational performance, or strategies to become best practices or benchmark goals for other companies</i>

✓ = Terdapat dalam rekomendasi *Self Assessment* penerapan GCG tahun buku 2019 dan/atau dan *Assessment* untuk tahun buku 2018

x = Tidak terdapat dalam rekomendasi *Self Assessment* penerapan GCG tahun buku 2019 dan/atau dan *Assessment* untuk tahun buku 2018

✓ = It is contained in the *Self Assessment* recommendations for the implementation of GCG for the 2019 financial year and/or and the *Assessment* for the 2018 financial year

x = Not included in the *Self-Assessment* recommendation for the implementation of GCG for the 2019 financial year and/or the *Assessment* for the 2018 financial year

Beberapa butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas, meskipun ada beberapa butir yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, penerapan GCG di Perusahaan telah diterapkan atau berjalan dengan baik, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,868 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 98,043%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen

Several points of recommendation that become Areas of Improvement of GCG implementation in the Company, as attached in the table above, although several points need to be considered or followed up further, in general, it can be concluded that the implementation of GCG in the Company has been implemented or is running well, as described below:

1. Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 6.868 out of a weight of 7.000 or equivalent to the percentage of achievement of 98.043%. This shows that the commitment to sustainably

penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 6,848 atau 97,825% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 0,218 poin.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,926 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 99,175%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 8,944 atau 99,374% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat penurunan sebesar 0,199 poin.
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 33,963 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 97,037%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,289 atau 95,111% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 1,926 poin.
4. Aspek Direksi
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 34,110 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 97,457%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,293 atau 95,123% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 2,334 poin.
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,573 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 95,256%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 8,431 atau 93,679% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 1,577 poin.
6. Aspek Lainnya
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 4,375 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 87,500%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah

implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 6.848 or 97.825% of the total weight of 7.000, there was an increase of 0.218 points.

2. *Aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners*
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 8.926 out of a weight of 9.000 or equivalent to the percentage of achievement of 99.175%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 8.944 or 99.374% of the total weight of 7.000, there was a decrease of 0.199 points.
3. *Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board*
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 33.963 out of a weight of 35.000 or equivalent to an achievement percentage of 97.037%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 33.289 or 95.111% of the total weight of 7.000, there was an increase of 1.926 points.
4. *Aspects of the Board of Directors*
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 34.110 out of a weight of 35.000 or equivalent to the percentage of achievement of 97.457%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 33.293 or 95.123% of the total weight of 7,000, there was an increase of 2.334 points.
5. *Aspects of Information Disclosure and Transparency*
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 8.573 out of a weight of 9.000 or equivalent to the percentage of achievement of 95.256%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 8.431 or 93,679% of the total weight of 7.000, there was an increase of 1.577 points.
6. *Other Aspects*
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 4.375 out of a weight of 5.000 or equivalent to an achievement percentage of 87.500%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very

berjalan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 5,00 atau 100,00% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat penurunan sebesar 12,500 poin.

Pengukuran dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di tahun buku 2015 dilakukan melalui metode *Self Assessment* oleh Tim Internal Jamkrindo, yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas No.767/SPT/1/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019. Tim Pelaksana *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Jamkrindo Tahun 2019 beranggotakan antara lain:

Good”. When compared to the previous year’s score, which was 5,00 or 100.00% of the total weight of 7.000, there was a decrease of 12.500 points.

Measurement and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for Fiscal Year 2019

The implementation of the GCG implementation assessment in the 2015 fiscal year was conducted through the Self-Assessment method by the Jamkrindo Internal Team, which was formed based on Assignment Order No.767/SPT/1/XII/2019 dated December 3, 2019. The Implementation Team for the Self-Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) of Jamkrindo in 2019 consists of.

Jabatan Tim Team Position	Nama Name	Jabatan Position
Ketua Chairman	M. Adhy Prayitno	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Control
Wakil Ketua Vice-Chairman	Abdul Bari	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Koordinator 1 Coordinator 1	Dadang Ary Aviyanto	Plt. Wakil Kepala Satuan Pengawasan Intern Act. Deputy Head of Internal Audit Unit
Koordinator 2 Coordinator 2	Siti Maesaroh	Kepala Bagian Kebijakan dan Pengembangan SDM Head of Policy and Human Resources Development
Anggota Member	Dodi Rinto Wibowo	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Head of Budget Planning and Control
	Anggit Murdiwibowo	Kepala Bagian Kesekretariatan Head of Secretariat
	Harjanto	Plt. Kepala Bagian Sistem Manajemen dan Pengembangan Organisasi Act. Head of Management System and Organizational Development Section
	Imron Wahidin	Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Bidang Non Penjaminan Act. Section Head of Compliance Section for Non-Guarantee
	Anna Dwiyantri	Kepala Seksi Pengadaan Jasa dan Konsultan Section Head of Service and Consultant Procurement
	Asep Ginanjar Cahya Gumilar	Kepala Seksi Administrasi Pelaporan dan Penganggaran Audit Section Head of Audit Reporting and Budgeting Administration
	Andik Sugiarto	Staf Bagian Audit Wilayah III Region III Audit Staff
	Emmerisa br. Sembiring	Staf Bagian Audit Wilayah II Region II Audit Staff
	Michael Ranap Simanjuntak	Staf Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi Staff of Corporate Audit and Information Technology
	Pressi Hapsari Fadlilah	Staf Bagian Kesekretariatan Secretarial Staff
	Sistiana Kurnia Widyasari	Staf Bagian Kebijakan dan Pengembangan SDM HR Policy and Development Department Staff
	Justan	Staf Bagian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Budget Planning and Control Staff
	Hapsa Lumaela	Staf Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Business Planning and Development Staff
	Sinatria Gaza Lovendra	Pro Hire

Jenis Penilaian <i>Rating Type</i>	:	Self Assessment/Evaluasi <i>Self-Assessment/Evaluation</i>
Penilai <i>Assessor</i>	:	Tim Pelaksana Self Assessment Penerapan GCG Jamkrindo <i>Self-Assessment Team for the Implementation of Jamkrindo's GCG Implementation</i>
Metode Penilaian <i>Assessment Method</i>	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 <i>Indicators/Parameters of Assessment of the Implementation of GCG SK16/S.MBU/2012</i>
Tahun Buku Penerapan <i>Fiscal Year of Application</i>	:	1 Januari – 31 Desember 2019 <i>January 1 – December 31 2019</i>
Waktu Pengukuran <i>Measurement Time</i>	:	Januari s.d Juni 2020 <i>January to June 2020</i>
Waktu Terbit Laporan <i>Waktu Terbit Laporan</i>	:	24 Juli 2020 <i>July 24, 2020</i>

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Jamkrindo memperoleh skor capaian sebesar 95,804 dari skor maksimal 100 dengan kualifikasi “SANGAT BAIK”, dengan rincian sebagai berikut:

Based on the results of the assessment, Jamkrindo obtained an achievement score of 95.804 out of a maximum score of one hundred with the qualification “VERY GOOD”, with the following details:

Aspek <i>Aspect</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Score</i>	Pencapaian <i>Achievement (%)</i>
1	2	3	(4=3/2 x 100)
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,000	6,848	97,825
II Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and GMS</i>	9,000	8,944	99,374
III Dewan Pengawas/Dewan Komisaris <i>Supervisory Board/Board of Commissioners</i>	35,000	33,289	95,111
IV Direksi <i>Directors</i>	35,000	33,293	95,123
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,000	8,431	93,679
VI Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	5,00	100,00
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>	100,000	95,804	95,804
Peringkat Kualitas Penerapan GCG <i>GCG Implementation Quality Rating</i>	“Sangat Baik”		

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment <i>Assessment Implementation Quality Classification</i>	
Nilai di atas 85 <i>Score above 85</i>	: Sangat Baik <i>Very Good</i>
75 < Nilai ≤ 85 <i>75 < Score ≤ 85</i>	: Baik <i>Good</i>
60 < Nilai ≤ 75 <i>60 < Score ≤ 75</i>	: Cukup Baik <i>Moderate</i>
50 < Nilai ≤ 60 <i>50 < Score ≤ 60</i>	: Kurang Baik <i>Poor</i>
Nilai ≤ 50 <i>Score ≤ 50</i>	: Tidak Baik <i>Bad</i>

Berdasarkan hasil *Self Assessment GCG* tahun buku 2019, Jamkrindo memperoleh sebesar 95,804 dengan predikat sangat baik dan terdapat usulan perbaikan yang dimana sampai saat ini 40 usulan perbaikan. Berikut rincian *Area of Improvement* pada tahun 2019 pada masing-masing aspek beserta progresnya.

Based on the results of the GCG Self-Assessment for the 2019 fiscal year, Jamkrindo received a score of 95.804 with a very good predicate and there are suggestions for improvement of which to date forty proposals for improvement. The following are the details of the Area of Improvement in 2019 in each aspect and their progress.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>			
1	Agar ketentuan terkait gratifikasi disosialisasikan kepada seluruh Insan Jamkrindo, selain itu Perusahaan agar menampilkan informasi program Pengendalian Gratifikasi pada halaman pertama website perusahaan sehingga mudah ditemukan oleh <i>stakeholders</i> . <i>For the provisions related to gratification to be issued to all employees of the Company, in addition, the Company should display information on the Gratification Control program on the first page of the company's website so that stakeholders easily find it.</i>	✓	2019	Telah dilakukan sosialisasi budaya kepatuhan terhadap gratifikasi melalui memorandum No. B.396/INT/MRP/ DLT/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Sosialisasi Kebijakan Strategi Anti Faud dan Pengelolaan Budaya Kepatuhan Terhadap Gratifikasi. Halaman situs web Perusahaan telah dilakukan pengkinian dengan menampilkan informasi program <i>The socialization of gratification compliance culture has been conducted through memorandum No.B.396/INT/MRP/ DLT/VI/2020 dated June 18, 2020 concerning Socialization of Anti Faud Strategy Policy and Management of Gratification Compliance Culture. The Company's website page has been updated by displaying program information</i>
2	Agar website Perusahaan menampilkan informasi link saluran pengaduan WBS secara lebih jelas, yaitu dengan memasang icon pada halaman awal website sehingga mudah diakses. <i>For the Company's website to display information on the WBS complaint channel link more clearly, by installing an icon on the website's home page so that it is easily accessible.</i>	✓	2019	Telah terlampir pada menu halaman utama situs web Perusahaan pada bagian info dengan alamat www.jamkrindo.co.id/sistem-pelaporan-pelanggaran-whistle-blowing-system . <i>It has been attached to the main page menu of the Company's website with www.jamkrindo.co.id/sistem-pelaporan-pelanggaran-whistleblowing-system address.</i>
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>			
1	Agar pemegang saham lebih memperhatikan tenggat waktu dalam jangka waktu penetapan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. <i>For shareholders to pay more attention to the deadlines for the appointment of members of the Supervisory Board/Board of Commissioners.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
2	Agar meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja Direksi dengan memberikan ukuran kinerja untuk masing-masing Direksi secara individual. <i>To improve the quality of the Board of Directors' performance appraisal system by providing performance measures for each of the Directors individually.</i>	✓	2020	Tahun 2020 Goal Setting KPI Direksi telah dibuat secara individual sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komite No. 001/BAK/SPO/VI/2020 tentang Komite Penetapan Goal Setting KPI Unit Kerja Tahun 2020. Dokumen dimaksud telah disampaikan Divisi Perencanaan Strategis dalam memorandum No. B.153/INT/PRS/STF/IX/2020. <i>In 2020, Goal Setting for Board of Director's KPI has been made individually as stated in the Minutes of Committee No. 001/BAK/SPO/VI/2020 concerning Committee for KPI's Setting Determination for Working Unit in 2020. The document has been submitted by Strategic Planning Division in memorandum No.B.153/INT/PRS/STF/IX/2020.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
3	Agar Rencana Kerja Dewan Pengawas atas proses persetujuan RJPP dituangkan dalam RKAT pada tahun sebelum RJPP dirilis. <i>So that the Work Plan of the Supervisory Board on the RJPP approval process is stated in the RKAT in the year before the RJPP is released.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
III	Dewan Pengawas/Dewan Komisaris <i>Supervisory Board/Board of Commissioners</i>			
1	Agar dilakukan improvement terhadap Board Manual sehingga mencakup aturan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi. <i>To make improvements to the Board Manual so that it includes rules about the period for the Supervisory Board to respond to the draft RKAP proposed by the Board of Directors.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>
2	Agar dilakukan improvement terhadap Board Manual sehingga mencakup kebijakan spesifik pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. <i>To make improvements to the Board Manual so that it includes specific policies for supervision and providing advice on company risk management policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Governance Good Companies (GCG) in BUMN.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>
3	Agar dilakukan improvement terhadap Board Manual sehingga telah secara spesifik mencakup kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. <i>To make improvements to the Board Manual so that it specifically covers the company's information technology system policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
4	Agar dilakukan <i>improvement</i> terhadap <i>Board Manual</i> sehingga telah secara spesifik mencakup kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN <i>To make improvements to the Board Manual so that it specifically covers procurement policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>
5	Agar dilakukan <i>improvement</i> terhadap <i>Board Manual</i> sehingga mencakup kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. <i>To make improvements to the Board Manual so that it includes quality and service policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>
6	Agar dilakukan <i>improvement</i> terhadap <i>Board Manual</i> sehingga mencakup aturan yang jelas dan spesifik mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. <i>To make improvements to the Board Manual so that it includes clear and specific rules about supervision and providing advice to the Supervisory Board on the company's compliance in conducting the applicable laws and regulations and the articles of association as well as the company's compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
7	Agar Laporan Manajemen Triwulanan ditandatangani juga oleh Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama <i>So that the Quarterly Management Report is also signed by the Chairman of the Supervisory Board/President Commissioner</i>	x	2020	Tindak lanjut yang disampaikan adalah AD/ART No.2 tanggal 9 April 2020 pada Pasal 19 Ayat 6 di mana "Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi" Sedangkan assessment GCG pada tahun 2019 mengacu pada SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN Aspek III "Dewan Komisaris/Dewan Pengawas" indikator 17 parameter 59 point 4 dijelaskan bahwa "Komisaris utama/Ketua Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d Triwulanan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi." <i>The follow-up submitted is AD/ART No.2 dated April 9, 2020 in Article 19 Paragraph 6 where "Quarterly Report as referred to in paragraph 5 of this Article is signed by all members of the Board of Directors" While the GCG assessment in 2019 refers to SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning indicators/parameters of assessment and evaluation of GCG implementation in SOEs Aspect III "Board of Commissioners/Board of Trustees" indicator 17 parameter 59 point 4 explained that "The President Commissioner/Chairman of the Board of Trustees signed the Quarterly Management Report I to Quarterly III, and all members of the Board of Commissioners/Board of Trustees signed the Annual Management Report, after being evaluated/discussed by the Board of Commissioners/Board of Trustees and Board of Directors."</i>
8	Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individual kepada RUPS dalam Laporan Kegiatan dan Keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. <i>The Supervisory Board evaluates the performance of the Board of Directors individually and the Supervisory Board gives the results of the performance assessment of the Board of Directors collegially and individually to the GMS in the Activity and Financial Report sent to the Shareholders as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOE No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN.</i>	✓	2020	Pada tahun 2020 penilaian Kinerja Direksi secara Individu telah disusun. <i>In 2020 the Performance assessment of the Board of Directors individually has been prepared.</i>
9	Menindaklanjuti AOI tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti. <i>Following up on the 2018 AOI which has not been followed up.</i>	x	2020	AOI Tahun 2018 telah selesai ditindaklanjuti. <i>AOI Year 2018 has been completed followed up.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
10	Agar dilakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat. <i>To evaluate the performance achievement of each member of the Board of Commissioners as outlined in the Minutes of Meeting.</i>	x	2019	Belum dilakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat <i>Has no evaluation of performance achievements of each member of the Board of Commissioners as set forth in the Minutes of Meeting</i>
11	Agar Board Manual ataupun Pedoman pengelolaan rapat Dewas mengatur atas evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. <i>For the Board Manual or the Board of Directors meeting management guidelines to regulate the follow-up evaluation of the results of the earlier meeting and discussion/review of the Board of Directors' proposals and the GMS's direction/decision related to the Board of Directors' proposal.</i>	✓	2020	Tertuang pada Dewan Komisaris dan Direksi No.03/SKB/1/XII/2020–KEP07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan Board Manual tahun 2012. <i>Stated on Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No.03/SKB/1/XII/2020–KEP07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020 replacing the Board Manual in 2012.</i>
12	Agar Sekretaris Dewan Pengawas selalu menyampaikan risalah rapat keseluruhan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat selesai dilaksanakan. <i>So that the Secretary of the Supervisory Board always sends the minutes of the entire meeting of the Supervisory Board no later than 7 days after the meeting is over.</i>	x	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
13	Sekretariat Dewan Pengawas agar menyampaikan bahan-bahan rapat paling lambat 3 hari sebelum diadakannya rapat serta mendokumentasikan penyerahan dokumen tersebut. <i>Secretariat of the Board of Trustees shall deliver the meeting materials at least 3 days prior to the meeting and document the submission of such documents.</i>	✓	2018	Sampel dokumentasi penyampaian bahan rapat 3 hari sebelum rapat dimulai. <i>Sample documentation of meeting materials delivered 3 days before the meeting starts.</i>
IV	Direksi <i>Directors</i>			
1	Memperbarui SOP KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) terbaru. <i>Updating the KUR SOP following the latest Coordinating Minister for Economic Affairs (Permenko) Regulation.</i>	✓	2020	Perusahaan telah mengeluarkan Surat Edaran No.22/SE/2/VI/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kredit Usaha Rakyat PT Jaminan Kredit Indonesia per tanggal 22 Juni 2020. <i>The Company has issued Circular Letter No.22/SE/2/VI/2020 concerning Implementation Instructions (Juklak) of People's Business Credit of PT Jaminan Kredit Indonesia as of June 22, 2020.</i>
2	Mengisi posisi Kepala Bagian yang kosong dan Menyusun database yang menyebutkan siapa saja karyawan yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga. <i>Filling the vacant Head of Division positions and compiling a database that mentions which employees can take over the main jobs if employees quit, retire, die unexpectedly.</i>	✓	2021	Telah ditindaklanjuti melalui memorandum Divisi MSDM No.B.97/INT/SDM/KPS/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Perusahaan memiliki database karyawan melalui aplikasi Integrated Talent Management System. <i>It has been followed up through the memorandum of HR Management Division No.B.97/INT/SDM/KPS/I/2021 dated January 19, 2021 and the Company has a database of employees through the Integrated Talent Management System application.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
3	Agar Master Plan TI tahun 2019 s.d 2023 dan kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan IT untuk disahkan menjadi ketentuan Perusahaan <i>So that the IT Master Plan for 2019 up to 2023 and data management policies, data management procedures, and IT reporting to be ratified as Company regulations</i>	✓	2019	- Peraturan Direksi No.23/Per-Dir/3/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Master Plan Teknologi Informasi 2019-2023. <i>Board of Directors Regulation No.23/Per-Dir/3/XII/2019 dated December 12, 2019 concerning Information Technology Master Plan 2019-2023.</i> - Surat Edaran No.33/SE/3/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Information Technology Disaster Recovery Plan. <i>Circular Letter No.33/SE/3/X/2020 dated October 5, 2020 concerning Instructions for Implementation of Information Technology Disaster Recovery Plan.</i>
4	Agar pada tahun 2020 kebijakan/program Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan menjalankan program reward dan punishment sesuai ketentuan yang ada. <i>So that in 2020 the education and training policies/programs are implemented under the work plan that has been set and run the reward and punishment program by existing regulations.</i>	✓	2020	Daftar pelatihan yang telah direalisasikan selama tahun 2020 sedangkan reward & punishment telah diterapkan melalui penilaian kinerja KPI Individu. <i>The list of trainings that have been realized during 2020 while reward & punishment has been applied through the assessment of individual KPI performance.</i>
5	Agar Perusahaan Menyusun kebijakan terkait anak perusahaan yang mencakup hal-hal tersebut di atas. <i>For the Company to develop policies related to subsidiaries that include the matters mentioned above.</i>	✗	-	Belum ada Tindak Lanjut <i>No Follow Up Yet</i>
6	Agar Perusahaan menerapkan standar akuntansi terkait dengan perkembangan terbaru lingkungan perusahaan, antara lain diberlakukannya PSAK 71, 72 dan 73. <i>For the Company to apply accounting standards related to the latest developments in the corporate environment, among others, the enactment of PSAK 71, 72, and 73.</i>	✓	2019	Telah dilakukan penyesuaian PSAK 71, 72 dan 73 melalui Peraturan Direksi No. 21/Per-Dir/5/XI/2019. <i>Adjustments have been made to PSAK 71, 72 and 73 through Board of Directors Regulation No. 21/Per-Dir/5/XI/2019.</i>
7	Agar aplikasi SIMR dilakukan perbaikan sehingga risiko per unit kerja dapat teridentifikasi dan ditampilkan pada laporan triwulanan <i>For the SIMR application to be improved so that the risks per work unit can be found and displayed in quarterly reports.</i>	✓	2020	Telah dilakukan pengembangan pada Aplikasi SIMR terintegrasi yang telah disosialisasikan melalui memorandum Divisi PUKM No.B.700/INT/MRP/PRK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Undangan Sosialisasi Aplikasi SIMR Terintegrasi. <i>Development has been carried out on integrated SIMR Application that has been socialized through the memorandum of PUKM Division No.B.700/INT/MRP/PRK/X/2020 dated October 20, 2020 concerning Invitation for Socialization of Integrated SIMR Application.</i>
8	Agar Perusahaan menyelesaikan tindak lanjut dari rekomendasi SPI dan auditor eksternal (BPK dan BPKP) yang masih belum terselesaikan. <i>For the Company to complete the follow-up to the recommendations of SPI and external auditors (BPK and BPKP) which are still unresolved.</i>	✗	2019	TL BPK PDTT 2018 progres sebesar 83,78% atau baru ditindaklanjuti 31 dari 37 rekomendasi. <i>Follow-up BPK PDTT 2018 progress of 83.78% or just followed up 31 out of 37 recommendations.</i>
9	Agar Perusahaan lebih mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK mengingat apabila tidak dipatuhi berpotensi terhadap pembekuan usaha Perusahaan. <i>For the Company to comply more with the provisions set by the OJK, considering that if it is not followed, it has the potential to freeze the Company's business.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
10	Agar Perusahaan segera menindaklanjuti rekomendasi atas laporan survei kepuasan pelanggan yang belum ditindaklanjuti. <i>So that the Company immediately follows up on recommendations on customer satisfaction survey reports that have not been followed up.</i>	x	-	Dalam proses pembahasan komite. <i>In the process of discussion of the committee.</i>
11	Agar pembayaran dan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan) tepat waktu <i>So that the payment and submission of tax obligation documents (Annual SPT and monthly) on time</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
12	Agar penyaluran pinjaman kemitraan dilakukan lebih prudent dan diupayakan penagihan atas pinjaman bermasalah tersebut. <i>So that the distribution of partnership loans is conducted more prudently, and efforts are made to collect the non-performing loans.</i>	✓	2019	Bagian PKBL kantor pusat sudah mengirimkan memo ke cabang-cabang untuk melakukan penagihan kepada Mitra Binaan yang menunggak. <i>The PKBL section in the head office has sent memos to the branches to collect to the delinquent Partners.</i>
13	Agar laporan manajemen disampaikan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham. <i>For the management report to be sent to the Supervisory Board/Board of Commissioners first before being sent to the Minister of BUMN as the shareholder.</i>	x	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
14	Agar dalam jadwal RKAP telah menjadwalkan agenda secara khusus seperti pembahasan laporan triwulanan maupun tahunan. <i>So that the RKAP schedule has specifically scheduled an agenda such as the discussion of quarterly and annual reports.</i>	x	2019	Bagian PKBL kantor pusat telah mengirimkan memo ke cabang-cabang untuk melakukan penagihan kepada Mitra Binaan yang menunggak. <i>PKBL unit at the head office has sent memos to branches to collect to the delinquent Partners.</i>
15	Agar dilakukan perbaikan atas piagam audit yang ada sehingga sesuai dengan standar ataupun best practice yang berlaku <i>To make improvements to the existing audit charter so that it is under applicable standards or best practices</i>	✓	2020	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.04/SKB/1/XII/2020–KEP-10/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) <i>Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.04/SKB/1/XII/2020–KEP-10/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Internal Audit Charter</i>
16	Agar dilakukan pelatihan berkelanjutan terhadap personil SPI dan dilakukan pembaharuan atas kebijakan audit yang ada. Kebijakan audit tersebut nantinya akan menjadi landasan untuk dijalankannya program jaminan kualitas audit yang efektif. <i>To conduct continuous training for SPI personnel and update existing audit policies. The audit policy will later become the basis for the implementation of an effective audit quality assurance program.</i>	✓	2020	Pelatihan berkelanjutan telah dilakukan oleh personil SPI pada tanggal 10 s.d 11 Desember 2020 tentang Integrated Risk-Based Internal Auditing dan Piagam Audit telah dilakukan perbaikan melalui harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>Continuous training has been conducted by SPI personnel on December 10 to 11, 2020 on Integrated Risk-Based Internal Auditing and Audit Charter has been improved through harmonization of Company Policy.</i>
17	Agar perencanaan tahunan mendatang dilakukan berbasis risiko dan dikomunikasikan secara formal kepada Dewan Pengawas cq Komite Audit. <i>So that the next annual planning is conducted on a risk basis and formally communicated to the Supervisory Board cq the Audit Committee.</i>	✓	2020	Memorandum SPI ke Sekretaris Perusahaan No.B.84/INT/SPI/STF/II/2020 tanggal 16 Februari 2020 tentang Penyampaian Perencanaan Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2020 Kepada Dewan Pengawas Perum Jamkrindo <i>Memorandum of SPI to Corporate Secretary No.B.84/INT/SPI/STF/II/2020 dated February 16, 2020 concerning Submission of Annual Audit Work Planning (PKAT) 2020 to the Supervisory Board of Jamkrindo</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
18	Agar Sekretaris Perusahaan juga melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. <i>So that the Corporate Secretary also conducts a review of the new laws and regulations.</i>	x	-	Belum ada tindak lanjut <i>No Follow Up Yet</i>
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>			
1	Agar Perusahaan mempublikasikan <i>Board Manual</i> dan Pedoman Perilaku di <i>website</i> . <i>For the Company to publish the Board Manual and Code of Conduct on the website.</i>	✓	2020	Situs web Perusahaan telah mempublikasikan berbagai dokumen tata kelola perusahaan, termasuk Board Manual, Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan <i>The Company's website has published various corporate governance documents, including the Board Manual, Code of Conduct, and the Company's Gratification Control Program</i>
2	Agar Perusahaan mencantumkan (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan pada laporan tahunan <i>For the Company to include (1) the establishment of a Consumer Complaint Centre; (2) Program to improve services to consumers; (3) Expenses that have been incurred in the annual report</i>	✓	2018	Situs web Perusahaan telah mempublikasikan berbagai dokumen yang memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik khususnya tentang program peningkatan layanan kepada konsumen serta biaya yang telah dikeluarkan. <i>The Company's website has published various documents containing disclosures of Good Corporate Governance practices in particular regarding service improvement programs to consumers as well as costs incurred.</i>
3	Agar Perusahaan memenuhi poin-poin dalam penilaian ARA sehingga dapat memenangkan penghargaan tersebut. <i>So that the Company fulfils the points in the ARA assessment so that it can win the award.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
V	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>			
Nihil / Null				

Beberapa butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* (AOI) penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas, meskipun ada beberapa butir yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, penerapan GCG di Perusahaan telah diterapkan atau berjalan dengan baik, sebagaimana uraian di bawah ini:

- Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,848 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 97,825%. Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah

Several points of recommendation that become Areas of Improvement (AOI) for the implementation of GCG in the Company, as attached in the table above, although several points need to be considered or followed up further, in general, it can be concluded that the implementation of GCG in the Company has been implemented or running well, as described below:

- Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 6.848 out of a weight of 7,000 or equivalent to the percentage of achievement of 97.825%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very

berjalan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 6,924 atau 98,913% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat penurunan sebesar 0,076 poin.

2. **Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS, skor yang dicapai adalah 8,944 atau 99,374% dari bobot keseluruhan 9,000. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS telah berjalan dengan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya yaitu 8,957 atau 99,519% terdapat penurunan sebesar 0,013 poin.
3. **Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, skor yang dicapai adalah 33,289 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 95,111%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah berjalan dengan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,351 atau 95,289%, terdapat penurunan sebesar 0,062 poin.
4. **Aspek Direksi**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 33,293 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 95,123%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,355 atau 95,300%, terdapat penurunan sebesar 0,062 poin.
5. **Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah 8,431 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 93,679%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi telah berjalan dengan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 8,743 atau 97,267% terdapat penurunan sebesar 0,323 poin.
6. **Aspek Lainnya**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah 5,000 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan presentase pencapaian sebesar 100,00%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Lainnya telah berjalan dengan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 4,475 atau 87,500% maka terdapat kenaikan sebesar 0,625 poin.

Good”. When compared to the previous year’s score, which was 6.924 or 98.913% of the total weight of 7,000, there was a decrease of 0.076 points.

2. **Aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners**
Based on the results of the assessment conducted on the Shareholders and GMS Aspects, the score achieved was 8.944 or 99.374% of the total weight of 9,000. This means that in general, the implementation of GCG for the Aspects of Shareholders and the GMS has been running “Very Good”. When compared to the previous year’s score of 8.957 or 99.519%, there was a decrease of 0.013 points.
3. **Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board**
Based on the results of the assessment conducted on the Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board, the score achieved was 33,289 out of a weight of 35,000 or equivalent to the percentage of achievement of 95.111%. This means that in general, the implementation of GCG for the Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board has been running “Very Good”. When compared to the previous year’s score, which was 33,351 or 95.289%, there was a decrease of 0.062 points
4. **Aspects of the Board of Directors**
Based on the results of the assessment that has been conducted on the Board of Directors Aspect, the score achieved is 33,293 out of a weight of 35,000 or equivalent to the percentage of achievement of 95.123%. This means that in general, the implementation of GCG for the Board of Directors Aspect has been running “Very Good”. When compared to the previous year’s score, which was 33,355 or 95.300%, there was a decrease of 0.062 points.
5. **Aspects of Information Disclosure and Transparency**
Based on the results of the assessment that has been conducted on the Aspect of Information Disclosure and Transparency, the score achieved is 8,431 out of a weight of 9,000 or equivalent to the percentage of achievement of 93.679%. This means that in general, the implementation of GCG for Aspects of Information Disclosure and Transparency has been running “Very Good”. When compared to the previous year’s score, which was 8.743 or 97.267%, there was a decrease of 0.323 points.
6. **Other Aspects**
Based on the results of the assessment that has been conducted on Other Aspects, the score achieved is 5,000 out of a weight of 5,000 or equivalent to an achievement percentage of 100.00%. This means that in general, the implementation of GCG for Other Aspects has been running “Very Good”. When compared to the previous year’s score, which was 4,475 or 87,500%, there was an increase of 0.625 points.

Tren Perkembangan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sejak dilakukan *Assessment GCG* pada tahun 2015 tercatat perkembangan hasil atau skor *assessment GCG* selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip *GCG* sesuai rekomendasi yang muncul. *Assessment* juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan *GCG*, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *assessment* menjadi masukan yang sangat penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan *GCG* Perusahaan adalah sebagai berikut:

Development Trends in the Assessment of Good Corporate Governance Implementation

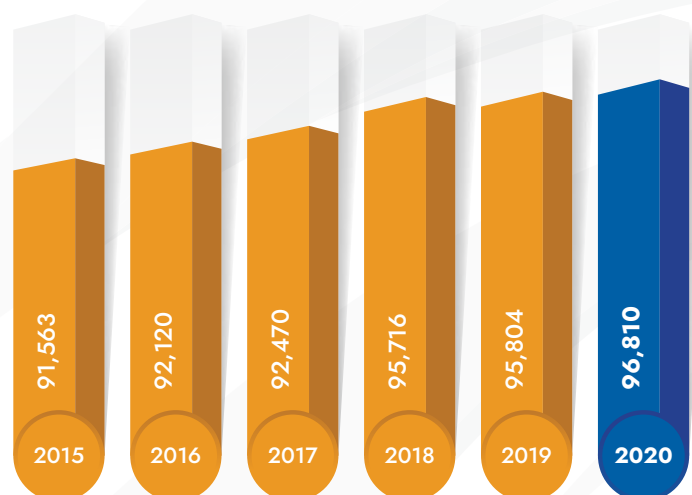
Since the *GCG Assessment* was carried out in 2015, the progress of the *GCG assessment results or scores* has always shown improvement. This reflects the Company's commitment to implementing *GCG principles* according to the recommendations that appear. The assessment is also linked to applicable regulations and best practices in the implementation of *GCG* so that areas that require improvement/improvement can be identified. The results of the assessment become a very important input for the Company in making decisions in the future.

A brief history of the Company's *GCG implementation assessment process* is as follows:

Pengukuran GCG Measurement	Tahun Buku Fiscal year	Assessor Assessor	Skor (%) Score (%)	Kategori Category
Assessment	2020	PT Cita Negeri Amanah	96,810	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2019	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment team	95,804	Sangat Baik Very Good
Assessment	2018	PT Citra Negeri Amanah	95,716	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2017	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment team	92,470	Sangat Baik Very Good
Assessment	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public accounting firm	92,120	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2015	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment team	91,563	Sangat Baik Very Good

Tren Perkembangan Skor Assessment GCG Jamkrindo, 2015-2020

Jamkrindo's GCG Assessment Score Development Trends, 2015-2020

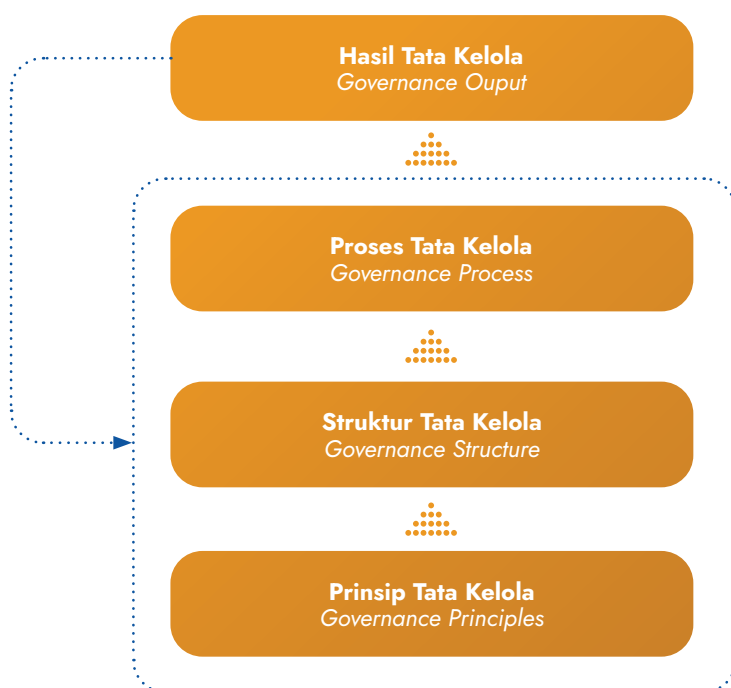


STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA

Governance Structure and Process

Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* sebagaimana telah dijelaskan di atas, diterapkan di lingkup Perusahaan melalui 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

The Governance Principles, as described above, are implemented within the Company through 2 (two) main aspects, namely the Governance Structure and the Governance Process. These 2 aspects are continuous with each other, which in the end will reflect the expected Governance Outcomes.



Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

The Governance Structure is an organ or device owned by the Company, either an organ or device formed due to compliance with applicable laws and regulations, as well as an organ or device formed due to internal needs to improve the implementation of GCG. Meanwhile, the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the overall management of the Company. The Governance process includes the rules and regulations that apply to the Company, Permanent Procedures, Charter, documents, until the rules are enforced that regulate the relationship between organs or devices.

Struktur Tata Kelola: Organ-Organ GCG

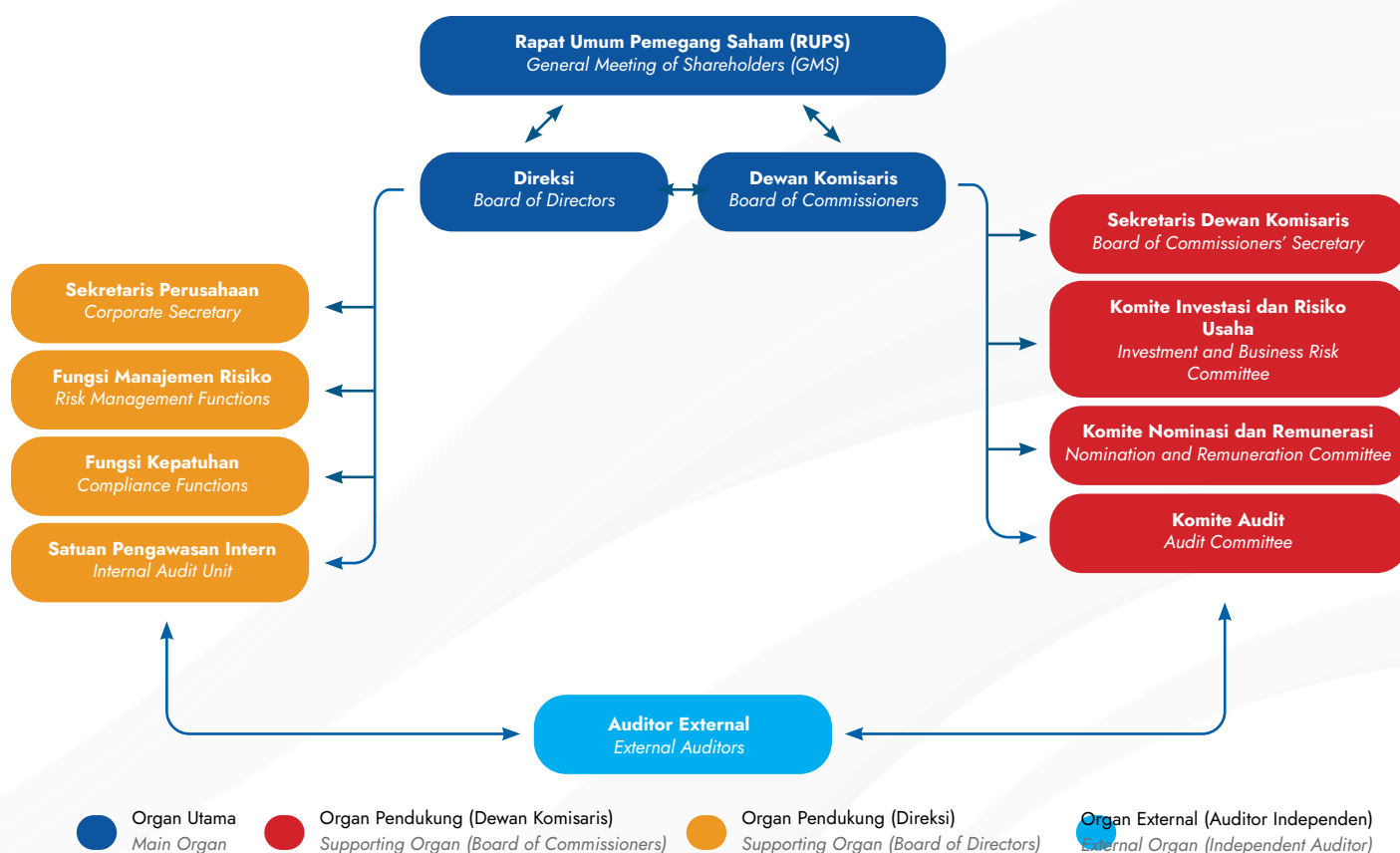
Struktur Tata Kelola Perusahaan memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan tujuan penerapan Prinsip Tata Kelola. Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan Pemegang Saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya mengelola, serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perusahaan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai inti serta budaya Perusahaan. Di samping itu, terdapat organ-organ pendukung mencakup Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

Governance Structure: GCG Organs

The Corporate Governance structure has several main aspects that play a role in supporting the strengthening of control and management of the Company following the objectives of implementing the Governance Principles. According to Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the organizational infrastructure of a Limited Liability Company includes the interests of Shareholders as outlined in the General Meeting of Shareholders (GMS), The Board of Directors with the task of managing; and the Board of Commissioners whose function is to supervise. The management system of a Limited Liability Company adheres to a 2 (two) body model or a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear authority and responsibility according to their respective functions as mandated in the rules and regulations as well as the Articles of Association.

The company has these three main organs, namely the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors have the responsibility to maintain long-term business continuity. The Board of Commissioners and the Board of Directors must have the same perception of the vision, mission, and core values and culture of the Company. In addition, there are supporting organs including Internal Audit and Corporate Secretary.



Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang Saham dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan kedudukan yang setara, Pemegang Saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RUPS tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

In the General Meeting of Shareholders (GMS) forum, Shareholders can make important decisions related to investments that have been invested in the Company. Decisions taken at the GMS are based on the interests of the Company. Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights under the Articles of Association and the Laws and Regulations. With equal standing, Shareholders will carefully consider their decisions in the long-term interest of the Company. After the decision is taken, the GMS will delegate all supervisory authority and implementation of the decision to the Board of Commissioners and the Board of Directors. This is following the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

The management of the Company and the implementation of each decision of the GMS is carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners then supervises and provides advice to ensure that the objectives of the Company and the resolutions of the GMS are carried out optimally and achieved optimally. With such great duties and responsibilities in maintaining the sustainability of the Company, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committee while the Board of Directors is assisted by work units related to the governance mechanism.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Partnership and Community Development Program Unit

Dalam menjalankan bisnisnya PT Jamkrindo (Persero) menyadari bahwa dalam menjalankan bisnisnya dibutuhkan sinergi antara strategi bisnis dengan strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan kami terapkan untuk menitikberatkan perhatian perusahaan tidak hanya pada aspek ekonomi saja tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial. Perhatian pada ketiga pilar keberlanjutan tersebut menjadi perhatian Jamkrindo untuk terus maju dan membangun sinergi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Jamkrindo menyadari bahwa kehadiran perusahaan menjadi penting dalam rangka peran dan fungsinya sebagai salah satu BUMN untuk dapat mengembangkan dan memajukan masyarakat.

In running its business, PT Jamkrindo (Persero) realizes that running its business requires a synergy between a business strategy and a sustainability strategy. Our sustainability strategy is implemented to emphasize the company's attention not only on economic aspects but also on environmental and social aspects. Attention to the three pillars of sustainability has become Jamkrindo's attention to keep going and building synergies with various stakeholders. Jamkrindo realizes that the presence of a company is important in terms of its role and function as a state-owned company to be able to develop and advance society.

Dalam kerangka itulah, Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL dilingkungan Jamkrindo pada tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017. Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo juga mengacu kepada Peraturan Direksi No.15/Per-Dir/1/VII/2019 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan Perum Jamkrindo.

Ruang lingkup pelaksanaan program PKBL terbagi atas dua program utama. Pertama, pembinaan oleh Perusahaan BUMN terhadap pelaku usaha mikro dan menengah untuk meningkatkan kualitas usahanya melalui program Kemitraan; kedua, kegiatan bantuan langsung maupun tidak langsung yang bersifat pelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan atau penanggulangan bencana dalam program Bina Lingkungan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedua program utama tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat program, melalui Ketetapan Direksi Jamkrindo No.01/KD/1/V/2018 menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada di Direktorat Utama. Sejalan dengan *spirit* pembangunan berkelanjutan yang saat ini digelorkan oleh pemerintah, maka PKBL yang diselenggarakan oleh Jamkrindo tidak terbatas pada kegiatan filantropi, namun meningkat pada level *corporate community development*. Dengan demikian, program-program yang ada semaksimal mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Selama tahun 2020, Jamkrindo telah melaksanakan kegiatan Kemitraan melalui pembinaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh wilayah Indonesia melalui kantor-kantor cabang Perusahaan. Kami menyadari bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan kegiatan tersebut dalam mendukung penguatan UMKM & Koperasi di Indonesia.

Selain itu pada tahun 2020 Jamkrindo juga telah melaksanakan beberapa program Bina Lingkungan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Perusahaan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Berbeda dengan Program Kemitraan yang sifatnya pinjaman dana dengan jasa administrasi yang sangat ringan, penyaluran dana Program Bina Lingkungan bersifat

Within this framework, the Company implements the Partnership and Community Development Program (PKBL). The implementation of PKBL in the Jamkrindo environment in 2019 refers to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs, which was last amended by Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises which was promulgated in Jakarta on July 20, 2017. The distribution of the Jamkrindo Partnership and Community Development Program also refers to the Board of Directors Regulation No.15/Per-Dir/1/VII/2019 concerning Guidelines for the Delegation of Administrative Authority and Policy of Perum Jamkrindo.

The scope of implementing the PKBL program is divided into two main programs. First, guidance by BUMN companies for micro and medium enterprises to improve the quality of their business through the Partnership program; second, direct and indirect assistance activities that are environmental, social or disaster management in the Community Development program. To optimize the implementation of the two main programs so that the program is right on target and right, through the Decree of the Board of Directors of Jamkrindo No.01/KD/1/V/2018 is part of the Corporate Secretary who is in the Main Directorate. In line with the spirit of sustainable development currently being promoted by the government, the PKBL organized by Jamkrindo is not limited to philanthropic activities, but increases at the corporate community development level. Thus, the existing programs can contribute as much as possible to the independence of Micro, Small and Medium Enterprises, as well as support the empowerment of the social conditions of the community.

During 2020, Jamkrindo has carried out Partnership activities through fostering Micro, Small and Medium Enterprises players throughout Indonesia through the Company's branch offices. We realize that the Company has a big responsibility in carrying out these activities in supporting the strengthening of MSMEs & Cooperatives in Indonesia.

In addition, in 2020 Jamkrindo has also implemented several Community Development programs as a form of the Company's concern and concern for the communities around the company operating. In contrast to the Partnership Program, which is a loan fund with very light administrative services, the distribution of funds for the Community Development Program is in the form of

bantuan, atau kegiatan filantropi. Bantuan antara lain disalurkan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, sarana ibadah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bentuk akuntabilitas Jamkrindo, semua program atau kegiatan PKBL selama tahun pelaporan terangkum dalam Laporan Keuangan PKBL Jamkrindo tahun 2020. Laporan meliputi informasi mengenai penanggungjawab program, besaran dana yang dimiliki, rencana program serta realisasi penyaluran dana tersebut.

Perusahaan berharap dengan berjalannya program tersebut secara baik, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Laporan Keuangan PKBL Jamkrindo telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan. Audit dilakukan atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Opini auditor atas Laporan Keuangan PKBL Jamkrindo disampaikan pada bagian akhir Laporan ini. Semua informasi dalam Laporan Tahunan Jamkrindo tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

PKBL Jamkrindo dikelola oleh Unit PKBL Jamkrindo dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan PKBL dapat dilaksanakan secara optimal dan terfokus dengan memisahkan penanganan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, promosi dan sebagainya) dengan fungsi administrasi dan keuangan. Unit PKBL Jamkrindo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Jamkrindo secara keseluruhan.

Struktur Organisasi unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

assistance, or philanthropic activities. Assistance, among others, is distributed to victims of natural disasters, education and / or training, religious facilities and social assistance.

As a form of Jamkrindo's accountability, all PKBL programs or activities during the reporting year are summarized in the Jamkrindo PKBL Financial Report for 2020. The report includes information on the person in charge of the program, the amount of funds held, program plans and the realization of the distribution of these funds.

The company hopes that by running the program well, it can make a meaningful contribution to improving the welfare of the Indonesian people. Jamkrindo PKBL Financial Statements have been audited by an independent auditor from the Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountants Firm. An audit was carried out on the financial position report, activity report and cash flow statement for the year ended December 31, 2020. The auditor's opinion on the Jamkrindo PKBL Financial Report is presented at the end of this Report. All information in the 2020 Jamkrindo Annual Report has been fully published and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report and the Company's financial statements.

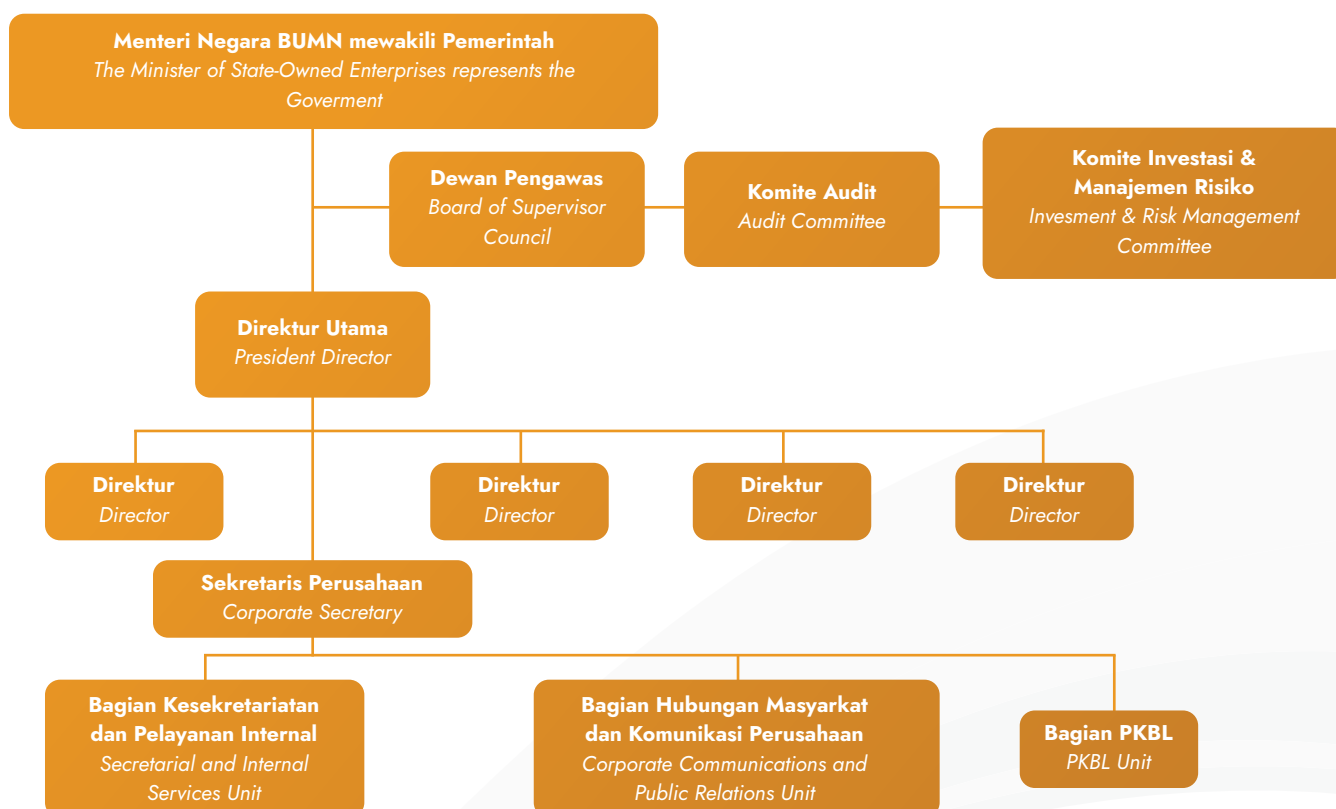
Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Unit

PKBL Jamkrindo is managed by the Jamkrindo PKBL Unit which is formed with the aim that PKBL management can be carried out optimally and focused by separating the handling of the guidance functions (evaluation, distribution, collection, training, promotion and so on) with administrative and financial functions. Jamkrindo's PKBL unit is an inseparable part of the overall Jamkrindo organizational structure.

The organizational structure of the Jamkrindo Partnership and Community Development Program unit as of December 31, 2020 is as follows

Direktur Board of Directors	Nama Name
Direktur Utama President Director	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Suwarsito
Direktur Operasional & Jaringan Director of Operations & Network	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan Director of HRM, General Affairs & Compliance	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko Director of Finance, Investment & Risk Management	I. Rusdonobanu

Staf Staff	Nama Name
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Abdul bari
Kepala Seksi PKBL PKBL Section Head	Nenden Kania Puji Asri
Staf PKBL PKBL Staff	Retno Indriani



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to Environment

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara entitas usaha, masyarakat dan pemerintah, termasuk korporasi seperti Jamkrindo. Walaupun bidang usaha Perusahaan adalah penjaminan kredit, Jamkrindo berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga keaneka ragaman hayati.

Kepedulian terhadap lingkungan antara lain diwujudkan melalui Program Bina Lingkungan, seperti pembuatan MCK, penyediaan sarana air bersih, saluran air, pengadaan gerobak dan tong sampah, maupun pelestarian alam dengan melakukan kegiatan penanaman pohon. Selain itu, kepedulian lingkungan juga dilakukan Jamkrindo melalui kebijakan yang berkaitan dengan operasional sehari-hari, antara lain penggunaan kertas, energi, air, pengurangan emisi kendaraan operasional, dan penanganan limbah.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan salah satu fokus kegiatan Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan. Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

Pemetaan Risiko dan Dampak Lingkungan dalam Kegiatan Operasi dan Bisnis Perusahaan

Perusahaan bergerak di bidang penjaminan kredit, sehingga tidak terdapat kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Namun demikian, dengan kantor cabang dan kegiatan operasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, kegiatan perkantoran Perusahaan berkontribusi terhadap potensi pemakaian sumber daya alam yang berlebihan, seperti energi listrik, air, kertas, maupun limbah perkantoran.

Concern for the environment is a shared responsibility between business entities, the public, and the government; this includes SOEs such as Jamkrindo. Although the Company's business sector is credit guarantee, Jamkrindo is committed to caring for the environment. The Company has the policy to preserve the environment to maintain biodiversity.

Concern for the environment, among others, was realized through the Community Development Program, such as the making of public toilets, provision of clean water facilities, water channels, procurement of trash carts and cans, as well as nature conservation by carrying out tree planting activities. In addition, environmental awareness is also carried out by Jamkrindo through policies relating to daily operations, including paper use, energy, water, reduction of operational vehicle emissions, and waste handling.

The effectiveness and efficiency of energy and material use are some of the focuses of the Company's activities towards corporate social responsibility in maintaining environmental quality. This is also a form of implementing the Company's compliance with Law No.32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The Environmental Policy is a guideline for the Company in carrying out operational activities that are increasingly environmentally friendly.

Mapping the Risks and Impacts of Fair Operations in The Company's Operations and Business Activities

The Company is engaged in credit guarantee, so there are no operations and business activities conducted by the Company that directly impact the environmental damage. However, with branch offices and operating activities spread across various regions in Indonesia, the Company's office activities contribute to the potential for excessive use of natural resources, such as electrical energy, water, paper, and office waste.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Sebagai pelaku usaha yang memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Jamkrindo mendorong program lingkungan melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan operasi perkantoran, seperti air, listrik dan bahan bakar minyak. Di samping, Jamkrindo terus terlibat dalam kegiatan bersama masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Penerapan Inisiatif: Program dan Kegiatan yang Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

- **Pelestarian Lingkungan Hayati**
Jamkrindo mendorong beberapa program pelestarian lingkungan seperti kegiatan kampanye sampah anti plastik di Cileuh berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mendukung kawasan Geopark Cileuh menjadi kawasan hijau dan pelestarian alam. Selain kegiatan tersebut, Jamkrindo juga melaksanakan program penghijauan di kawasan pesisir Pantai Palangpang dengan melakukan penanaman pohon.

Jamkrindo juga peduli terhadap sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program pengadaan sumber air bersih di Desa Cidapad, Kab. Sukabumi dan Provinsi Banten.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang asri, Jamkrindo melaksanakan kegiatan pelatihan hidroponik di Desa Cikidang, Kab. Sukabumi untuk mendorong perekonomian daerah tersebut serta menciptakan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan lahan kosong/pekarangan sebagai sumber ketahanan pangan dan pendapatan keluarga.

- **Penggunaan Material dan Energi dalam Operasional dan Usaha**
 - **Penggunaan Kertas**
Dalam penggunaan kertas, Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan dengan cara lebih banyak menggunakan surat elektronik atau email dalam menyampaikan informasi. Penghematan kertas juga dilakukan melalui pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat, atau jika memungkinkan mencetak naskah dalam kertas bolak-balik.

Target and Objective of Programs and Activities

As a business actor with branch offices spread across various regions in Indonesia, Jamkrindo encourages programs through the effective and efficient use of natural resources in office operations, such as water, electricity and fuel oil. In addition, Jamkrindo continues to be involved in activities with the community in environmental conservation.

Implementation of Initiatives: Programs and Activities Conducted Regarding Corporate Social Responsibility to the Environment

- **Environmental Conservation**
Jamkrindo encourages several environmental conservation programs such as anti-plastic waste campaign activities in Cileuh in collaboration with local communities to support the Cileuh Geopark area into a green area and nature conservation. In addition to these activities, Jamkrindo also carries out a reforestation program in the coastal area of Palangpang Beach by planting trees.

Jamkrindo also cares about water-based resources that are of good quality and can be utilized by the community through the clean water supply program in Cidapad Village, Kab. Sukabumi and Banten Province.

In an effort to create a beautiful environment, Jamkrindo carried out hydroponic training activities in Cikidang Village, Kab. Sukabumi to encourage the regional economy and create empowerment of the surrounding community in the use of vacant land/yards as a source of food security and family income.

- **The Use of Materials and Energy in Operations and Businesses**
 - » **Use of Papers**
In the use of paper, Jamkrindo has a savings policy by using more e-mail in delivering information. Paper saving is also done through the use of used paper for letter draftings, or if possible print the manuscript on the back and the front side of the paper.

Pengecekan naskah secara paripurna sebelum dicetak agar terhindarkan dari kesalahan juga mendapat perhatian. Dengan demikian, pencetakan ulang yang memboroskan kertas bisa dihindarkan. Penghematan penggunaan kertas penting dilakukan karena Jamkrindo menyadari bahwa pembuatan kertas identik dengan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagai bahan baku kertas.

Pada tahun 2020, jumlah penggunaan kertas Jamkrindo mencapai 1.185 rim, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang membutuhkan kertas sebanyak 1.150 rim. Meningkatnya penggunaan kertas di tahun 2020 ini seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan di tahun 2020. Dengan penggunaan sebanyak itu, rasio penggunaan kertas tahun 2020 adalah 3,96 rim per karyawan, turun dibanding rasio penggunaan kertas tahun 2019 yakni 4,26 rim per karyawan. Adapun limbah kertas diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Dalam operasional sehari-hari, Perusahaan tidak menggunakan kertas hasil daur ulang tersebut.

Paper saving is also done by checking the full text before printing so that printing mistakes can be avoided. With this, the act of reprinting that wastes paper can be avoided. The savings in the use of paper are important because Jamkrindo realizes that paper making is identical to the cutting and utilization of trees as paper raw material.

In 2020, the number of paper used for Jamkrindo's operations reached 1,185 reams or an increase if compared to 2019 which required 1,150 reams of paper. This increase in line with the increasing number of employees in 2020. With that much use, the ratio of paper used in 2020 is 3.96 reams per employee; this was a decrease when compared to the ratio of paper use in 2019, which was 4.26 reams per employee. The paper waste is handed over to third parties for recycling. In daily operations, the Company does not use recycled paper.

Penggunaan Kertas Paper Usage	2020	2020	Pencapaian achievement (%)	
			Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Volume (rim) Volume (ream)	1.185	1.150	35	3,04% 
Rasio penggunaan kertas (rim/karyawan) Paper usage ratio (ream/employee)	3,96 (299 karyawan) employee	4,26 (277 karyawan) employee	(0,30)	(7,04%) 

Jumlah Material Kertas dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (rim)

Amount of Paper Use in Operational and Business Activities 2016-2020 (ream)



» **Penggunaan Listrik**

Perusahaan menggunakan listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional. Untuk penggunaan energi listrik, Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan, di antaranya, dengan mengganti lampu perkantoran dengan lampu hemat energi, serta melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur. Perusahaan juga memastikan bahwa semua alat elektronik telah dimatikan saat karyawan usai bekerja dan keluar dari ruangan. Penghematan penggunaan listrik penting dilakukan karena Jamkrindo menyadari bahwa ketersediaan energi listrik di Indonesia masih terbatas.

Total penggunaan energi listrik pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.604,95 kWh, menurun jika dibanding tahun 2019 dengan penggunaan sebesar 2.608,38 kWh. Penurunan penggunaan listrik tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem kerja karyawan pada kondisi pandemi COVID-19 yaitu menjadi *work from home* (WFH)/*work from office* (WFO). Dengan penggunaan listrik sebesar itu, rasio per karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,36 kWh, turun dibanding rasio tahun 2019, yakni 6,57 kWh per karyawan.

» **Use of Electric Energy**

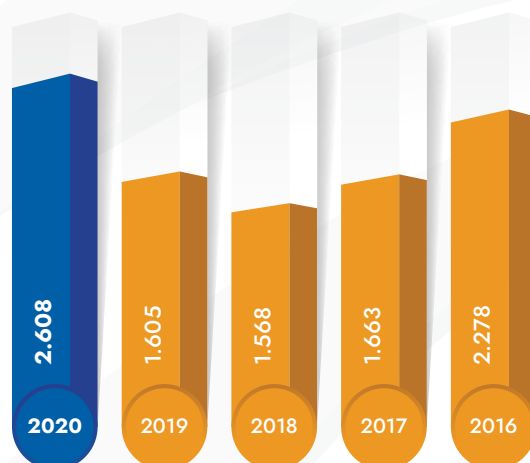
The Company uses electricity sourced from the National Electricity Company (PLN) as an energy source for the Company's operational activities. For the use of electrical energy, Jamkrindo has an energy saving policy, among others, by replacing office lights with energy saving lamps, as well as making efficient working hours by reducing overtime. The Company also ensures that all electronic devices have been turned off when employees finish working and leave the room. Savings in electricity use is important because Jamkrindo realizes that the availability of electricity in Indonesia is still limited.

The total electricity usage in 2020 was recorded at 1,604.95 KWh, or a decrease when compared to 2019 usage of 2,608.38 kWh. The decrease was due to changes in the employee's work system in the condition of the COVID-19 pandemic, namely to work from home (WFH)/work from office (WFO). With that much electricity usage, the ratio per employee in 2020 was 4.36 kWh, a decrease from the 2019 ratio of 6.57 kWh per employee.

Penggunaan Listrik Use of Electric Energy	2020	2020	Pencapaian achievement (%)	
			Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Volume (kWh) Volume (kWh)	1.604,95	2.608,38	(1003,43)	-38,47%
Rasio konsumsi energi listrik (kWh/pengguna Gedung*) The Ratio of Electricity Usage per Employee (kWh/building users)	3,60 Kwh/Karyawan employee	5,49 Kwh/Karyawan employee	(1,89) Kwh/Karyawan employee	-34,42%

Penggunaan Volume Energi Listrik dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (kWh)

Use of Electrical Energy in Operational and Business Activities 2016-2020 (kWh)



» **Penggunaan Air**

Air merupakan salah satu elemen alam yang bermetamorfosa melalui proses alami. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, terutama air yang bersumber dari tanah di wilayah perkotaan, berdampak langsung terhadap kualitas tanah dan air di wilayah tersebut.

Untuk penggunaan air, Jamkrindo memanfaatkan air dari PDAM dan tidak menggunakan air tanah. Pada tahun 2020, volume penggunaan air tercatat sebesar 10.448,20 meter kubik, turun dibanding tahun 2019 dengan penggunaan sebesar 14.059,70 meter kubik. Penurunan penggunaan air tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem kerja karyawan di kondisi pandemi COVID-19 yaitu menjadi *work from home* (WFH)/*work from office* (WFO).

Upaya Jamkrindo untuk menghemat penggunaan air adalah melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur, serta secara rutin melakukan pengecekan instalasi air dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan kebocoran. Adapun rasio penggunaan air per karyawan pada tahun 2020 adalah 23,42 meter kubik per karyawan, turun dibanding rasio tahun 2019, yang tercatat sebesar 29,60 meter kubik per karyawan.

» **Use of Water**

Water is one of the natural elements that metamorphoses through natural processes. The use of water in everyday life, especially water sourced from land in urban areas, has a direct impact on the quality of land and water in the region.

For water use, Jamkrindo uses water from PDAM and does not use groundwater. In 2020, the volume of water use was recorded at 10,448.20 cubic meters, a decrease from 14,059.70 cubic meters in 2019. This decrease was due to changes in the employee's work system in the condition of the COVID-19 pandemic, namely to work from home (WFH)/work from office (WFO).

The efforts of Jamkrindo to conserve water use are to make working hours efficient by reducing overtime, and routinely checking water installations and making repairs if damage causing leaks is found. The ratio of water use per employee in 2020 was 23.42 cubic meters, a decrease from the ratio in 2019, which was recorded at 29.60 cubic meters per employee.

Konsumsi Air Water Consumption	2020	2020	Pencapaian achievement (%)	
			Jumlah Total	Persentase (%) Percentage (%)
Volume (m ³) Volume (m ³)	10.448,20	14.059,70	(3611,50)	(25,68%) ▼
Rasio penggunaan air per karyawan (m ³ / karyawan) Ratio of Water Consumption per Employee (m ³ / employee)	23,42 m ³ /karyawan employee	29,60 m ³ /karyawan employee	(6,18) m ³ /karyawan employee	(20,87%) ▼

Penggunaan Volume Air dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (m3)

Water Consumption in Operational and Business Activities 2016-2020 (m³)



- **Penanganan Emisi**

Kepedulian Jamkrindo terhadap lingkungan juga ditunjukkan dengan upaya mengurangi emisi udara melalui peremajaan mobil operasional. Pada tahun 2017, Kantor Pusat melakukan peremajaan mobil sebanyak 2 (dua) buah dari total mobil operasional sebanyak 17 buah. Sementara pada tahun 2018, Sementara pada tahun 2018 - 2020 tidak dilakukan pengadaan mobil operasional baru, melainkan sesuai kebutuhan dilakukan pengadaan mobil dengan metode sewa dengan memperhatikan tahun mobil dengan keluaran terbaru.

Pengurangan emisi udara juga dilakukan Jamkrindo dengan melakukan penyewaan mobil keluaran terbaru dari pihak ketiga untuk Direksi dan Kepala Divisi, serta melakukan penyewaan mobil sesuai dengan keperluan (insidental).

Upaya pengurangan emisi lain yang dilakukan Jamkrindo berkaitan dengan emisi bahan perusak ozon (BPO). Dalam hal ini, Perusahaan berkomitmen untuk mengganti refrigeran (zat pendingin) AC yang ramah lingkungan.

Pengurangan emisi bahan perusak ozon patut didukung karena menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya radiasi ultraviolet matahari, terutama UV-B yang mampu mencapai permukaan bumi. Kondisi tersebut memiliki berbagai dampak pada kesehatan tubuh manusia.

- **Penanganan Limbah**

Dalam operasional sehari-hari, Jamkrindo menghasilkan limbah berupa sampah dan limbah dari WC. Untuk penanganan sampah, Perusahaan menyediakan cukup tempat sampah, selanjutnya sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir bekerja sama dengan dinas

- **Emission Management**

Jamkrindo's concern for the environment is also shown by its efforts to reduce air emissions through the rejuvenation of operational cars. In 2017, the Head Office rejuvenated 2 (two) cars from a total of 17 operational cars. While in 2018-2020, the Company does not conduct the procurement of new operational cars, but the Company conducts the procurement of cars with the rental method as needed by considering to the year of the car with the latest model.

Air emission reduction is also carried out by Jamkrindo by leasing the latest car from third parties for Directors and Head of Divisions, as well as car rental according to necessity (incidental).

Other emission reduction efforts carried out by Jamkrindo is related to emissions of ozone-depleting substances (ODS). In this case, the Company is committed to replacing air-conditioning refrigerants to those that are environmentally friendly.

Reduction of ozone-depleting substances emissions should be supported because the depletion of the ozone layer causes increased the sun's ultraviolet radiation, especially UV-B that can reach the surface of the earth. This condition has various effects on the health of the human body.

- **Waste Management**

In its daily operations, Jamkrindo produces waste in the form of garbage and waste from toilets. For waste management, the Company provides enough rubbish bins; the waste is then disposed to the final disposal site in collaboration with the sanitation department. As for the waste from the toilet,

kebersihan. Adapun limbah dari WC, akan dilakukan penyedotan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau dinas kebersihan.

Di samping itu, Gedung Jamkrindo telah dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah yang terletak di lantai B1 dan B2, dan mesin-mesin pengolahan tersebut dikelola dengan perawatan rutin oleh Badan Pengelola Gedung. Mesin tersebut berfungsi untuk mengolah air kotor yang dihasilkan oleh gedung Jamkrindo menjadi air dengan kadar racun dan limbah yang layak untuk dibuang di saluran air kotor kota Jakarta.

desludging is carried out through cooperation with third parties or the sanitation service.

In addition, Jamkrindo Building has been equipped with wastewater treatment system located on the B1 and B2 floors, and the processing machines are managed with regular maintenance by the Building Management Agency and third-party cooperation using sewage treatment plan (STP) services. The machine serves to process dirty water produced by jamkrindo building into water with toxic and waste levels that are eligible to be disposed of in the dirty waterways of Jakarta.

Kepatuhan

Upaya dan kesungguhan Jamkrindo untuk kepedulian lingkungan, termasuk melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional keseharian, membuahkan hasil dengan tidak adanya denda moneter maupun sanksi lain sepanjang tahun 2020. Hal itu tak lepas dari kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan lainnya selama menjalankan usaha.

Compliance

Jamkrindo's efforts and seriousness for environmental concern, including through various policies related to daily operations, resulted in zero sanctions in which the Company did not find any monetary fines or other sanctions throughout 2020. That is due to the Company's compliance with other environmental laws and regulations during the business.

Biaya dan/atau Investasi Tanggung Jawab Sosial Aspek Lingkungan

Costs and/or Investment of Corporate Social Responsibility for Environmental Aspects

Pada tahun 2020 Jamkrindo telah mengeluarkan biaya dan investasi dalam bidang lingkungan sebesar Rp945,69 juta, dengan rincian sebagai berikut.

In 2020 Jamkrindo has spent and invested in the environmental sector amounting to Rp945.69 million, with details as follows.

Uraian Descriptions	Realisasi 2020 (Rp-juta) Realization 2020 (IDR-million)	Anggaran 2020 (Rp-juta) Budget 2020 (IDR-million)	Penyerapan Anggaran 2020 (%) Absorption 2020 budget (%)		Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization 2019 (IDR-million)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) Realization 2020 To 2019 Realization (%)	
	1	2	(1:2)		3	(1:3)	
Biaya Perawatan Lift Elevator Maintenance Fee	130,75	151,80	86,13%	▼	118,54	110,30%	▲
Biaya Perawatan Taman Garden Maintenance Fee	296,87	310,99	95,46%	▼	263,45	112,69%	▲
Biaya Sewage Treatment Plan Sewage Treatment Plan Fee	105,60	124,20	85,02%	▼	102,74	102,78%	▲
Biaya Sistem Pendingin Gedung Building Cooling System Cost	412,48	469,20	87,91%	▼	357,00	115,54%	▲
Jumlah Total	945,69	1056,19	89,54%	▼	841,73	112,35%	▲

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Desember 2016, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017, maka dibuatlah rencana program kemitraan PT Jamkrindo yang sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Rencana penyaluran pinjaman program kemitraan sebesar Rp4.208.000.000 dari dana tersedia didistribusikan kepada 152 (seratus lima puluh dua) mitra binaan baru yang bergerak di bidang industri, perdagangan, dan perkebunan.

Based on the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No.PER-05/MBU/2007 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Smallscale Enterprises and Community Development Programs, which was updated through the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises, updated again with the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises dated December 19, 2016, and most recently updated through the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Programs and Community Development Programs for State-Owned Enterprises dated July 20, 2017, the environmental development program at PT Jamkrindo establishes a work plan that is in line with these regulations.

The partnership program loan distribution plan amounting to IDR4,208,000,000 of the available funds is distributed to 152 (one hundred and fifty two) new fostered partners engaged in industry, trade, and plantations.

Program kemitraan ini bertujuan guna meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi entitas yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berdasarkan Permen No.PER-02/MBU/7/2017, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sesuai dengan aturan dalam Permen No.PER-02/MBU/7/2017. Adapun usaha kecil tersebut dinamakan sebagai mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah Dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan. PT Jamkrindo merencanakan program kemitraan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

This partnership program aims to improve the ability of small businesses to become strong and independent entities by utilizing funds from the SOE profit share. Based on Permen No.PER-02/MBU/7/2017, small businesses are defined as small scale economic activities of the people and meet the criteria for net assets or annual sales proceeds and ownership in accordance with the regulations in Permen No.PER-02/MBU/7/2017. The small business is known as a foster partner. The source of funds for fostering partners is the Partnership Program Development Fund, which is a maximum of 20% of the Partnership Program funds disbursed in the current year. PT Jamkrindo plans a partnership program including providing loans to finance working capital and/or purchasing fixed assets in order to increase production and sales, providing assistance in the form of grants to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increasing the productivity of the Foster Partners.

KISAH SUKSES MITRA BINAAN

Success stories of Foster Partners



Kadek Trisnawati, Produsen Kain Grinsing (Batik Tulis)

Kadek Trisnawati, Manufacturer of Grinsing Fabrics (Written Batik)

PT Jamkrindo dengan komitmennya mendorong pelaku usaha Indonesia dalam mengembangkan usahanya berhasil membidik usaha kain grinsing milik Ibu Kadek Trisnawati ini.

PT Jamkrindo with its commitment to encouraging Indonesian business actors in developing their business has succeeded in targeting the grinsing fabric business owned by Mrs. Kadek Trisnawati.

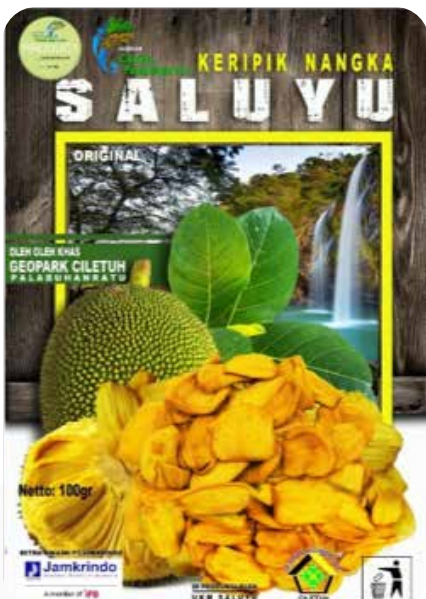


Cessbi, Brand Tas yang Bertahan Menghadapi Tantangan COVID-19

Cessbi, the Bag Brand that Survives the Challenges of COVID-19

Jamkrindo yang berkomitmen untuk mendukung usaha produk lokal tertarik dengan CESSBI dan berharap usaha ini akan semakin berkembang dengan target pasar yang semakin meluas.

Jamkrindo, which is committed to supporting local product businesses, is interested in CESSBI and hopes that this business will continue to grow with a wider target market.



Produk UKM Saluyu, Olahan Mangga menjadi Buah Tangan yang Diminati

Saluyu UKM Product, Processed Mango Becomes Interested Handiwork

Jamkrindo memberikan bantuan berupa mesin pengolah mangga, mesin vacuum, sealer, dan paket pelatihan senilai Rp15.950.000.

Jamkrindo provided assistance in the form of mango processing machines, vacuum machines, sealers, and training packages worth IDR15,950,000.

2020

LAPORAN PERUSAHAAN CORPORATE REPORT



A member of **IFG**

Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar - Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610

☎ (021) 6540335

☎ (021) 6540335

✉ contact@jamkrindo.co.id

🌐 www.jamkrindo.co.id

